



LAPORAN KEUANGAN BA 015 TA 2009

(Audited)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

JL. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT

BAGIAN ANGGARAN 015



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009
*AUDITED***

Jalan Wahidin No 1 Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan TA 2009 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp621.266.614.377.076,00 atau 95,19 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2009. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp12.762.371.875.491,00 atau 81,92 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2009.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp103.708.465.479.003,00 dan Kewajiban sebesar Rp359.251.417.318,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Keuangan

per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp103.349.214.061.685,00.

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2009 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI (*Audited*).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2010

Sekretaris Jenderal,



SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Pernyataan Telah Direviu

Merupakan pernyataan dari parat pengawasan intern kementerian negara/lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.

11. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

12. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan berdasarkan cetakan dari SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

13. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Neraca dihasilkan melalui SAI. Neraca Semester I menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni TA berjalan. Untuk Neraca Tahunan menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember TA berjalan. Neraca disajikan secara komparatif dengan posisi keuangan pada TAYL.

14. Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan pendapatan dan belanja selama tahun anggaran. Laporan yang disampaikan dapat dilihat pada lembar muka laporan keuangan. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif, dengan membandingkan anggaran dan realisasi TAYL dengan tahun anggaran berjalan.

15. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

CaLK merupakan unsur pokok, wajib, dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

16. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
 - iii) Neraca Percobaan
- b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan
 - ii) Laporan Posisi BMM di Neraca
- c. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- d. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
 - Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
- e. Laporan Rekening Pemerintah
- f. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

17. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

- a. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
- c. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
- d. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Laporan Barang Sitaan Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
Daftar Singkatan	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiii
Pernyataan Telah Direviu	xiv
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2009 dan 2008)	3
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2009 dan 2008)	4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan dan Hibah	20
B.2. Belanja	33
B.3. Catatan Penting Lainnya	43
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	55
C.1. Penjelasan Umum Neraca	55
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	56
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	97
D. Pengungkapan Penting Lainnya	106
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	106
D.2. Rekening Pemerintah	106
D.3. Barang Tegahan	106
D.4. Barang Sitaan	106

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER- 51 /PB/2008

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
- Laporan Posisi BMN di Neraca

Lampiran-Lampiran Lain :

[Daftar Isi – Halaman vi](#)

-
1. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
 2. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
 3. Laporan Rekening Pemerintah
 4. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
 5. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
 6. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
 7. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
 8. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	12
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	14
Tabel 3 Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009	20
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 dan 2008	21
Tabel 5 Realisasi Pendapatan Per Unit eselon I Tahun Anggaran 2009	22
Tabel 6 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009	22
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2009 dan 2008	23
Tabel 8 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009	25
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009 dan 2008	25
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun Anggaran 2009	27
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun Anggaran 2009 dan 2008	27
Tabel 12 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009	29
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 dan 2008	30
Tabel 14 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2009	31
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2009 dan 2008	31
Tabel 16 Realisasi Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2009	32
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 dan 2008	32
Tabel 18 Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 Berdasarkan Satuan Kerja	32
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2009	33
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 dan 2008	33
Tabel 21 Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I Tahun Anggaran 2009	34
Tabel 22 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2009	35
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2009 dan 2008	35
Tabel 24 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009	36
Tabel 25 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2009	37
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2009 dan 2008	37
Tabel 27 Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Tahun Anggaran 2009	38
Tabel 28 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2009	38
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2009 dan 2008	39
Tabel 30 Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Tahun Anggaran 2009	40
Tabel 31 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2009	40
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2008	41
Tabel 33 Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Tahun Anggaran 2009	41
Tabel 34 Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran 2009 dan 2008	42
Tabel 35 Komposisi Neraca	55
Tabel 36 Kas di Bendahara Pengeluaran Per Unit Eselon I	56
Tabel 37 Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I	57
Tabel 38 Kas Lainnya dan Setara Kas	57

Tabel 39	Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I	58
Tabel 40	Piutang Pajak Per Unit Eselon I	59
Tabel 41	Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2009	60
Tabel 42	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2009	60
Tabel 43	Rincian Piutang Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Per 31 Desember 2009	62
Tabel 44	Rincian Piutang Pajak DJBC Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2009	63
Tabel 45	Rincian Piutang PNBP Per Unit Eselon I	64
Tabel 46	Rincian Piutang PNBP di DJP	64
Tabel 47	Rincian Piutang PNBP di DJPB Per 31 Desember 2009	67
Tabel 48	Rincian Piutang PNBP di BPPK Per 31 Desember 2009	67
Tabel 49	Bagian Lancara Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR per Eselon 1 per 31 Desember 2009 dan 2008	68
Tabel 50	Uang Muka Belanja per Eselon 1 per 31 Desember 2009 dan 2008	68
Tabel 51	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I	69
Tabel 52	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	70
Tabel 53	Persediaan Per Eselon I	71
Tabel 54	Persediaan Per Jenis	71
Tabel 55	Persediaan BLU	72
Tabel 56	Daftar Saham BUMN	74
Tabel 57	Daftar Penjualan Saham BUMN	75
Tabel 58	Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset	76
Tabel 59	Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I	77
Tabel 60	Mutasi/Perubahan Tanah	78
Tabel 61	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I	78
Tabel 62	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin	79
Tabel 63	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I	80
Tabel 64	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan	81
Tabel 65	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I	82
Tabel 66	Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	82
Tabel 67	Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I	83
Tabel 68	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya	84
Tabel 69	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Penggerjaan Per Unit Eselon I	85
Tabel 70	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Penggerjaan	86
Tabel 71	Aset Tetap Tanah BLU	86
Tabel 72	Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU	86
Tabel 73	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU	87
Tabel 74	Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLU	87
Tabel 75	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	87
Tabel 76	Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	87
Tabel 77	Aset Tetap Lainnya BLU	88
Tabel 78	Kontruksi Dalam Penggerjaan BLU	88
Tabel 79	Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset	89
Tabel 80	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per Unit Eselon I	89
Tabel 81	Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I	90
Tabel 82	Aset Tak Berwujud BLU	90
Tabel 83	Aset Lain-lain Per Unit Eselon I	91
Tabel 84	Aset Lain-lain BLU	91
Tabel 85	Rincian Dana Kelolaan BLU	92
Tabel 86	Posisi Kewajiban Jangka Pendek	93

Tabel 87	Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I	93
Tabel 88	Utang Kepada Pihak Ketiga	94
Tabel 89	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2009 dan 2008	94
Tabel 90	Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I	95
Tabel 91	Pendapatan Yang Ditangguhkan per Unit Eselon I	95
Tabel 92	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per Unit Eselon I	96

DAFTAR GRAFIK

	Halaman	
Grafik 1	Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan TA 2009	20
Grafik 2	Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2009	21
Grafik 3	Komposisi Realisasi Pendapatan Perpjakan Per Jenis Penerimaan TA 2009	23
Grafik 4	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009	25
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2009 dan 2008	26
Grafik 6	Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2009	26
Grafik 7	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2008	30
Grafik 8	Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009	30
Grafik 9	Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2009 dan 2008	33
Grafik 10	Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2009	35
Grafik 11	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2009	36
Grafik 12	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2009	36
Grafik 13	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2009	37
Grafik 14	Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2009	39
Grafik 15	Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2009	41
Grafik 16	Komposisi Neraca	55
Grafik 17	Piutang Pajak DJP Per 31 Desember 2009	61
Grafik 18	Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset	76
Grafik 19	Perkembangan TA 2008 – 2009 Per Jenis Aset Tetap	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
Lampiran 2	LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Lampiran 3	Neraca Percobaan
Lampiran 4	Berita Acara Rekonsiliasi LRA
Lampiran 5	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran 6	Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan
Lampiran 7	Laporan Keuangan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Lampiran 8	Laporan Keuangan BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Lampiran 9	Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Lampiran 10	Piutang Pajak DJP
Lampiran 11	Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK
Lampiran 12	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpjakan DJP
Lampiran 13	Daftar Tagihan TGR
Lampiran 14	Pungutan Ekspor/Bea Keluar
Lampiran 15	Daftar Barang Sitaan Kementerian Keuangan
Lampiran 16	Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual TA 2009
Lampiran 17	Laporan Rekening Pemerintah
Lampiran 18	Temuan dan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
Lampiran 19	Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tim Penertiban Aset DJKN Lingkup Kementerian Keuangan
Lampiran 20	Peraturan Mengenai Kebijakan BAPEPAM-LK
Lampiran 21	Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pajak DJP

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMDTP	:	Bea masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
TNP	:	Treasury Notional Pooling

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Gedung "Juanda II" Departemen Keuangan Lantai IV
Jalan Dr.Wahidin No : 01 Jakarta 10710
Tromol Pos 3132 JKT.10031

Telepon : (021) 3865430
Sentral : 3810162 - 66
Faksimili : 3847448

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (*audited*) untuk tahun anggaran 2009 berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan secara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, Mei 2010



I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp620.049.826.409.435,00 atau mencapai 95,11 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.216.787.967.641,00 atau mencapai 177,97 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 adalah sebesar Rp12.762.371.875.491,00 atau mencapai 81,92 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp12.616.119.198.369,00 atau 83,98 persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp103.767.988.877,00 atau 22,75 persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah sebesar Rp42.484.688.245,00 atau 42,67 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)			
		TA 2009		TA 2008	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Perpajakan		651.954.823.000.000	620.049.826.409.435	607.227.490.000.000	658.360.457.964.268
PNBP		683.702.778.845	1.216.787.967.641	235.107.335.630.945	259.411.192.059.931
Hibah		0	0	0	0
Nilai Pendapatan Negara dan Hibah		652.638.525.778.845	621.266.614.377.076	842.334.825.630.945	917.771.650.024.199
BELANJA					
Belanja Rupiah Murni		15.023.634.441.000	12.616.119.198.369	14.326.517.664.104	11.819.190.843.252
Belanja PLN		456.102.151.000	103.767.988.877	447.306.200.000	203.148.034.335
Belanja Hibah		99.569.550.000	42.484.688.245	348.100.084.000	28.759.397.887
Jumlah Belanja		15.579.306.142.000	12.762.371.875.491	15.121.923.948.104	12.051.098.275.474

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Nilai Aset adalah sebesar Rp103.708.465.479.003,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp64.710.404.152.663,00, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.195.731.694.655,00, Aset Tetap sebesar Rp33.779.034.063.296,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.023.295.568.389,00.

Nilai Kewajiban adalah sebesar Rp359.251.417.318,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu, nilai Ekuitas Dana adalah sebesar Rp103.349.214.061.685,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp64.351.152.735.345,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp38.998.061.326.340,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(Dalam Rupiah) Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31 Desember 2009	31 Desember 2008	
Aset	103.708.465.479.003	127.911.078.098.936	(24.202.612.619.933)
Aset Lancar	64.710.404.152.663	93.782.740.244.521	(29.072.336.091.858)
Investasi Jangka Panjang	1.195.731.694.655	828.379.875.579	367.351.819.076
Aset Tetap	33.779.034.063.296	29.687.538.231.724	4.091.495.831.572
Aset Lainnya	4.023.295.568.389	3.612.419.747.112	410.875.821.276
Kewajiban	359.251.417.318	343.821.563.014	15.429.854.304
Kewajiban Jangka Pendek	359.251.417.318	343.821.563.014	15.429.854.304
Ekuitas Dana	103.349.214.061.685	127.567.256.535.922	(24.218.042.474.237)
Ekuitas Dana Lancar	64.351.152.735.345	93.438.918.681.507	(29.087.765.946.162)
Ekuitas Dana Investasi	38.998.061.326.340	34.128.337.854.415	4.869.723.471.924

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, penyajian Neraca atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRAKT PERBANDINGAN TA 2009 dan 2008)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	(31,371,911,401,770)	95.19
a.	Penerimaan Perpajakan	651,954,823,000,000	620,049,826,409,435	(31,904,996,590,566)	95.11
b.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	683,702,778,845	1,216,787,967,641	533,085,188,796	177.97
2.	HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	652,638,525,778,845	621,266,614,377,075	(31,371,911,401,769)	95.19
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	(1,093,523,880,485)	86.05
	Belanja Barang	4,739,768,892,000	3,242,814,084,419	(1,496,954,807,581)	68.42
	Belanja Modal	2,998,162,473,000	1,714,879,058,253	(1,283,283,414,747)	57.20
	Pembayaran Bunga Utang	0	1,056,827,836,304	1,056,827,836,304	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	(2,816,934,266,509)	81.92
C	PEMBIAYAAN				
1.	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)				
a.	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
b.	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
2.	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)				
a.	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
b.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei 2010

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Laporan : LRANT
Tanggal : Saturday, May 29,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_painait

No	URAIAN	2009				2008			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	(31,371,911,401,770)	95.19	642,334,825,630,945	917,771,650,024,199	75,436,824,393,254	108.96
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	651,954,823,000,000	620,049,826,409,435	(31,904,996,590,566)	95.11	607,227,490,000,000	658,360,457,954,268	51,132,967,964,268	108.42
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	683,702,778,845	1,216,787,967,641	533,085,188,796	177.97	235,107,335,630,945	259,411,192,059,931	24,303,856,428,986	110.34
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	(31,371,911,401,769)	95.19	642,334,825,630,945	917,771,650,024,199	75,436,824,393,254	108.96
B	BELANJA								
B.1	Rupiah Murni	15,023,634,441,000	12,616,119,198,369	(2,407,515,242,631)	83.98	14,326,517,664,104	11,819,190,843,252	(2,507,326,820,852)	82.50
	Belanja Pegawai	7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	(1,093,523,880,485)	86.05	7,330,023,231,373	6,140,889,155,639	(1,189,134,075,734)	83.78
	Belanja Barang	4,531,191,068,000	3,140,694,103,425	(1,390,496,984,575)	69.31	3,857,164,174,231	2,485,758,568,297	(1,371,405,605,934)	64.45
	Belanja Modal	2,651,068,596,000	1,670,746,362,125	(980,322,233,875)	63.02	3,139,330,258,500	2,283,409,026,372	(855,921,232,128)	72.74
	Pembayaran Bunga Utang	0	1,056,827,836,304	1,056,827,836,304	0.00	0	909,134,092,944	909,134,092,944	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Eantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.2	Pinjaman Luar Negeri	456,102,151,000	103,767,988,877	(352,334,162,123)	22.75	447,306,200,000	203,148,034,335	(244,158,165,665)	45.42
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	5,000,000	0	(5,000,000)	0.00
	Belanja Barang	113,015,024,000	59,635,292,749	(53,379,731,251)	52.77	112,360,356,000	54,010,192,041	(53,350,163,959)	48.07
	Belanja Modal	343,087,127,000	44,132,696,120	(298,954,430,872)	12.36	334,940,844,000	149,137,842,294	(185,803,001,705)	44.53
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.3	Hibah	99,569,550,000	42,484,688,245	(57,084,861,755)	42.67	348,100,084,000	28,759,397,887	(319,340,686,113)	8.26
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	2,008,500,000	1,519,633,250	(488,866,750)	75.66
	Belanja Barang	95,562,800,000	42,484,688,245	(53,078,111,755)	44.46	341,052,784,000	26,735,385,937	(314,317,398,063)	7.84

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : Saturday, May 29,
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2009				2008			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal	4,006,750,000	0	(4,006,750,000)	0.00	5,038,800,000	504,378,700	(4,534,421,300)	10.01
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	(2,816,934,266,509)	81.92	15,121,923,948,104	12,051,098,275,474	(3,070,825,672,630)	79.69
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei 2010

Rt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



III.NERACA
(NSAIKPT PERBANDINGAN TA 2009 dan 2008)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKS
 Tanggal : 29/05/10
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	4,021,141,586
Kas di Bendahara Penerimaan	11,580,915,329
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,487,211,062
Kas pada Badan Layanan Umum	684,555,535,893
Piutang Pajak	63,658,772,887,180
Piutang Bukan Pajak	87,368,486,446
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	228,062,418
Uang muka belanja	35,148,473,050
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	24,255,654,147
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	17,028,732,863
Persediaan	184,780,228,921
Persediaan Badan Layanan Umum	1,176,823,767
JUMLAH ASET LANCAR	64,710,404,152,663
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	1,195,731,694,655
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,195,731,694,655
ASET TETAP	
Tanah	16,447,664,813,816
Peralatan dan Mesin	6,424,420,868,487
Gedung dan Bangunan	9,173,928,261,053
Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,929,862,012
Aset Tetap Lainnya	259,015,726,496
Konstruksi Dalam Pengerjaan	629,408,676,151
Tanah Badan Layanan Umum	543,228,844,000
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	17,514,762,483
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	62,505,104,506
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	3,702,124,784
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	5,621,511,860
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	17,093,507,648
JUMLAH ASET TETAP	33,779,034,063,296
ASET LAINNYA	
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	5,422,524,799
Aset Tak Berwujud	312,417,249,310
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	534,108,790
Aset Lain-lain	386,815,398,044
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	2,706,287,446
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	3,315,400,000,000
JUMLAH ASET LAINNYA	4,023,295,568,389
JUMLAH ASET	103,708,465,479,003
KEWAJIBAN	

**NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 29/05/10
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	47,132,934,883
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294,292,169,306
Pendapatan Sewa diterima dimuka	1,803,878,207
Uang Muka dari KPPN	4,021,141,586
Pendapatan Yang Ditangguhkan	12,001,293,336
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	359,251,417,318
JUMLAH KEWAJIBAN	359,251,417,318
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	63,822,802,296,104
Cadangan Persediaan	185,957,052,688
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-342,162,149,341
Dana Lancar BLU	684,555,535,893
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	64,351,152,735,345
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1,195,731,694,655
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	33,779,034,063,296
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	4,023,295,568,389
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	38,998,061,326,340
JUMLAH EKUITAS DANA	103,349,214,061,685
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	103,708,465,479,003

Jakarta, Mei 2010

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 29/05/10
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2009	2008	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	4,021,141,586	6,910,417,866	(2,889,276,280)	(41.81)
Kas di Bendahara Penerimaan	11,580,915,329	2,551,056,124	9,029,859,205	353.96
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,487,211,062	0	1,487,211,062	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	684,555,535,893	221,279,325,236	463,276,210,657	209.36
Piutang Pajak	63,658,772,887,180	55,545,222,477,951	8,113,550,409,228	14.60
Piutang Bukan Pajak	87,368,486,446	37,821,028,316,862	(37,733,659,830,416)	(99.76)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan	228,062,418	236,813,241	(8,750,823)	(3.69)
Uang muka belanja	35,148,473,050	0	35,148,473,050	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	24,255,654,147	21,505,689,090	2,749,965,057	12.78
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	17,028,732,863	27,310,262,126	(10,281,529,263)	(37.64)
Persediaan	184,780,228,921	136,686,985,845	48,093,243,076	35.18
Persediaan Badan Layanan Umum	1,176,823,767	8,900,180	1,167,923,587	13,122.47
JUMLAH ASET LANCAR	64,710,404,152,663	93,782,740,244,521	(29,072,336,091,858)	(30.99)
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	1,195,731,694,655	707,595,178,400	488,136,516,255	68.98
Investasi Non Permanen Lainnya	0	120,784,697,179	(120,784,697,179)	(100.00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,195,731,694,655	828,379,875,579	367,351,819,076	44.34
ASET TETAP				
Tanah	16,447,664,813,816	14,429,849,284,717	2,017,815,529,099	13.98
Peralatan dan Mesin	6,424,420,868,487	5,918,215,830,895	506,205,037,592	8.55
Gedung dan Bangunan	9,173,928,261,053	7,565,818,510,870	1,608,109,750,183	21.25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,929,862,012	150,584,152,346	44,345,709,666	29.44
Aset Tetap Lainnya	259,015,726,496	242,709,155,830	16,306,570,666	6.71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	629,408,676,151	1,376,403,863,346	(746,995,187,195)	(54.27)
Tanah Badan Layanan Umum	543,228,844,000	0	543,228,844,000	0.00
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	17,514,762,483	3,709,034,840	13,805,727,643	372.21
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	62,505,104,506	0	62,505,104,506	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	3,702,124,784	206,174,500	3,495,950,284	1,695.62
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	5,621,511,860	42,224,380	5,579,287,480	13,213.42
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	17,093,507,648	0	17,093,507,648	0.00
JUMLAH ASET TETAP	33,779,034,063,296	29,687,538,231,724	4,091,495,831,572	13.78
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	5,422,524,799	8,857,225,495	(3,434,700,696)	(38.77)
Aset Tak Berwujud	312,417,249,310	201,420,558,400	110,996,690,910	55.10
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	534,108,790	484,208,790	49,900,000	10.30
Aset Lain-lain	386,815,398,044	222,442,451,606	164,372,946,438	73.89
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	2,706,287,446	0	2,706,287,446	0.00

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
 Tanggal : 29/05/10
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2009	2008	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	3,315,400,000,000	3,179,215,302,821	136,184,697,179	4.28
JUMLAH ASET LAINNYA	4,023,295,568,389	3,612,419,747,112	410,875,821,276	11.37
JUMLAH ASET	103,708,465,479,003	127,911,078,098,937	(24,202,612,619,933)	(18.92)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	47,132,934,883	85,383,199,848	(38,250,264,965)	(44.79)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294,292,169,306	248,976,889,176	45,315,280,130	18.20
Pendapatan Sewa diterima dimuka	1,803,878,207	0	1,803,878,207	0.00
Uang Muka dari KPPN	4,021,141,586	6,910,417,866	(2,889,276,280)	(41.81)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	12,001,293,336	2,551,056,124	9,450,237,212	370.44
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	359,251,417,318	343,821,563,014	15,429,854,304	4.48
JUMLAH KEWAJIBAN	359,251,417,318	343,821,563,014	15,429,854,304	4.48
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	63,822,802,296,104	93,415,303,559,270	(29,592,501,263,165)	(31.67)
Cadangan Persediaan	185,957,052,688	136,695,886,025	49,261,166,663	36.03
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-342,162,149,341	-334,360,089,024	(7,802,060,317)	2.33
Dana Lancar BLU	684,555,535,893	221,279,325,236	463,276,210,657	209.36
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	64,351,152,735,345	93,438,918,681,507	(29,087,765,946,162)	(31.13)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1,195,731,694,655	828,379,875,579	367,351,819,076	44.34
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	33,779,034,063,296	29,687,538,231,724	4,091,495,831,572	13.78
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	4,023,295,568,389	3,612,419,747,112	410,875,821,276	11.37
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	38,998,061,326,340	34,128,337,854,415	4,869,723,471,924	14.26
JUMLAH EKUITAS DANA	103,349,214,061,685	127,567,256,535,923	(24,218,042,474,237)	(18.98)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	103,708,465,479,003	127,911,078,098,937	(24,202,612,619,933)	(18.92)

Jakarta, Mei 2010

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
9. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan .
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
13. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1994 yang mengatur tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama KBH Minyak dan Gas Bumi.
14. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak

Bumi.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina sendiri.
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata cara pembayaran kembali PPN dan PPnBM atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan oleh BU atau BUT dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor.
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee* dan *Over/under lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
30. Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan

Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara.
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja .
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KM.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu.
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-07/PB/2005 Tentang Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 38 /PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan.
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 40 /PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 44 /PB/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-48/PB/2006 Tentang SP3.
48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2006 Tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung.

49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-69/PB/2006 Tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
50. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-77/PB/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
51. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Peraturan.
52. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-02/PB/2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
53. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
54. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB.05/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.
55. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-62/PB/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.
56. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan BAS.
57. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pengenaan PBB sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
58. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-14/PB/2005 Tentang Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

**Rencana
Strategis**

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

A.2.1. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

A.2.2. Misi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

1. Misi Bidang Fiskal

Misi di bidang Fiskal adalah mengembangkan kebijaksanaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggung jawab dan transparan.

2. Misi Bidang Ekonomi

Misi di bidang Ekonomi adalah mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicitakan konstitusi.

3. Misi Bidang Sosial Budaya

Misi di bidang Sosial Budaya adalah mengembangkan masyarakat finasial yang berbudaya dan modern.

4. Misi Bidang Politik

Misi di Bidang Politik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.

5. Misi Bidang Kelembagaan

Misi di Bidang Kelembagaan adalah senantiasa memperbarui diri (*Self Reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembentahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensional dan mempunyai integritas yang tinggi.

A.2.3. Tujuan Kementerian Keuangan

Guna mengaktualisasikan visi dan misi tersebut, maka Kementerian Keuangan menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara,
2. Tujuan 2 : Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara,
3. Tujuan 3 : Optimalisasi pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit,
4. Tujuan 4 : Pemantapan sistem penganggaran, kekayaan negara dan akuntabilitas keuangan negara,
5. Tujuan 5 : Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang,
6. Tujuan 6 : Penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat dan jaring pengaman sektor keuangan.

A.2.4. Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 memuat sasaran-sasaran program ekonomi nasional yang hendak dicapai pada tahun 2009, yang antara lain meliputi :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6 %,
2. Pengurangan angka pengangguran menjadi 7-8 %,
3. Pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 12-14%,
4. Peningkatan daya saing dan,
5. Peningkatan investasi.

A.2.5. Strategi dan Kebijakan

1. Pendapatan Negara

Fokus Strategi di bidang pendapatan negara diarahkan pada pencapaian 4 (empat) target, yaitu optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, terwujudnya keadilan dan perlindungan masyarakat, serta citra baik Kementerian Keuangan terkait dengan pelayanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan.

Pada prinsipnya fokus strategi di bidang pendapatan negara diarahkan pada peningkatan pendapatan negara. Strategi peningkatan pendapatan dilaksanakan

melalui 3 (tiga) kebijakan. Pertama, peningkatan target pendapatan perpajakan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada. Kedua, optimalisasi penerimaan dari bea dan cukai dengan melakukan pengkajian kelompok industri dalam rangka optimalisasi dan harmonisasi sistem pentarifan. Ketiga, peningkatan penerimaan negara bukan pajak sesuai perkembangan perekonomian dengan melakukan perbaikan regulasi.

2. Belanja Negara

Fokus strategi belanja negara diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dilakukan dalam rangka mencapai 5 (lima) target, yaitu: (a) efisiensi pengadaan barang dan jasa, (b) alokasi belanja yang tepat sasaran, (c) alokasi belanja yang berkeadilan sosial, (d) peningkatan kualitas pelayanan, dan (e) citra baik Kementerian Keuangan dalam mengelola belanja negara. Pencapaian kelima target tersebut dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien;
2. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil; dan
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

3. Pembiayaan Anggaran

Fokus strategi bidang pembiayaan anggaran diarahkan pada pencapaian target 5 (lima) indikator menguatnya kemampuan pembiayaan pemerintah, yaitu : (a) penurunan stok utang, (b) penggunaan utang secara selektif, (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang, (d) terwujudnya rasa aman bagi masyarakat, dan (e) citra yang baik bagi Kementerian Keuangan. Capaian tertinggi yang diharapkan dari arah fokus strategi pembiayaan adalah mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Kondisi tersebut diyakini akan menaikkan citra Pemerintah (d.h.i. Kementerian Keuangan) di mata publik. Pembentukan citra dilakukan melalui:

1. Kebijakan pembiayaan anggaran;
2. Perencanaan pembiayaan anggaran; dan
3. Pengelolaan utang pemerintah.

4. Kekayaan Negara

Kekayaan negara merupakan potensi kekuatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, fokus strategi di bidang kekayaan negara diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, dalam melakukan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, penguasaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan kekayaan negara seyoginya dilakukan oleh otoritas tertentu yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Hal ini sangat penting artinya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.

A.2.6. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional 2004–2009, Kementerian Keuangan menetapkan 15 (lima belas) program.

REALISASI DIPA PER PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2009

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
102	Program Pembiayaan lain-lain	73.588.730.000	1.115.670.490.387	1516,09
109	Program penerapan kepemerintahan yang baik	11.136.840.874.000	9.103.626.578.153	81,74
110	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.	53.837.447.000	42.372.600.241	78,70
113	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur.	194.798.351.000	147.829.755.459	75,89
117	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.	970.339.809.000	651.058.267.449	67,10
120	Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara.	1.991.264.891.000	1.059.357.661.057	53,20
121	Program peningkatan efektivitas pengeluaran negara.	667.360.060.000	298.706.436.954	44,76
122	Program pembinaan akuntansi keuangan negara.	25.595.498.000	19.211.021.082	75,06
123	Program pengembangan kelembagaan keuangan.	72.852.887.000	59.756.410.532	82,02
124	Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan.	87.809.308.000	67.062.929.847	76,37
125	Program pengelolaan dan pembiayaan hutang.	40.465.238.000	35.771.386.159	88,40
126	Program pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran.	5.720.500.000	5.127.609.750	89,64
128	Program pengembangan komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga	187.420.051.000	106.663.597.660	56,91
601	Program pendidikan tinggi.	71.412.498.000	50.157.130.761	70,24
Jumlah		15.579.306.142.000	12.762.371.875.491	81,92

Realisasi Belanja Program Pembiayaan Lain-lain sebesar 1516,09 persen dari pagu terjadi karena didalamnya termasuk realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang tidak dianggarkan dalam DIPA.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan TA 2009 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp15.579.306.142.000,00 meliputi:

- Satuan kerja pusat/KP termasuk 1 satker BLU PIP sebesar Rp10.563.584.424.227,00.
- Satuan kerja daerah/KD termasuk 1 satker BLU STAN sebesar Rp5.015.721.717.773,00.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana	
		APBN	BLU
2008	2	20.816.292.304	15.810.089.104
2009	2	15.579.306.142.000	109.090.905.000

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.057 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 13 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA, sehingga tidak menyampaikan laporan keuangan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
		KP		KD		DK		TP			
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
01	Sekretariat Jenderal	7	-	21	-	-	-	-	-	28	
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
04	Ditjen Pajak	2	-	555	13	-	-	-	-	570	
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	134	-	-	-	-	-	139	
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	-	211
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	-	88
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BPPK	1	-	14	-	-	-	-	-	-	15
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	25	-	1019	13	-	-	-	-	-	1057

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 Kementerian Keuangan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.06 (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain) sebesar Rp179.434.183.641.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan di neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.057 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 13 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA/Barang Milik Negara, sehingga tidak menyampaikan laporan barang. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
		KP		KD		DK		TP			
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
01	Sekretariat Jenderal	7	-	21	-	-	-	-	-	28	
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
04	Ditjen Pajak	2	-	555	13	-	-	-	-	570	
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	134	-	-	-	-	-	139	
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	211	
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	88	
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	BPPK	1	-	14	-	-	-	-	-	15	
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah	25	-	1019	13	-	-	-	-	1057	

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Keuangan adalah :

**Pendapat
an**

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, adapun di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

**Aset
Lancar**

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh melalui pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan

undangan.

- . Dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk surat berharga pada BUMN terjadi dalam rangka penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

**Aset
Tetap**

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset

tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Aset lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan pada TA 2009 adalah sebesar **Rp621.266.614.377.076,00** atau **95,19** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp652.638.525.778.845,00**. Dibandingkan dengan TA 2008, realisasi pendapatan TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp296.505.035.647.122,00** atau **32,31** persen. Penurunan ini terutama pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp258.591.913.422.601,00** karena pelaporan Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas yang semula dilaporkan dalam BA 015 mulai TA 2009 dilaporkan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2008 setelah dikeluarkan komponen PNBP dimaksud, maka realisasi pendapatan TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp37.913.122.224.521,00** atau **5,75** persen.

Penurunan ini berasal dari Penerimaan Perpjakan sebesar **Rp38.310.623.694.832,00**, sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar **Rp397.501.470.311,00**.

Penurunan penerimaan perpjakan paling besar terjadi pada PPN sebesar **Rp17.056.859.431.281,00** dan Pungutan Ekspor/Bea Keluar sebesar **Rp13.000.570.025.208,00**.

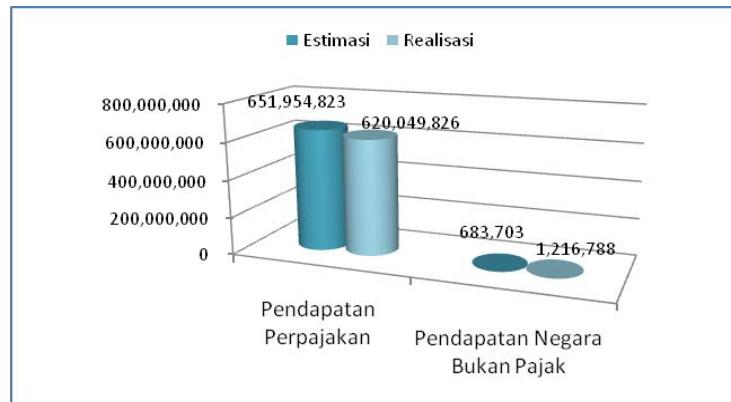
Realisasi pendapatan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 1 berikut.

*Realisasi
pendapatan TA
2009*

Tabel 3
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Perpjakan	651,954,823,000,000	620,049,826,409,435	95.11%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	631,931,723,000,000	601,363,783,868,916	95.16%
Pajak Perdagangan Internasional	20,023,100,000,000	18,686,042,540,519	93.32%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	683,702,778,845	1,216,787,967,641	177.97%
Total	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	95.19%

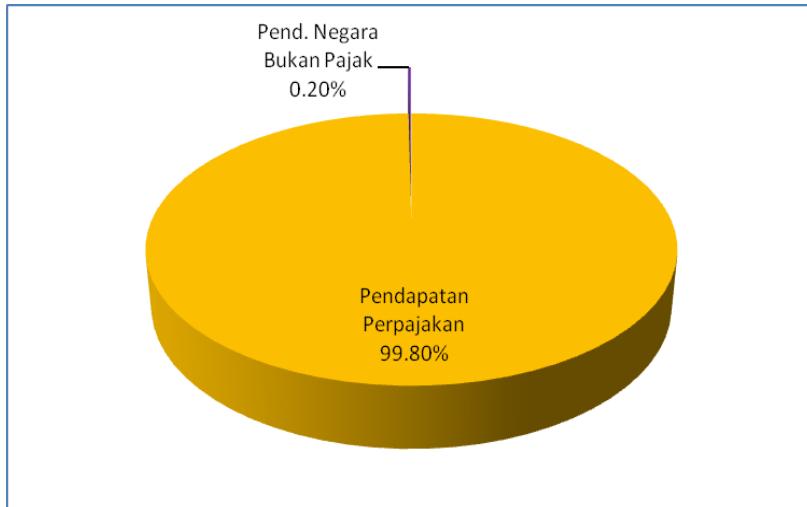
Grafik 1
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan TA 2009
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi pendapatan TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

Komposisi Realisasi Pendapatan

**Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2009**



Perbandingan antara realisasi pendapatan TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Perpajakan	620,049,826,409,435	658,360,450,104,267	(38,310,623,694,832)	-5.82%
Pend. Pajak Dalam Negeri	601,363,783,868,916	622,219,647,387,303	(20,855,863,518,387)	-3.35%
Pjk Perdagangan Internasional	18,686,042,540,519	36,140,802,716,964	(17,454,760,176,445)	-48.30%
Pend. Negara Bukan Pajak	1,216,787,967,641	259,411,199,919,931	(258,194,411,952,290)	-99.53%
Total	621,266,614,377,076	917,771,650,024,198	(296,505,035,647,122)	-32.31%

B.1.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER ESELON I

Realisasi pendapatan per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2009
(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	ESTIMASI	REALISASI	%
1	SETJEN	361,698,531,519	546,601,377,460	151.12%
2	ITJEN	25,000,000	76,263,755	305.06%
3	DJA	0	335,053,415	0.00%
4	DJP	577,391,733,361,176	544,670,900,447,789	94.33%
5	DJBC	74,699,041,069,948	75,621,630,840,652	101.24%
6	DJKPK	0	89,197,009	0.00%
7	DJPU	0	12,639,446	0.00%
8	DJPB	25,509,060,920	225,917,086,239	885.63%
9	DJKN	99,917,739,114	119,427,207,380	119.53%
10	BAPEPAM DAN LK	40,001,500,000	63,527,078,783	158.81%
11	BPPK	20,599,516,168	17,883,052,567	86.81%
12	BKF	0	214,132,581	0.00%
	JUMLAH	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	95.19%

B.1.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN

Penerimaan/Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Realisasi Pendapatan TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Perpajakan	651,954,823,000,000	620,049,826,409,435	95.11%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	683,702,778,845	1,216,787,967,641	177.97%
Total	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	95.19%

B.1.2.1. Penerimaan Perpajakan

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Rp620.049.826.409.
435,00*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2009 adalah sebesar **Rp620.049.826.409.435,00** atau **95,11** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp651.954.823.000.000,00**. Apabila dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2008 berarti lebih rendah sebesar **Rp38.310.623.694.832,00** atau **5,82** persen. Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

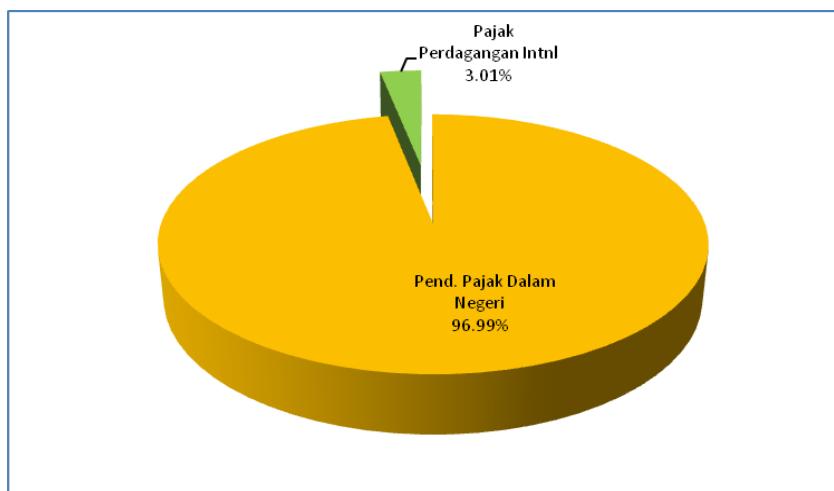
Perbandingan antara realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2009 dan 2008 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Per Jenis Penerimaan
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Perpajakan	620,049,826,409,435	658,360,450,104,267	(38,310,623,694,832)	-5.82%
Pend. Pajak Dalam Negeri	601,363,783,868,916	622,219,647,387,303	(20,855,863,518,387)	-3.35%
PPH	317,677,289,262,240	327,072,030,881,319	(9,394,741,619,079)	-2.87%
PPN	193,195,985,360,318	210,252,844,791,599	(17,056,859,431,281)	-8.11%
PBB	24,203,532,156,584	25,184,321,344,203	(980,789,187,619)	-3.89%
BPHTB	6,469,129,852,655	5,464,842,964,798	1,004,286,887,857	18.38%
Cukai	56,701,793,192,153	51,212,399,482,354	5,489,393,709,799	10.72%
Pend. Pajak Lainnya	3,116,054,044,966	3,033,207,923,030	82,846,121,936	2.73%
Pajak Perdagangan Intnl	18,686,042,540,519	36,140,802,716,964	(17,454,760,176,445)	-48.30%
Bea Masuk	18,132,942,811,995	22,587,132,963,232	(4,454,190,151,237)	-19.72%
Pungutan Ekspor	553,099,728,524	13,553,669,753,732	(13,000,570,025,208)	-95.92%

Komposisi realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2009 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Grafik 3 berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Pendapatan Perpajakan per Jenis Penerimaan
TA 2009



Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2009 mencapai **95,11** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Realisasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 adalah sebesar **Rp18.686.042.540.519,00** atau turun **48,30** persen dari realisasi TA 2008 sebesar **Rp36.140.802.716.964,00**. Hal ini disebabkan adanya komitmen perdagangan internasional di mana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan, yang membuat pemerintah mengeluarkan berbagai fasilitas perdagangan dalam rangka mendorong daya saing. Selain itu, Ambang Batas Harga Patokan Ekspor (HPE) masih terlalu tinggi dibandingkan harga pasar. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada poin B.1.2.1.2.

Sedangkan realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2009 adalah sebesar **Rp601.363.783.868.916,00** yang berarti mengalami penurunan sebesar **Rp20.855.863.518.387,00** atau turun **3,35** persen dibanding realisasi TA 2008 yang besarnya **Rp622.219.647.387.303,00**.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, Pemerintah melaksanakan penyempurnaan administrasi perpajakan. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan kecenderungan terjadinya tumpang-tindih peraturan; (ii) tendensi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah perubahan UU perpajakan, yaitu UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan, dan keadilan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi.

Direktorat Jenderal Pajak dalam TA 2009 melaksanakan reformasi perpajakan tahap ke dua yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). PINTAR merupakan *Project Assistance* pada Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan 48 bulan (1 Januari 2009 – 1 Januari 2013). Estimasi Total Pendanaan PINTAR adalah sebesar USD 150 juta, terdiri dari Pendanaan Luar Negeri dan Dalam Negeri.

Sebagaimana GFMRAP (*Government Financial Management and Revenue Administration Project*) Tahap I yang dititikberatkan pada *Public Financial Management*, dengan kegiatan utama dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PINTAR merupakan GFMRAP Tahap II yang difokuskan pada administrasi perpajakan dan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

B.1.2.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp601.363.783.868.916,00

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 adalah sebesar **Rp601.363.783.868.916,00** atau **95,16** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp631.931.723.000.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp20.855.863.518.387,00** atau **3,35** persen dari realisasi TA 2008.

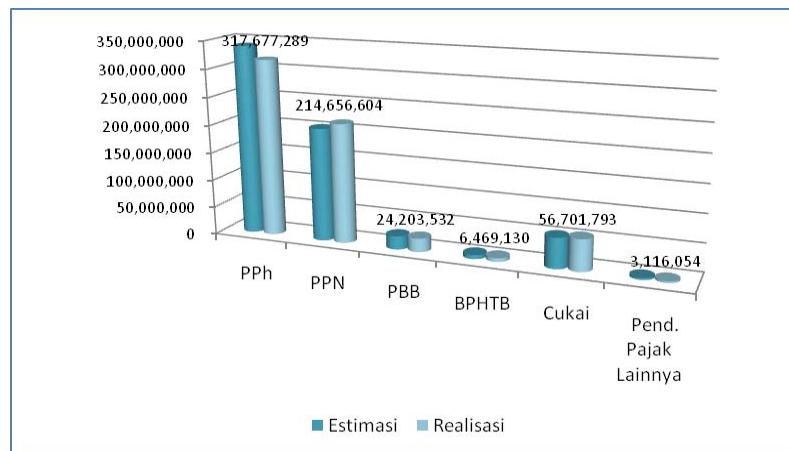
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	631,931,723,000,000	601,363,783,868,916	95.16%
PPh	340,209,256,000,000	317,677,289,262,240	93.38%
PPN	203,083,959,000,000	193,195,985,360,318	95.13%
PBB	23,863,569,000,000	24,203,532,156,584	101.42%
BPHTB	6,979,950,000,000	6,469,129,852,655	92.68%
Cukai	54,545,039,000,000	56,701,793,192,153	103.95%
Pend. Pajak Lainnya	3,249,950,000,000	3,116,054,044,966	95.88%

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri dapat dilihat pada Grafik 4 berikut.

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009
(dalam jutaan rupiah)



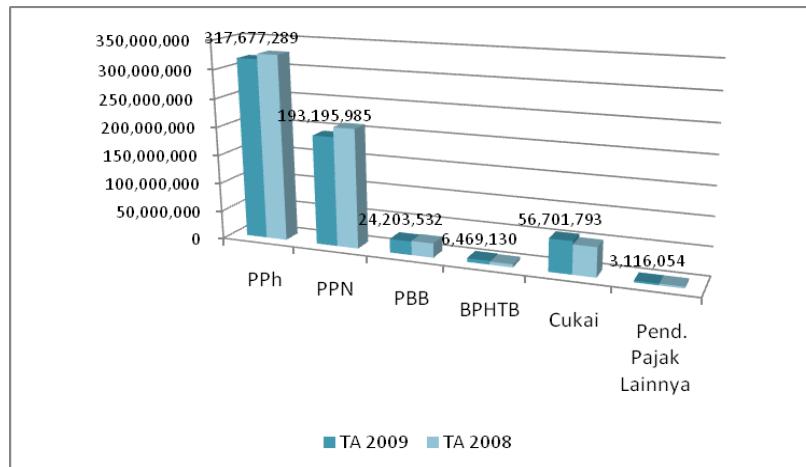
Perbandingan antara realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pend. Pajak Dalam Negeri	601,363,783,868,916	622,219,647,387,303	(20,855,863,518,387)	-3.35%
PPh	317,677,289,262,240	327,072,030,881,319	(9,394,741,619,079)	-2.87%
PPN	193,195,985,360,318	210,252,844,791,599	(17,056,859,431,281)	-8.11%
PBB	24,203,532,156,584	25,184,321,344,203	(980,789,187,619)	-3.89%
BPHTB	6,469,129,852,655	5,464,842,964,798	1,004,286,887,857	18.38%
Cukai	56,701,793,192,153	51,212,399,482,354	5,489,393,709,799	10.72%
Pend. Pajak Lainnya	3,116,054,044,966	3,033,207,923,030	82,846,121,936	2.73%

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Grafik 5 berikut.

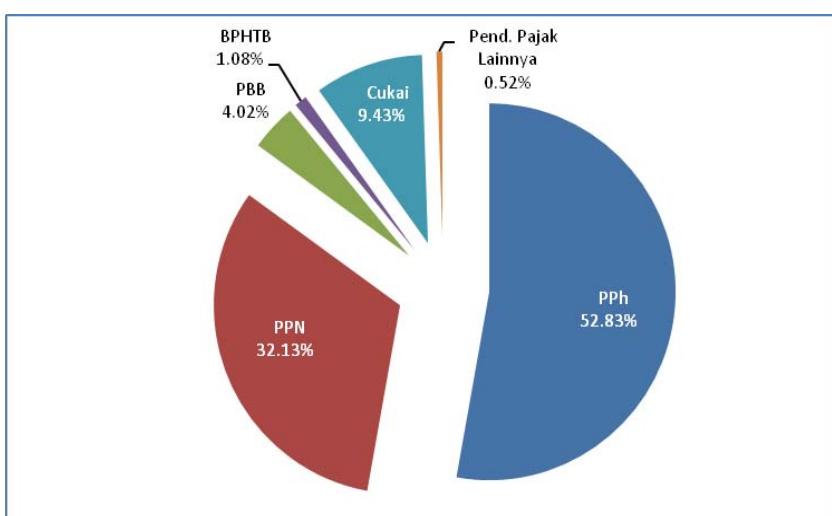
Grafik 5
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2009

Komposisi realisasi penerimaan pajak Dalam negeri



Pendapatan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini masih merupakan sumber penerimaan negara yang penting. Dalam tiga tahun terakhir ini, penerimaan cukai mengalami peningkatan. Perkembangan penerimaan cukai juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah produksi barang kena cukai serta tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) produk Hasil Tembakau. Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja penerimaan cukai adalah upaya peningkatan efektivitas pemungutan cukai.

Dalam upaya meningkatkan target penerimaan dari sektor cukai ditemukan kendala diantaranya dalam bentuk penyimpangan seperti pita cukai palsu, atau pita yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk mengeliminasi penyimpangan tersebut, disamping dilakukan perubahan peraturan, juga dilakukan penegakan hukum terhadap pemakai jasa yang melanggar aturan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pita cukai *illegal*.

Dengan mengasumsikan tidak adanya kebijakan yang diambil pada tahun 2009, maka penerimaan cukai sangat bergantung pada produksi Barang Kena Cukai (BKC). Oleh karena itu untuk mencapai target cukai yang ditetapkan perlu dilakukan langkah – langkah administratif di bidang cukai. Adapun langkah administratif yang ditempuh di bidang cukai adalah : (i) *operasi Pasar* atas peredaran Hasil Tembakau ilegal seperti Hasil Tembakau tidak dilekat pita cukai (polos), dilekat pita cukai palsu, atau dilekat pita cukai yang bukan peruntukannya; (ii) *operasi Intelijen* yaitu operasi secara tertutup untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai; (iii) *penyempurnaan desain dan feature pita cukai*; (iv) *audit cukai*, yaitu dengan melakukan audit reguler atau audit investigasi; dan (v) *sosialisasi* atas ketentuan peraturan di bidang cukai.

B.1.2.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Pajak perdagangan Internasional Rp18.686.042.540.519,00

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 adalah sebesar **Rp18.686.042.540.519,00** atau **93,36** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp20.023.100.000.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp17.454.760.176.445,00** atau **48,30** persen dari realisasi TA 2008. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Pajak Perdagangan Internasional	20,023,100,000,000	18,686,042,540,519	93.32%
Pendapatan Bea Masuk	18,623,500,000,000	18,132,942,811,995	97.37%
Pungutan Ekspor/ Bea Keluar	1,399,600,000,000	553,099,728,524	39.52%

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bea Masuk	18,132,942,811,995	22,587,132,963,232	(4,454,190,151,237)	-19.72%
Pungutan Ekspor	553,099,728,524	13,553,669,753,732	(13,000,570,025,208)	-95.92%
Total	18,686,042,540,519	36,140,802,716,964	(17,454,760,176,445)	-48.30%

Realisasi penerimaan Bea Masuk selama TA 2009 tercatat sebesar **Rp18.132.942.811.995,00** atau **97,37** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp18.623.500.000.000,00**. Hal ini berarti Penerimaan Bea Masuk TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp4.454.190.151.237,00** atau **19,72** persen dari realisasi TA 2008.

Penerimaan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain : **Nilai Devisa Bayar, Tarif Efektif Rata-rata dan Nilai Tukar Rupiah atau Kurs**. Ketiga variabel tersebut berbanding lurus terhadap peningkatan nilai penerimaan Bea Masuk. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan meningkatkan Devisa Bayar yang akan berdampak positif bagi peningkatan penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan dampak penurunan terhadap penerimaan, yaitu antara lain: adanya komitmen perdagangan internasional, dimana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan. Kesepakatan seperti : *ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, IJEPKA dengan Jepang, berdampak pada penurunan tarif, serta berbagai fasilitas perdagangan dan industri yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing.

Variabel lain yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk adalah Nilai tukar Rupiah/kurs terhadap US\$, yang menjadi salah satu variabel Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPB). Faktor nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk, dimana nilai tukar rupiah yang tinggi cenderung meningkatkan Bea Masuk, namun disisi lain dapat mempengaruhi tingkat importasi, yang berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. Terjadinya penurunan Tarif Efektif rata-rata dan nilai tukar Rupiah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk.

Realisasi penerimaan Pungutan Ekspor/Bea Keluar selama TA 2009 tercatat sebesar **Rp553.099.728.524,00** atau **39,52** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar **Rp1.399.600.000.000,00**. Hal ini berarti Penerimaan Pungutan Ekspor/ Bea Keluar TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp13.000.570.025.208,00** atau **95,92** persen dari realisasi TA 2008.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka mulai tahun 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pemungutan Bea Keluar. Dasar pengenaan Bea Keluar adalah amanat dalam perubahan undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. Bea Keluar akan menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai pengganti Pungutan Ekspor yang selama ini merupakan penerimaan Direktorat Jenderal Anggaran.

Tujuan pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 antara lain adalah: untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindung kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Tahun 2009 realisasi penerimaan bea keluar tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal ini sepenuhnya disebabkan karena kebijakan bea keluar masih belum optimal dalam menghasilkan penerimaan. Ambang batas Harga Patokan Ekspor (HPE) yang dijadikan sebagai pedoman pengenaan bea keluar masih terlalu tinggi yaitu USD 700/Ton, sementara sepanjang tahun 2009 pergerakan harga CPO di pasaran

internasional belum dapat menjangkau HPE tersebut. Harga referensi di Rotterdam yang dijadikan patokan dalam penetapan HPE sepanjang tahun 2009 berkisar antara USD 600/Ton sampai USD 650/Ton, atau masih dibawah ambang batas yang dikenakan bea keluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, penatausahaan penerimaan bea keluar yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, dialihkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai TA 2009.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, pengelolaan penerimaan Pungutan Ekspor/bea keluar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

B.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi PNBP
Rp1.216.787.967.641,00
1,00*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2009 adalah sebesar Rp1.216.787.967.641,00 atau 177,97 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 sebesar Rp683.702.778.845,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2008, PNBP TA 2009 mengalami penurunan sebesar Rp258.194.411.952.290,00 atau 99,53 persen dari realisasi TA 2008. Penurunan realisasi PNBP ini terjadi pada Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp212.558.355.630.060,00 atau 100,00 persen, penurunan Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp29.088.370.115.749,00 atau 100,00 persen, dan penurunan Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp17.064.824.243.656,00 atau 96,28 persen. Hal ini terjadi karena mulai TA 2009, pelaporan Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas dilakukan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

PNBP berasal dari (i) PNBP Lainnya; dan (ii) Pendapatan Badan Layanan Umum. Besarnya realisasi PNBP TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel 12 berikut.

Tabel 12
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan PNBP Lainnya	306,026,297,326	658,651,112,684	215.23%
Pendapatan BLU	377,676,481,519	558,136,854,957	147.78%
Total	683,702,778,845	1,216,787,967,641	177.97%

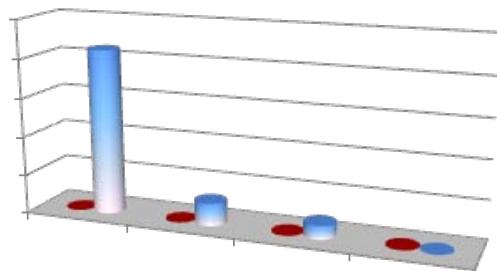
Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Grafik 7 berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan SDA	0	212,558,355,630,060	(212,558,355,630,060)	-100.00%
Bagian Laba BUMN	0	29,088,370,115,749	(29,088,370,115,749)	-100.00%
PNBP Lainnya	658,651,112,684	17,723,475,356,340	(17,064,824,243,656)	-96.28%
Pendapatan BLU	558,136,854,957	40,998,817,782	517,138,037,175	1261.35%
Total	1,216,787,967,641	259,411,199,919,931	(258,194,411,952,290)	-99.53%

Pada TA 2008 terdapat realisasi Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas sebesar **Rp16.945.187.676.792,00** yang termasuk dalam kelompok PNBP Lainnya, mulai TA 2009 pendapatan tersebut dilaporkan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 adalah sebagai berikut:

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009



B.1.2.2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Realisasi PNBP
lainnya
Rp658.651.112.684,
00*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya TA 2009 adalah sebesar **Rp658.651.112.684,00** atau **215,23** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2009 yaitu sebesar **Rp306.026.297.326,00** Apabila dibandingkan dengan TA 2008, PNBP Lainnya TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp17.064.824.243.656,00** atau **96,28** persen dari realisasi TA 2008. Besarnya realisasi PNBP Lainnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Penjualan dan Sewa	6,596,181,509	24,212,360,736	367.07%
Pendapatan Jasa	257,301,795,552	558,605,290,439	217.10%
Pendapatan Bunga	92,858	140,418,393	151218.41%
Pendapatan Pendidikan	0	146,880,000	0.00%
P. Gratifikasi & Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	195,180,100	0.00%
Pendapatan Iuran dan Denda	40,004,392,300	64,893,829,133	162.22%
Pendapatan Lain-lain	2,123,835,107	10,457,153,883	492.37%
Total	306,026,297,326	658,651,112,684	215.23%

Perbandingan antara realisasi PNBP Lainnya TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pend. Penjualan dan Sewa	24,212,360,736	16,972,842,205,400	(16,948,629,844,664)	-99.86%
Pendapatan Jasa	558,605,290,439	328,289,106,112	230,316,184,327	70.16%
Pendapatan Bunga	140,418,393	309,195,155,616	(309,054,737,223)	-99.95%
Pendapatan Pendidikan	146,880,000	9,959,935,000	(9,813,055,000)	-98.53%
Gratifikasi & Uang Sitaan Hsl Korups	195,180,100	155,000,000	40,180,100	25.92%
Pend. Iuran dan Denda	64,893,829,133	86,260,653,579	(21,366,824,446)	-24.77%
Pendapatan Lain-lain	10,457,153,883	16,773,300,633	(6,316,146,750)	-37.66%
Total	658,651,112,684	17,723,475,356,340	(17,064,824,243,656)	-96.28%

B.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Realisasi
Pendapatan BLU
Rp558.136.854.957,
00*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 adalah sebesar **Rp558.136.854.957,00** atau **147,78** persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009 yaitu sebesar **Rp377.676.481.519,00**. Rincian Realisasi pendapatan BLU yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16
Realisasi Pendapatan BLU TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	135,752,082,256	173,932,393,282	128.13%
Pend. Hibah Badan Layanan Umum	0	300,000	0.00%
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	4,000,000,000	5,114,850,125	127.87%
Pendapatan BLU Lainnya	237,924,399,263	379,089,311,550	159.33%
Total	377,676,481,519	558,136,854,957	147.78%

Perbandingan antara realisasi Pendapatan BLU TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pend. Jasa Layanan Umum	173,932,393,282	39,290,052,705	134,642,340,577	342.69%
Pend. Hibah BLU	300,000	53,250,000	(52,950,000)	-99.44%
Pend. Hasil Kerja Sama BLU	5,114,850,125	1,652,710,000	3,462,140,125	209.48%
Pend. BLU Lainnya	379,089,311,550	2,805,077	379,086,506,473	13514299.48%
Total	558,136,854,957	40,998,817,782	517,138,037,175	1261.35%

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2009 telah termasuk 2 (dua) unit satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Rincian Realisasi pendapatan BLU berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18
Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 Berdasarkan Satuan Kerja
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	357,226,481,519	541,117,701,343	151.48%
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	20,450,000,000	17,019,153,614	83.22%
Total	377,676,481,519	558,136,854,957	147.78%

B.1.3. Penerimaan Hibah

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Rp0,00*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

B.2. BELANJA

*Realisasi belanja
Rp12.762.371.875.491,00*

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan pada TA 2009 adalah sebesar Rp12.762.371.875.491,00 atau 81,92 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.579.306.142.000,00. Realisasi belanja TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp711.273.600.017,00 atau 5,90 persen dari realisasi belanja TA 2008 sebesar Rp12.051.098.275.474,00.

Realisasi Belanja TA 2009 menurut sumber dana dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2009
(dalam rupiah)

	Uraian	Pagu	Realisasi	%
	Rupiah Murni	15,023,634,441,000	12,616,119,198,369	83.98%
	Pinjaman Luar Negeri	456,102,151,000	103,767,988,877	22.75%
	Hibah	99,569,550,000	42,484,688,245	42.67%
	Total	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	81.92%

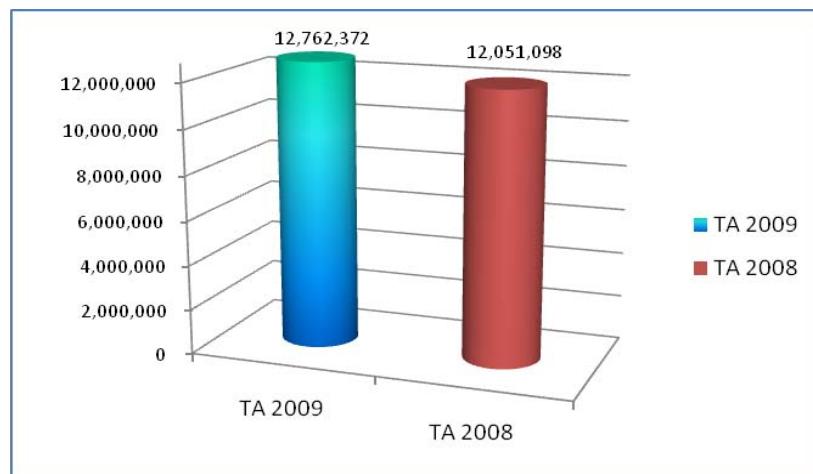
Perbandingan antara realisasi belanja TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 20 dan Grafik 9 berikut.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

*Perbandingan
Realisasi Belanja TA
2009 dan 2008*

	Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
	Rupiah Murni	12,616,119,198,369	11,819,190,843,252	796,928,355,117	6.74%
	Pinjaman Luar Negeri	103,767,988,877	203,148,034,335	(99,380,045,458)	-48.92%
	Hibah	42,484,688,245	28,759,397,887	13,725,290,358	47.72%
	Total	12,762,371,875,491	12,051,098,275,474	711,273,600,017	5.90%

Grafik 9
Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan
TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Belanja Kementerian Keuangan meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran bunga utang.

Belanja Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I, fungsi, jenis belanja dan jenis Satuan kerja.

B.2.1.1. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2009 sebesar [Rp12.762.371.875.491,00](#). Jumlah tersebut dapat dirinci menurut unit eselon I sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Sekretariat Jenderal sebesar [Rp5.010.763.084.292,00](#) atau [39,26](#) persen dari total belanja. Berdasarkan daya serap realisasi TA 2009, terbesar pada Direktorat Jenderal Pajak sebesar [Rp4.048.300.039.984,00](#) atau [94,03](#) persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21
Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I TA 2009
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	6,025,998,738,000	5,010,763,084,292	83.15%
2	ITJEN	88,432,266,000	70,977,773,361	80.26%
3	DJA	86,378,856,000	76,712,038,942	88.81%
4	DJP	4,305,217,063,000	4,048,300,039,984	94.03%
5	DJBC	2,175,694,820,000	1,460,089,057,762	67.11%
4	DJPK	253,664,852,000	81,623,642,367	32.18%
5	DJPU	83,770,898,000	71,651,999,798	85.53%
8	DJPB	1,307,390,904,000	983,665,328,153	75.24%
9	DJKN	587,937,260,000	415,395,933,431	70.65%
10	BAPEPAM DAN LK	156,257,361,000	134,078,607,773	85.81%
11	BPPK	372,820,012,000	304,160,218,733	81.58%
12	BKF	135,743,112,000	104,954,150,895	77.32%
	TOTAL	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	81.92%

B.2.1.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi

Belanja Kementerian Keuangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut Fungsi pada TA 2009 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 22 berikut.

Tabel 22
Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan Umum	15,507,893,644,000	12,712,214,744,730	81.97%
Pendidikan	71,412,498,000	50,157,130,761	70.24%
Total	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	81.92%

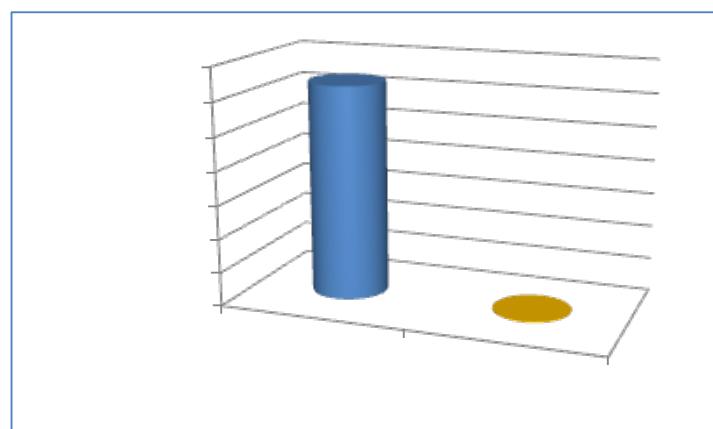
Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pelayanan Umum	12,712,214,744,730	12,039,438,274,209	672,776,470,521	5.59%
Pendidikan	50,157,130,761	11,660,001,265	38,497,129,496	330.16%
Total	12,762,371,875,491	12,051,098,275,474	711,273,600,017	5.90%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2009 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum (01) yaitu sebesar **Rp12.712.214.744.730,00** atau **99,61** persen dari total belanja. Sementara itu, komposisi realisasi belanja Kementerian Keuangan menurut fungsi dapat dilihat pada Grafik 10 berikut.

Grafik 10
Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2009
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

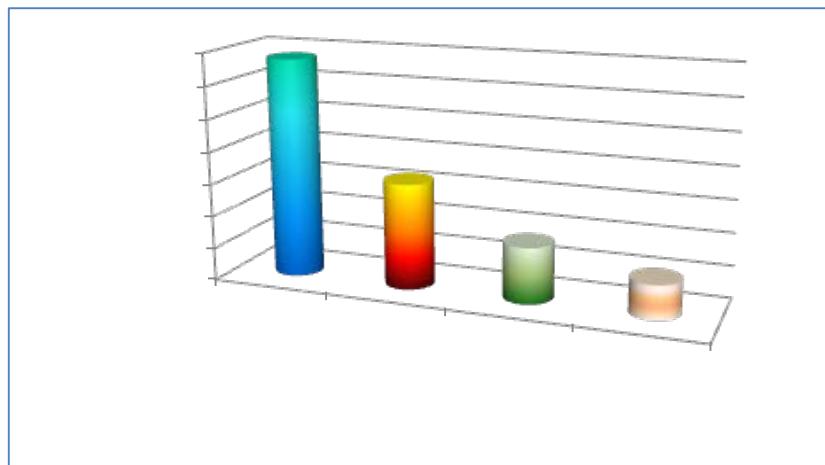
Belanja Kementerian Keuangan menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2009
(dalam rupiah)

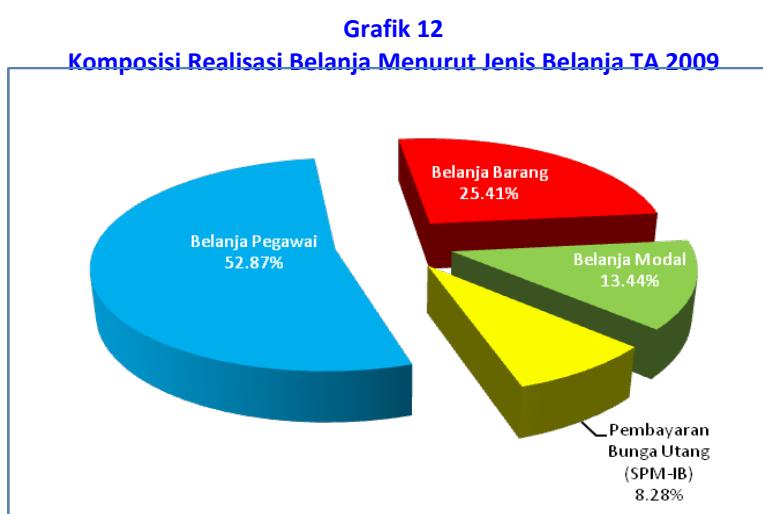
Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	86.05%
Belanja Barang	4,739,768,892,000	3,242,814,084,419	68.42%
Belanja Modal	2,998,162,473,000	1,714,879,058,253	57.20%
Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1,056,827,836,304	0.00%
Total	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	81.92%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2009 sebagaimana tampak pada Tabel 28 dan dapat digambarkan pada Grafik 11 berikut.

Grafik 11
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2009
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2009 juga dapat digambarkan dalam Grafik 12 berikut.



B.2.1.3.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja Pegawai
Rp6.747.850.896.515,00*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 adalah sebesar **Rp6.747.850.896.515,00** yang berarti **86,05** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009 sebesar **Rp7.841.374.777.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2008, realisasi Belanja Pegawai TA 2009 mengalami kenaikan sebesar **Rp605.442.107.626,00** atau **9,86** persen dari TA 2008.

Rincian Belanja Pegawai TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25
Realisasi Belanja Pegawai TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,255,818,395,000	2,185,944,598,488	96.90%
Belanja Honorarium	7,401,915,000	6,803,117,200	91.91%
Belanja Lembur	137,655,860,000	76,742,628,315	55.75%
B. Tunj. Khusus & B. Peg. Transito	5,440,498,607,000	4,478,360,552,512	82.32%
Belanja Pegawai BLU	0	0	0.00%
Total	7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	86.05%

Realisasi belanja pegawai BLU nihil karena gaji masih dibayar oleh satuan kerja asal pegawai BLU.

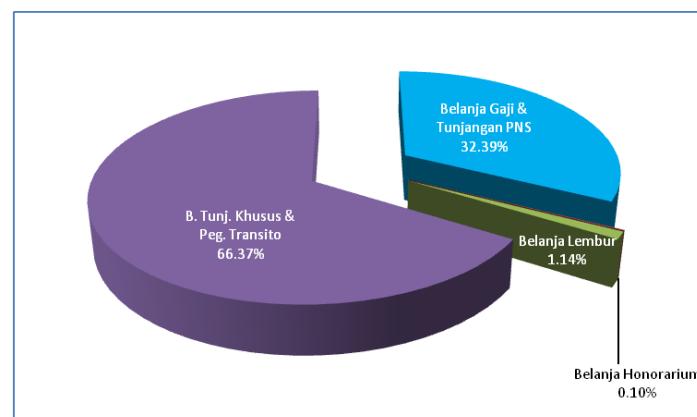
Perbandingan antara realisasi belanja pegawai TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2,185,944,598,488	1,954,966,767,373	230,977,831,115	11.81%
Belanja Honorarium	6,803,117,200	134,544,129,587	(127,741,012,387)	-94.94%
Belanja Lembur	76,742,628,315	57,853,313,075	18,889,315,240	32.65%
Belanja Vakasi	0	9,520,000	(9,520,000)	-100.00%
B. Tunj. Khusus & Peg. Transito	4,478,360,552,512	3,995,035,058,854	483,325,493,658	12.10%
Belanja Pegawai BLU	0	0	0	0.00%
Total	6,747,850,896,515	6,142,408,788,889	605,442,107,626	9.86%

Komposisi Belanja Pegawai TA 2009 dapat digambarkan dalam Grafik 13 berikut.

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2009



Berikut adalah realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I:

Tabel 27
Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2009
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	5,267,028,940,000	4,545,540,801,091	86.30%
2	ITJEN	22,500,000,000	19,629,771,479	87.24%
3	DJA	37,860,220,000	33,547,472,631	88.61%
4	DJP	1,338,853,128,000	1,115,143,378,425	83.29%
5	DJBC	459,821,818,000	381,905,513,527	83.06%
4	DJKP	15,402,828,000	14,074,221,343	91.37%
5	DJPU	16,332,305,000	11,715,445,077	71.73%
8	DJPB	455,302,571,000	409,351,211,297	89.91%
9	DJKN	135,920,775,000	131,087,679,480	96.44%
10	BAPEPAM DAN LK	32,021,446,000	31,843,160,374	99.44%
11	BPPK	38,144,258,000	36,913,733,558	96.77%
12	BKF	22,186,488,000	17,098,508,233	77.07%
TOTAL		7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	86.05%

B.2.1.3.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2009 adalah sebesar **Rp3.242.814.084.419,00** yang berarti **68,42** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009 sebesar **Rp4.739.768.892.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2008, realisasi Belanja Barang TA 2009 mengalami kenaikan sebesar **Rp676.309.938.144,00** atau **26,35** persen dari TA 2008. Rincian Belanja Barang TA 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Realisasi Belanja Barang TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1,658,134,656,000	1,212,192,439,487	73.11%
Belanja Barang Non Operasional	796,322,828,000	543,746,902,965	68.28%
Belanja Jasa	781,131,608,000	419,311,113,337	53.68%
Belanja Pemeliharaan	666,168,495,000	487,050,764,672	73.11%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	762,749,058,000	545,706,829,907	71.54%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	42,265,220,000	21,941,707,661	51.91%
Belanja Barang BLU	32,997,027,000	12,864,326,390	38.99%
Total	4,739,768,892,000	3,242,814,084,419	68.42%

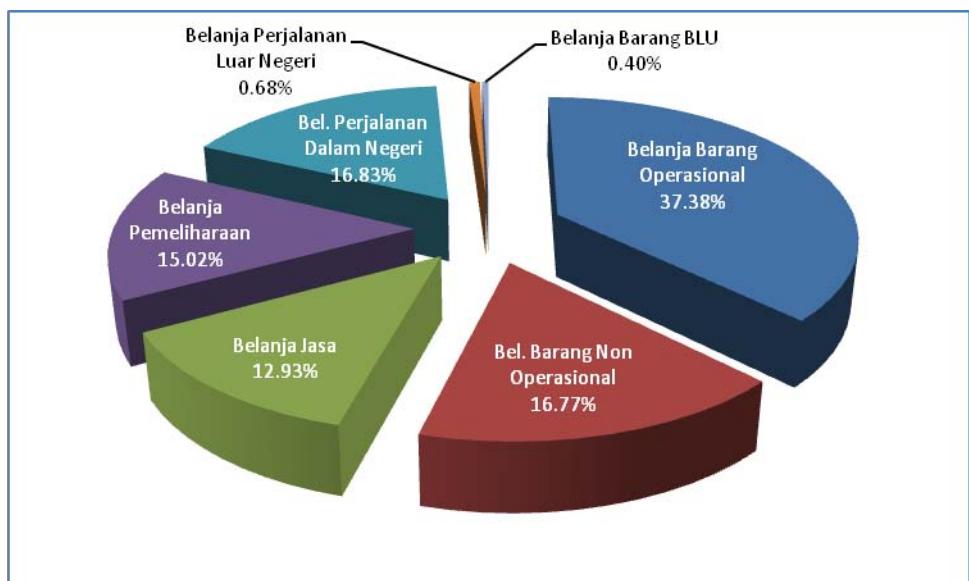
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	1,212,192,439,487	929,579,588,276	282,612,851,211	30.40%
Bel. Barang Non Operasional	543,746,902,965	433,648,098,866	110,098,804,099	25.39%
Belanja Jasa	419,311,113,337	318,212,332,380	101,098,780,957	31.77%
Belanja Pemeliharaan	487,050,764,672	398,823,904,133	88,226,860,539	22.12%
Bel. Perjalanan Dalam Negeri	545,706,829,907	466,940,011,936	78,766,817,971	16.87%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	21,941,707,661	15,805,879,816	6,135,827,845	38.82%
Belanja Barang BLU	12,864,326,390	3,494,330,868	9,369,995,522	268.15%
Total	3,242,814,084,419	2,566,504,146,275	676,309,938,144	26.35%

Komposisi Belanja Barang TA 2009 dapat digambarkan dalam Grafik 14.

Grafik 14
Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2009



Berikut adalah realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I:

Tabel 30
Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2009
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	420,748,856,000	294,535,593,147	70.00%
2	ITJEN	60,983,840,000	46,953,329,803	76.99%
3	DJA	38,163,231,000	33,709,619,804	88.33%
4	DJP	1,905,810,437,000	1,227,887,774,568	64.43%
5	DJBC	872,965,704,000	649,862,628,586	74.44%
4	DJPK	88,783,630,000	60,287,999,046	67.90%
5	DJPU	58,803,893,000	52,125,190,091	88.64%
8	DJPB	599,555,542,000	397,590,578,666	66.31%
9	DJKN	330,286,430,000	211,543,838,098	64.05%
10	BAPEPAM DAN LK	72,181,133,000	52,494,653,164	72.73%
11	BPPK	193,416,257,000	142,257,266,902	73.55%
12	BKF	98,069,939,000	73,565,612,544	75.01%
TOTAL		4,739,768,892,000	3,242,814,084,419	68.42%

B.2.1.3.1. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal
Rp1.714.879.058.253,00*

Realisasi Belanja Modal TA 2009 adalah sebesar **Rp1.714.879.058.253,00** yang berarti **57,20** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009 sebesar **Rp2.998.162.473.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2008, realisasi Belanja Modal TA 2009 mengalami penurunan sebesar **Rp718.172.189.113,00** atau **29,52** persen dari TA 2008. Rincian Belanja Modal TA 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Realisasi Belanja Modal TA 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	166,830,792,000	97,651,669,230	58.53%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1,292,133,068,000	626,735,687,548	48.50%
Bel. Modal Gedung & Bangunan	1,181,566,970,000	864,184,783,809	73.14%
B. Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	101,830,835,000	23,128,847,565	22.71%
Belanja Modal Fisik Lainnya	239,793,903,000	96,253,891,422	40.14%
Belanja Modal BLU	16,006,905,000	6,924,178,679	43.26%
Total	2,998,162,473,000	1,714,879,058,253	57.20%

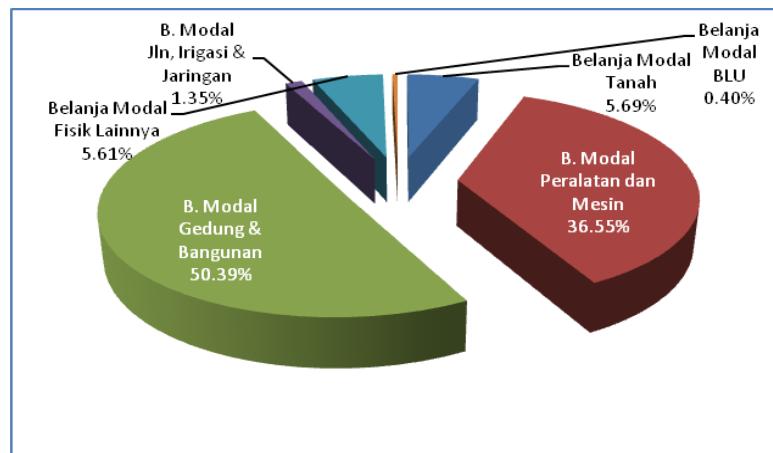
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	97,651,669,230	32,323,690,164	65,327,979,066	202.11%
B. Modal Peralatan dan Mesin	626,735,687,548	1,223,262,014,307	(596,526,326,759)	-48.77%
B. Modal Gedung & Bangunan	864,184,783,809	998,961,126,277	(134,776,342,468)	-13.49%
B. Modal Jln, Irigasi & Jaringan	23,128,847,565	29,644,697,525	(6,515,849,960)	-21.98%
B. Pemeliharaan Dikapitalisasi	0	62,078,270,368	(62,078,270,368)	-100.00%
Belanja Modal Fisik Lainnya	96,253,891,422	84,230,594,005	12,023,297,417	14.27%
Belanja Modal BLU	6,924,178,679	2,550,854,720	4,373,323,959	171.45%
Total	1,714,879,058,253	2,433,051,247,366	(718,172,189,113)	-29.52%

Komposisi Belanja Modal TA 2009 dapat digambarkan dalam Grafik 15.

Grafik 15
Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2009



Berikut adalah realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I:

Tabel 33
Realisasi Belanja Modal Per Eselon I TA 2009
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	338,220,942,000	170,686,690,054	50.47%
2	ITJEN	4,948,426,000	4,394,672,079	88.81%
3	DJA	10,355,405,000	9,454,946,507	91.30%
4	DJP	1,060,553,498,000	648,461,556,590	61.14%
5	DJBC	842,907,298,000	428,300,409,746	50.81%
4	DJPK	149,478,394,000	7,261,421,978	4.86%
5	DJPU	8,634,700,000	7,811,364,630	90.46%
8	DJPB	252,532,791,000	176,723,538,190	69.98%
9	DJKN	121,730,055,000	72,764,415,853	59.78%
10	BAPEPAM DAN LK	52,054,782,000	49,740,794,235	95.55%
11	BPPK	141,259,497,000	124,989,218,273	88.48%
12	BKF	15,486,685,000	14,290,030,118	92.27%
TOTAL		2,998,162,473,000	1,714,879,058,253	57.20%

Rendahnya realisasi Belanja Modal disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Terdapat proyek yang batal dilaksanakan pada Setjen sebesar Rp89.904.317.073,00 dan belum adanya pemenang lelang pada proyek rehabilitasi gedung GKN Jayapura sebesar Rp20.682.052.081,00
2. Belanja untuk Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Ditjen Perimbangan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena software aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri belum siap
3. Pengadaan tanah tidak terserap secara optimal pada Ditjen Perbendaharaan karena tingginya harga tanah yang ditawarkan oleh penjual, dimana nilainya dua kali lipat dari NJOP setempat.
4. Rekanan masih belum menyelesaikan pesanan pengadaan kapal untuk alat operasional DJBC.
5. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana belanja modal BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan PNBP tidak tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak direalisasikan
6. Efisiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara *e-procurement*.
7. Adanya kendala dalam melakukan optimalisasi penggunaan belanja modal yaitu kendala waktu revisi dan/atau kebijakan optimalisasi anggaran, kendala pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta kendala pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

B.2.1.3.4. Pembayaran Kewajiban Utang

Realisasi pembayaran kewajiban utang Rp1.056.827.836.304,00

Realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2009 adalah sebesar **Rp1.056.827.836.304,00** yang merupakan imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pajak. Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2009 mengalami kenaikan sebesar **Rp147.693.743.360,00** atau **16,25** persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk TA 2008. Komposisi realisasi Pembayaran Kewajiban Utang tersebut disajikan pada Tabel 34 berikut.

Tabel 34
Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang
TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/(Penurunan)	%
B. Pembayaran Imb. Bunga Pajak	1,056,807,330,401	906,289,163,569	150,518,166,832	16.61%
Pembyrn Imb. Bunga Bea & Cukai	20,505,903	2,844,929,375	(2,824,423,472)	-99.28%
Total	1,056,827,836,304	909,134,092,944	147,693,743,360	16.25%

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

- a) Untuk Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat PNBP pada Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP lainnya, mulai TA 2009 dilaporkan melalui Bagian Anggaran 999.99 untuk satker BUN, diluar Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
- b) Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku pengguna anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak (bruto) yang disajikan Rp596.893.315.234.834,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 14 April 2010 telah menyelenggarakan Rekonsiliasi Pendapatan Perpajakan dengan hasil sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi Data MPN

STATUS	SAU		SAI	
	TR	RUPIAH	TR	RUPIAH
Match	30.312.123	452.286.393.257.061	30.312.123	452.291.258.251.432
Partial Match	2.111.694	23.486.078.288.081	2.111.804	23.478.938.872.767
Unmatch	1.352	128.563.936.853	11.646	252.349.029.531
TOTAL	32.425.169	475.901.035.481.995	32.435.573	476.022.545.908.705

b. Rekonsiliasi Data Pemotongan SPM (*ePayPoint*)

STATUS	SAU		SAI	
	TR	RUPIAH	TR	RUPIAH
Match	1.768.734	14.573.301.952.437	1.768.734	14.573.301.952.437
Partial Match	219	3.076.862.436	219	3.076.862.436
Unmatch	153	309.417.030	84	141.799.354
TOTAL	1.769.106	14.576.688.231.903	1.769.037	14.576.520.614.227

c. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Melalui BUN

URAIAN	TR	SAU	SAI
Pajak Ditanggung Pemerintah	18	29.627.036.364.593	29.627.036.364.593
PPH Migas	28	50.043.674.210.538	50.043.674.210.535
Pemotongan SPM Melalui BUN	301	2.232.506.018.163	2.232.506.018.163
Setoran Pajak-Pajak Lainnya Melalui BUN	50	237.175.598.195	237.175.598.195
PPH Non Migas Dalam Valas	1.160	24.163.614.687.295	24.163.614.688.776
JUMLAH	1.557	106.304.006.878.784	106.304.006.880.262

Hasil rekonsiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan koreksi dan reklasifikasi beberapa akun pendapatan perpajakan serta melakukan klarifikasi data kepada pihak terkait. Koreksi, klarifikasi dan reklasifikasi akun pendapatan tersebut meliputi:

- data transaksi pendapatan yang *partial match* yang disebabkan perbedaan MAP tetapi masih dalam MAP pajak, dilakukan koreksi yaitu dengan melakukan reklasifikasi MAP sesuai data yang ada di SAU;

- data transaksi pendapatan yang *partial match* yang disebabkan perbedaan MAP, dari MAP pajak menjadi MAP bukan pajak, dikoreksi negatif dan dikeluarkan dari laporan keuangan, sebaliknya dari MAP bukan pajak menjadi MAP pajak dikoreksi positif, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan;
 - data transaksi MPN *belum kirim* oleh bank/pos dengan status *unmatch* sejumlah 1.748 trasaksi dengan nilai **Rp11.653.932.303,00** dikoreksi negatif dan dikeluarkan dari laporan keuangan;
 - data *unmatch* baik SAU maupun SAI (MPN dan ePayPoint) dilakukan klarifikasi ke KPPN dan atau Bank/Pos terkait oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c) Dalam penerimaan pajak bruto sebesar **Rp596.893.315.234.834,00** sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan 31 Desember 2009 terdapat realisasi transaksi penerimaan pajak yang pajaknya ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebesar **Rp29.627.036.364.594,00**. Realisasi DTP sebesar **Rp29.627.036.364.594,00** terdiri dari:
- 1) Pajak Penghasilan sebesar **Rp2.836.295.455.367,00** terdiri atas:
 - PPh Panas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan *energy*/Listrik Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp800.000.000.000,00**;
 - PPh Atas Bunga atau Diskonto Obligasi Pemerintah berdasarkan *Bond Indenture* penerbitan *Global Bonds* Pemerintah Indonesia sebesar **Rp1.500.000.000.000,00**;
 - PPh PT Telkom berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telkom (Persero) Tbk. Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp250.000.000.000,00**;
 - PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebesar **Rp207.268.255.368,00**;
 - PPh atas Program Technical Forest Conservating Act (TFCA) sesuai Surat Menteri Keuangan kepada Duta Besar Amerika Serikat Nomor S-715/PMK.03/2008 sebesar **Rp79.027.200.000,00**
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai
 - PPN atas penyerahan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 sebesar **Rp24.460.618.475.473,00**
 - PPN atas penyerahan Minyak Goreng berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp800.000.000.000,00**
 - PPN atas penyerahan BBN (Bahan Bakar Nabati) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.011/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp28.252.806.270,00**

- PPN dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp1.006.729.864.377,00**
- 3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB sebesar **Rp495.139.763.106,00** merupakan BPHTB Pertamina yang ditanggung Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009

Dari jumlah DTP sebesar **Rp29.627.036.364.594,00** sebagaimana tersebut di atas, belum termasuk selisih DTP sebesar **Rp1.897.654.377.380,00** yang merupakan realisasi DTP yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan DIPA anggaran DTP yang dianggarkan di 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis DTP	Realisasi SP2D	Realisasi DTP dari Wajib Pajak	Selisih
PPN Minyak Goreng	Rp800.000.000.000,00	Rp2.594.191.735.182,00	Rp1.794.191.735.182,00
PPh Pasal 21	Rp207.268.255.368,00	Rp310.730.897.566,00	Rp103.462.642.198,00
Jumlah	Rp1.007.268.255.368,00	Rp2.904.922.632.748,00	Rp1.897.654.377.380,00

Jumlah transaksi DTP sebesar **Rp1.897.654.377.380,00** tersebut melalui surat DJP nomor: S-90/PJ.08/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan No. S-79/PJ.08/2010 tanggal 12 Maret 2010 ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diusulkan untuk dimasukan dalam APBN-P tahun 2010.

- d) Penerimaan pajak bruto sebesar **Rp596.893.315.234.834,00** berdasarkan hasil rekonsiliasi terakhir tanggal 14 April 2010, belum dilakukan revisi kurang terhadap Laporan Realisasi Penerimaan Perpjakan terkait PPN Ditanggung Pemerintah sebesar **Rp21.460.618.475.473,00** sebagai hasil tindak lanjut pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan BPK-RI, terdiri dari 3 transaksi sebagai berikut:
- Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi Subsidi BBM Pertamina tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 senilai Rp19.297.526.375.473,00 dengan nomor SP2D 025999Z tanggal 31 Desember 2009;
 - Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi *Marketing Fee* PT Pertamina kepada Pemerintah tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp610.292.100.000,00 dengan nomor SP2D 026000Z tanggal 31 Desember 2009; dan
 - Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi Subsidi BBM Pertamina bulan September, Oktober, dan November Tahun 2009 sebesar Rp1.552.800.000.000,00 dengan nomor SP2D 025928Z tanggal 31 Desember 2009.
- e) *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. Pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2008 memperoleh hasil sebagai berikut:
- Jumlah penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sebanyak 3.545.076.

- Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang disampaikan sebanyak 556.194 SPT.

- Jumlah penerimaan PPh sebesar Rp5,56 triliun

Sedangkan hasil yang diperoleh selama perpanjangan *Sunset Policy* yang mulai berlaku 1 Januari 2009 s.d 28 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

- Jumlah penambahan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) baru sebanyak 2.090.052 NPWP atau sekitar 60% jika dibandingkan dengan penambahan NPWP baru selama tahun 2008 yaitu sebanyak 3.545.076 NPWP baru. Dengan demikian jumlah keseluruhan NPWP baru yang diterbitkan selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah 5.635.128 NPWP;

- Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang disampaikan sebanyak 248.620 SPT atau 44,7% jika dibandingkan jumlah SPT dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama tahun 2008 sebanyak 556.194 SPT. Dengan demikian jumlah SPT dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebanyak 804.814 SPT; dan

- Jumlah penerimaan PPh sebesar sebesar Rp1,9 triliun atau 34,2% jika dibandingkan jumlah penerimaan PPh dalam rangka *Sunset Policy* selama tahun 2008 sebesar Rp5,56 triliun. Dengan demikian jumlah penerimaan PPh dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 s.d 28 Februari 2009 adalah Rp7,46 triliun.

- f) Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, untuk mengatasinya Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.

PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu dan memiliki penghasilan diatas PTKP dan tidak lebih dari 5 juta per bulan. Kategori usaha tertentu yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 DTP adalah:

- Usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
- Usaha perikanan; dan
- Usaha industri pengolahan.

PPh Pasal 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan sebesar PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja. Pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pemberian PPh Pasal 21 DTP pekerjanya beserta daftar pekerja yang diberi fasilitas PPh Pasal 21 DTP kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemberi kerja terdaftar sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 21. Selain itu, pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 DTP kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Masa Pajak November 2009 yang dilaporkan paling lambat tanggal 20 Desember 2009. Realisasi DTP PPh Pasal 21 pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar **Rp207,268,255,368,00**.

- g) Stimulus fiskal juga diberikan dalam bentuk fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) yang jumlahnya mencapai Rp2.500.000.000.000,00. Pemberian fasilitas BM-DTP bertujuan untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, mendorong sektor riil dan meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Insentif subsidi Bea Masuk tersebut diberikan untuk 11 (sebelas) sektor yaitu pesawat terbang, komponen kendaraan bermotor, komponen elektronika, kapal, kemasan infus, PLTU, PLTU kapasitas kecil, sorbitol, industri telematika, industri pembuatan methyltin mercaptide, dan ballpoint. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, BM-DTP tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya realisasi pencairan yang hanya mencapai **Rp7.187.562.916,00** atau 0,3 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Rendahnya penyerapan BM-DTP disebabkan karena industri tidak siap memanfaatkan fasilitas BM-DTP tersebut.
- h) Berdasarkan data realisasi penerimaan BM-DTP dari KPPBC sebesar **Rp134.287.627.774,26** dibandingkan dengan realisasi SPM/SP2D yang diproses oleh Kementerian/Lembaga terkait sebesar **Rp7.187.562.916,00** sehingga terdapat selisih yang belum diproses sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar **Rp127.100.064.858,26**. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut:

Data Realisasi Penerimaan DJBC	Data Belanja Pembina Sektor	Selisih
5,292,490,518.00	Ditjen Perhubungan Udara	0.00
80,027,376,416.00	Ditjen ILMTA	0.00
43,122,192,241.26	Ditjen IATT	0.00
5,277,917,599.00	BPOM	6,758,959,916.00 (1,481,042,317.00)
567,651,000.00	Ditjen IAK	428,603,000.00 139,048,000.00
134,287,627,774.26		7,187,562,916.00 127,100,064,858.26

i) Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan Pada DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencatat penerimaan berdasarkan bukti setor SSPCP/SSBP secara berjenjang (*bottom-up*) dari tingkat UAKPA ke UAPPA-W dan ke UAPPA-Es1, dan telah dilakukan rekonsiliasi secara berjenjang sesuai tingkat unit akuntansinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:171/PMK.05/2007.

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan Perpjakan tingkat Eselon I antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pengguna Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara telah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2010 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-150/SM II/PB.64/2010 tanggal 22 Februari 2010 (Berita Acara Rekonsiliasi terlampir).

Masih terdapat selisih penerimaan perpjakan antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan LK Eselon I (SAI) sebesar Rp. 308.206.470.811,03, dimungkinkan terjadi karena :

1. Terdapat penyetoran pungutan perpjakan oleh importir, namun karena ada sesuatu hal, dokumen pemberitahuan tidak disampaikan ke Satker Bea dan Cukai, sehingga penerimaan tersebut telah masuk ke kas negara tetapi DJBC belum mengakui sebagai penerimaan.

2. Importir kelebihan melakukan penyetoran pungutan perpajakan, karena terjadi perbedaan perhitungan dalam pemberitahuan dokumen impornya, sehingga yang bersangkutan melakukan penyetoran kembali sesuai dengan dokumen pemberitahuan yang benar. Bea dan Cukai mencatat penerimaan hanya atas penyetoran dengan nilai pungutan yang sebenarnya. Sehingga seolah olah importir melakukan penyetoran dua kali atas dokumen pemberitahuan yang sama, sedangkan Bea dan Cukai hanya mengakui atas satu penyetoran yang benar.

Adapun hasil rekonsiliasi penerimaan adalah sebagai berikut:

Data awal :

SAU	:	Rp. 75.997.535.130.145,00
SAI	:	Rp. 75.689.328.659.334,00
Selisih	:	Rp. 308.206.470.811,00

a. Metode Rekon 1

Membandingkan 4 (empat) key yaitu tanggal SSPCP+MAP+NTPN+nilai rupiah, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Data yang sesuai (*Match*)

Rekon tanggal, MAP, NTPN dan nilai rupiah		
MAP	Jmlh Record	SAI Rupiah
411511	28.069	43.973.729.877.990
411512	2.443	360.364.500.800
411513	6.489	505.536.453.855
411514	2.400	6.743.159.581
411519	3.384	4.853.425.519
412111	418.636	11.108.993.926.042
412112	-	-
412113	29.338	382.317.952.014
412114	15	7.288.660.085
412116	-	-
412119	1.044	23.469.522.048
412211	1.530	261.544.979.421
412212	6	256.940.728
412213	3	552.430
Jumlah	493.357	56.635.099.950.513

b. Metode Rekon 2

Membandingkan 3 (tiga) key yaitu tanggal SSPCP+MAP+nilai rupiah, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Data yang sesuai (*Partial Match*)

Rekon tanggal, MAP, dan nilai rupiah		
MAP	Jmlh Record	SAI Rupiah
411511	3.285	10.392.168.898.806
411512	120	15.854.654.975
411513	1.018	113.057.658.930
411514	44	8.312.701.653
411519	161	1.448.083.059
412111	89.169	888.212.742.311
412112	-	-

412113	4,403	51.594.354.696
412114	2	62.140.335
412116	-	-
412119	114	634.347.309
412211	544	55.565.330.463
412212	2	13.293.232
412213	1	120.457
Jumlah	98,863	11.526.924.326.226

c. Metode Rekon 3

Membandingkan 3 (tiga) key yaitu MAP + NTPN + nilai rupiah, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Data yang sesuai (*Partial Match*)

Rekon MAP, NTPN dan nilai rupiah		
MAP	Jmlh Record	SAI Rupiah
411511	255	794.020.496.797
411512	43	4.445.980.000
411513	774	263.423.866.995
411514	2	26.868.000
411519	37	66.864.690
412111	226.109	4.703.090.695.529
412112	-	-
412113	5.695	121.347.652.585
412114	97	492.580.043
412116	-	-
412119	345	6.158.495.333
412211	177	12.628.363.150
412212	1	58.118.596
412213	-	-
Jumlah	233.535	5.905.759.981.718

Dari ketiga metode rekon tersebut diperoleh data penerimaan SAI yang *match* dengan data penerimaan LAK/SAU sebesar **Rp74.067.784.258.457,00** atau **97,86** persen dari total penerimaan SAI yaitu **Rp75.689.328.659.334,00**.

Atas terjadinya selisih antara data penerimaan SAI dan SAU, telah kami tindak lanjuti dengan mendistribusikan data penerimaan yang *unmatch* tersebut ke 79 satker sesuai surat nomor: S-104/BC.1/2009 tanggal 10 Maret 2010 untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ke dokumen sumber (SSPCP) penyebab terjadinya data penerimaan yang *unmatch*. Atas hasil penelusuran data penerimaan *unmatch* antara SAU dan SAI diperoleh hasil sebagai berikut:

MAP	SAI		SAU		SELISIH	
	Nilai	Trx	Nilai	Trx	Nilai	Trx
411511	55,360,132,529,183	31,693	55,381,256,770,832	31,708	21,124,241,649	15
411512	384,482,101,047	2,664	385,069,410,227	2,672	587,309,180	8
411513	925,494,944,666	8,473	927,312,214,961	8,500	1,817,270,295	27
411514	15,740,115,629	305	15,991,190,375	311	251,074,746	6
411519	9,266,521,248	1,841	10,317,442,480	2,020	1,050,921,232	179

412111	17,889,252,339,390	942,607	17,924,636,248,338	952,002	35,383,908,948	9,395
412112	3,208,740,492	101	3,656,781,161	137	448,040,669	36
412113	657,446,660,267	47,624	704,977,593,120	48,342	47,530,932,853	718
412114	14,847,888,500	502	28,382,127,091	917	13,534,238,591	415
412116	-	-	7,187,562,916	4	7,187,562,916	4
412119	40,340,178,668	2,968	43,116,576,186	3,276	2,776,397,518	308
412211	491,765,574,293	3,454	542,466,936,161	3,747	50,701,361,868	293
412212	19,905,895,207	31	22,850,264,421	63	2,944,369,214	32
412213	24,937,585	38	314,011,876	208	289,074,291	170
JML	75,811,908,426,175	1,042,301	75,997,535,130,145	1,053,907	185,626,703,970	11,606

Atas selisih SAU dan SAI sebesar **Rp185.626.703.970,00** di dalamnya terdapat transaksi non kas sebesar **Rp7.187.562.916,00** merupakan transaksi penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), sehingga selisih SAU dan SAI menjadi **Rp178,439,141,054,00**.

Atas selisih lebih penerimaan SAU yang tidak ada SAI tersebut yang tidak diketahui satuan kerjanya, diakui sebagai penerimaan Satker Kantor Pusat DJBC, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2010.

PENGEMBALIAN PENDAPATAN

Realisasi Pengembalian Pendapatan SAU sebesar **Rp611.766.488.934,00** sedangkan realisasi Pengembalian Pendapatan SAI sebesar **Rp607.873.100.868,00** sehingga masih terdapat selisih Rp. 3.893.388.066,-. Selisih ini terdiri dari:

- Pengembalian Pendapatan yang ada di SAU tetapi ada di SAI, Pengembalian ini sebesar **Rp3.932.768.026,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	MAP	Satker	Tgl Dok	No Dok	Nilai	Keterangan
1	412111	kppbc kudus	4/3/2009	490077J	56,268,365	blm dicatat di SAI
2	411519	kppbc surakarta	10/1/2009	001904N	4,080,000	blm dicatat di SAI
3	412111	kppbc surakarta	10/1/2009	001905N	10,114,539	blm dicatat di SAI
4	412119	kppbc surakarta	10/1/2009	001905N	810,000	blm dicatat di SAI
5	412211	kppbc pangkalan bun	12/17/2009	749970L	3,484,401	blm dicatat di SAI
6	412211	kppbc pangkalan bun	12/17/2009	749971L	4,223,772	blm dicatat di SAI
7	412211	kppbc pangkalan bun	12/17/2009	749991L	4,223,772	blm dicatat di SAI
8	412211	kppbc pangkalan bun	12/17/2009	749992L	4,375,894	blm dicatat di SAI
9	412111	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920926M	6,385,633	blm dicatat di SAI
10	412111	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920928M	45,813,564	blm dicatat di SAI
11	412111	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920930M	33,866,738	blm dicatat di SAI
12	412113	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920927M	12,771,266	blm dicatat di SAI
13	412113	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920929M	91,627,128	blm dicatat di SAI
14	412113	kppbc tanjung emas	9/1/2009	920931M	33,866,738	blm dicatat di SAI
15	412111	kppbc tanjung perak	2/18/2009	524357K	40,000	blm dicatat di SAI
16	412211	kppbc makasar	7/29/2009	135518M	44,094,967	blm dicatat di SAI
17	412114	kppbc jawa tengah	12/1/2009	932626M	138,896,831	blm dicatat di SAI
18	412114	kppbc jawa tengah	12/1/2009	932627M	373,452,322	blm dicatat di SAI
19	412111	kppbc tanjung priok	11/30/2009	619472N	23,227,000	blm dicatat di SAI
20	412113	kppbc tanjung priok	11/30/2009	619473N	6,477,000	blm dicatat di SAI
21	412111	kppbc purwakarta	5/18/2009	247836L	336,147,202	blm dicatat di SAI
22	412111	kppbc purwakarta	5/22/2009	620836L	631,449,393	blm dicatat di SAI
23	412113	-	4/17/2009	654398L	2,067,071,501	tidak ada di SAI*
		Total			3,932,768,026	

Untuk transaksi nomor 23, berdasarkan konfirmasi dan penelitian, diketahui bahwa DJBC tidak terdapat Pengembalian Pendapatan tsb, dilihat dari kode BA-Eselon merupakan Pengembalian yang dilakukan oleh satker Direktorat Jenderal Pajak, namun terdapat kesalahan MAP. Atas selisih pengembalian penerimaan sebesar **Rp2.067.071.502,00** tersebut dikeluarkan, sehingga pengembalian pendapatan yang ada di SAU tetapi ada di SAI menjadi **Rp1.865.696.525,00**. Atas pengembalian pendapatan yang ada di SAU namun tidak ada di SAI tersebut, telah dimasukkan dalam SAI sebagai koreksi atas pengembalian pendapatan pada Laporan Keuangan Audited 2009.

Pengembalian pendapatan yang ada di SAI tetapi tidak ada di SAU sebesar **Rp39.399.919,00** Hal ini disebabkan adanya pengembalian pendapatan satker DJBC yang belum dicatat di SAU. Atas selisih tersebut telah dikonfirmasikan ke satker yang bersangkutan dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi tersebut tidak ditemukan dokumen sumbernya. Rincian pengembalian pendapatan adalah sebagai berikut:

No.	MAP	Satker	Tgl Dok	No Dok	Nilai	Keterangan
1	423216	KPPBC Pekan Baru	27-May-09	935554L	810,000	tidak dapat diidentifikasi
2	423216	KPPBC Jakarta	29-Oct-09	258626N	50,000	tidak dapat diidentifikasi
3	423221	KPPBC Benoa	6-May-09	751758L	5,681,377	tidak dapat diidentifikasi
4	423216	KPU BC Tanjung Priok	18-Mar-09	168044L	50,000	tidak dapat diidentifikasi
5	423216	KPU BC Tanjung Priok	2-Jun-09	918526L	31,208,542	tidak dapat diidentifikasi
6	423216	KPU BC Tanjung Priok	12-Aug-09	409833L	200,000	tidak dapat diidentifikasi
7	423216	KPU BC Tanjung Priok	11-Aug-09	675308M	1,100,000	tidak dapat diidentifikasi
8	423216	KPU BC Batam	30-Mar-09	714036K	300,000	tidak dapat diidentifikasi
Jumlah					39,399,919	

Atas pengembalian pendapatan yang ada di SAI namun tidak ada di SAU tersebut, telah dikeluarkan dari SAI sebagai koreksi atas pengembalian pendapatan.

- j) Beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 belum dapat dilaksanakan dikarenakan hambatan koordinasi maupun aturan dengan K/L lainnya misalnya :
 - .: adanya ketentuan dari kejaksaan bahwa harga untuk pengadaan tanah mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP);
 - .: pengadaan kapal patroli pada DJBC belum dapat terealisasi dikarenakan PT. PAL belum dapat menyelesaikannya;
 - .: Adanya proses pengadaan barang yang gagal karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan;
 - .: Masih banyaknya dana PHLN yang tidak terserap secara optimal karena prosedur penarikan dana yang rumit dan banyak tergantung kepada pihak *lender*.
- k) Pagu Belanja Modal dari Pinjaman Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar **Rp 146.106.576.000,00** Sampai dengan akhir TA 2009 kegiatan yang dibayai dari Pinjaman Luar Negeri belum dapat dilaksanakan (realisasi 0 persen). Hal ini disebabkan karena :
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai *Implementing Agency* (pengadaan *hardware*) telah melaksanakan proses pengadaan barang yang memakai proses satu tahap dua sampul, sampul I (penentuan spesifikasi teknis) dan sampul II (penentuan spesifikasi harga). Sedangkan proses penerbitan NoL (*No Objective Letter*) sebagai prasyarat cairnya pinjaman dari ADB hingga 31 Desember 2009, baru diterbitkan NoL sebagai penentuan

spesifikasi teknis dan NoL sebagai penentuan spesifikasi harga baru diterbitkan pada TA 2010, sehingga pinjaman ini tidak dapat direalisasikan pada TA 2009.

- Adanya kebijakan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mengeliminasi komponen *Loan DJPK* tentang Pembangunan Sistem Evaluasi Perda PDRD.
- I) Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah (P3KAP) atau *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP) bertujuan untuk memperkuat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan mobilisasi pendapatan negara secara berkesinambungan dengan membangun program yang mendorong terciptanya integritas yang tinggi, meningkatkan keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan diperkuatnya tata kepemerintahan instansi maka diharapkan akan membantu stabilitas ekonomi makro, percepatan perbaikan iklim investasi, serta percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut berakibat pula pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

P3KAP memberikan payung untuk menetapkan kebijakan utama dalam proses penyempurnaan untuk memperkuat efisiensi, tata kelola dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dan administrasi pendapatan negara, memberikan dukungan investasi dan bantuan teknis dalam melaksanakan perubahan tersebut, serta koordinasi antar instansi dan pihak donor.

P3KAP mempunyai komponen-komponen sebagai berikut :

A. Pengelolaan Keuangan Negara (*Public Financial Management*).

Komponen A ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam memperkuat efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah. Komponen ini mencakup empat sub-komponen yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebijakan untuk memperkuat peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sebagai pemimpin dalam agenda penelitian kebijakan yang dapat memberikan nasehat dan saran-saran yang tepat waktu kepada Menteri Keuangan dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah terkait, dengan mempertimbangkan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara agar dapat memenuhi sistem penyusunan anggaran secara transparan dan terpadu yang dapat mengaitkan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, mempunyai klasifikasi sesuai dengan standar internasional, dan disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah berbasis kinerja. Sub-komponen ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS serta oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) (Sub-komponen ini tidak menjadi bagian dari P3KAP lagi sejak bulan July 2009 setelah adanya amandemen dari GFMRAP Loan Agreement, tetapi Sub komponen ini masih menerima dana dari PFM-MDTF).
3. Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah terkait. Sub-komponen ini yang meliputi perancangan, penerapan, dan pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penyusunan anggaran yang terintegrasi (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Reformasi Pengadaan untuk mendukung pembaharuan dalam bidang pelaksanaan pengadaan oleh instansi-instansi pemerintah, termasuk pembuatan percontohan sistem e-procurement dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BAPPENAS (Sub-komponen ini tidak menjadi bagian dari P3KAP lagi

sejak bulan July 2009 setelah adanya amandemen dari GFMRAP Loan Agreement).

B. Peningkatan Pendapatan Negara (*Resource Mobilization*).

Komponen ini bertujuan untuk mendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pendapatan, perdagangan, dan integritas pegawai melalui reformasi organisasi, kepemerintahan, serta sistem teknologi informasi. Komponen ini mencakup dua sub-komponen yaitu :

1. Penyempurnaan Kepabeanan untuk mendukung pelaksanaan penyempurnaan dalam bidang manajemen dan organisasi, kegiatan kepabeanan, fasilitas perdagangan, serta konsolidasi dan integrasi prasarana sistem informasi teknologi (Sub-komponen ini tidak menjadi bagian dari P3KAP lagi sejak bulan July 2009 setelah adanya amandemen dari GFMRAP Loan Agreement);
2. Modernisasi Perpajakan untuk mendukung peningkatan pengawasan dalam bidang perpajakan melalui perubahan undang-undang serta peraturan pemerintah yang diperlukan. Pada Tahap I P3KAP, keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak terbatas pada pengawasan penerusan modernisasi yang sedang dilaksanakan tanpa dukungan, baik dalam bentuk teknis maupun dana dari P3KAP (Sub-komponen ini tidak menjadi bagian dari P3KAP lagi sejak bulan July 2009 setelah adanya amandemen dari GFMRAP Loan Agreement, tetapi Sub komponen ini masih menerima dana dari PFM-MDTF. Sub komponen ini juga merupakan salah satu penerima dari satu pinjaman yang terpisah (merujuk ke PINTAR) yang mendukung pemerintah dalam program reformasi perpajakan).

C. Tata Kepemerintahan dan Akuntabilitas (*Governance and Accountability*).

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat instansi yang mempunyai peran penting sebagai pengawas dan penyeimbang dalam kerangka tata kepemerintahan dan akuntabilitas, yang meliputi 3 sub-komponen yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Badan Legislatif dalam Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan APBN untuk mendukung Sekretariat Jenderal DPR dalam memperkuat kapasitas DPR untuk menganalisa dan mengawasi anggaran;
2. Penyelesaian Sengketa Pajak untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme Pengadilan Pajak;
3. Pengawasan Intern untuk memperkuat akuntabilitas intern dalam Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Sub-komponen ini tidak menjadi bagian dari P3KAP lagi sejak bulan July 2009 setelah adanya amandemen dari GFMRAP Loan Agreement).

D. Tata Kepemerintahan dan Pelaksanaan P3KAP.

Komponen ini bertujuan untuk memperkuat tata kepemerintahan P3KAP, kepemilikan, kesinambungan, dan koordinasi. Komponen ini, yang dilaksanakan oleh *Project Services and Support Unit* (PSSU) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (sampai dengan 31 Desember 2008), akan membiayai barang dan jasa konsultan yang dibutuhkan untuk manajemen perubahan/sosialisasi, komunikasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan P3KAP. Sejak bulan Januari 2009, PSSU berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

E. Tambahan Sub Komponen dalam PFM-MDTF.

Komponen ini hanya mendapat dana dari PFM-MDTF yang dilaksanakan oleh Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Sumber pembiayaan P3KAP adalah dari:

1. IBRD Loan No 4762-IND dan IDA Development Credit No 4026-IND;
2. PHRD Grant TF 053556;
3. PHRD II Grant TF 058019;
4. PFM-MDTF Grant CTF2 090047; dan
5. PFM-MDTF Grant CTF6 091414;

Realisasi P3KAP pada tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IBRD Loan No 4762-IND dan IDA Development Credit No 4026-IND;
Realisasi dari Dana Loan dan Credit ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp35.857.738.469,51 untuk membiayai kategori:

a. Goods	Rp	380.050.000,00
b. Goods for SPAN	Rp	27.355.317.206,00
c. Consultant Services	Rp	6.053.679.632,11
d. Training and Workshop	Rp	2.068.691.631,40
Total	Rp	35.857.738.469,51
2. PHRD Grant TF 053556
Realisasi dari PHRD Grant TF 053556 ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp5.254.771.066,08 untuk membiayai kategori:

a. Consultant Services for DPR	Rp	45.500.000,00
b. Consultant Services	Rp	5.209.271.066,08
Total	Rp	5.254.771.066,08
3. PHRD II Grant TF 058019
Realisasi dari PHRD II Grant TF 058019 ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp8.862.163.471,40 untuk membiayai kategori:

a. Consultant Services	Rp	8.862.163.471,40
Total	Rp	8.862.163.471,40
4. PFM-MDTF Grant CTF2 090047
Realisasi dari PFM-MDTF Grant CTF2 090047 ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp8.339.803.341,00 untuk membiayai kategori:

a. Consultant Services	Rp	6.890.384.231,00
b. Training and Workshop	Rp	1.449.419.110,00
Total	Rp	8.339.803.341,00
5. PFM-MDTF Grant CTF6 091414
Realisasi dari PFM-MDTF Grant CTF6 091414 ini pada tahun 2009 adalah sebesar Rp9.218.495.818,97 untuk membiayai kategori:

a. Consultant Services	Rp	8.652.387.298,97
b. Training and Workshop	Rp	566.108.520,00
Total	Rp	9.218.495.818,97

- m) Terdapat selisih realisasi belanja antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebesar Rp53.648.137.313,00. Selisih ini terjadi karena pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan belum dibukukan transaksi Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari KPPN Jakarta VI. Namun Kementerian Keuangan telah membuat surat pernyataan bahwa SP3 tersebut adalah benar merupakan realisasi belanja pada Kementerian Keuangan (surat pernyataan terlampir).

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp103.708.465.479.003,00; Kewajiban sebesar Rp359.251.417.318,00; dan Ekuitas Dana sebesar Rp103.349.214.061.685,00

Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 dapat disajikan pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35
Komposisi Neraca

Uraian	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/Penurunan
Aset	103.708.465.479.003	127.911.078.098.937	(24.213.622.720.025)
Kewajiban	359.251.417.318	343.821.563.014	15.429.854.304
Ekuitas Dana	103.349.214.061.685	127.567.256.535.923	(24.229.052.574.329)

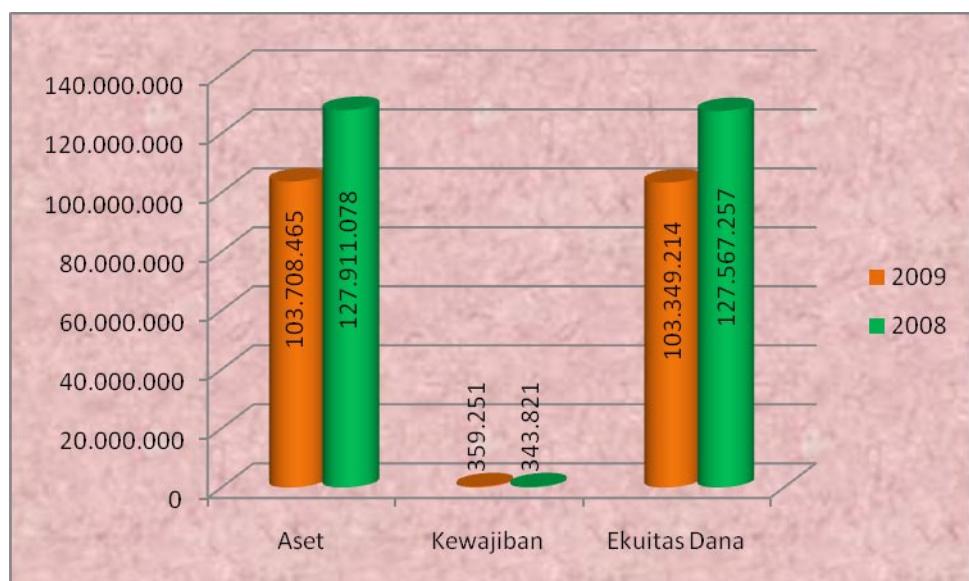
Nilai Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp103.708.465.479.003,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp64.710.404.152.663,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.195.731.694.655,00; Aset Tetap sebesar Rp33.779.034.063.296,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp4.023.295.568.389,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp359.251.417.318,00 merupakan kewajiban jangka pendek seluruhnya.

Nilai ekuitas dana per 31 Desember 2009 sebesar Rp103.349.214.061.685,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp64.351.152.735.345,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp38.998.061.326.340,00.

Komposisi neraca dapat disajikan pada Grafik 16 berikut.

Grafik 16
Komposisi Neraca
(dalam juta rupiah)



C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Aset Lancar

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp4.021.141.586,
00

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp4.021.141.586,00 dan Rp6.910.417.866,00. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara pada tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I

ESELON I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	44.268.354	39.790.339	4.478.015	11,25
ITJEN	117.954	154.048.609	(153.930.655)	(99,92)
DJA	489.543.584	0	489.543.584	0,00
DJP	932.612.895	944.963.095	(12.350.200)	0,13
DJBC	707.708.058	2.220.664.300	(1.512.956.242)	(68,13)
DJPK	443.996.726	1.077.846.209	(633.849.483)	(58,81)
DJPU	0	0	0	0,00
DJPB	205.436.838	482.719.917	(277.283.079)	(57,44)
DJKN	470.614.265	1.981.854.596	(1.511.240.331)	(76,25)
BAPEPAMLK	0	0	0	0,00
BPPK	726.842.912	6.571.762	720.271.150	10.960,09
BKF	0	1.959.039	(1.959.039)	(100,00)
Jumlah	4.021.141.586	6.910.417.866	(2.889.276.280)	(41,61)

Tabel 37
Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I

ESELON I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	0	246.771.871	(246.771.871)	(100,00)
ITJEN	0	0	0	0,00
DJA	0	0	0	0,00
DJP	0	1.822.735	(1.822.735)	(100,00)
DJBC	1.477.033.883	37.717.021	1.439.316.862	1.435,78
DJPK	0	5.515.783	(5.515.783)	(100,00)
DJPU	0	0	0	0,00
DJPB	0	33.956.493	(33.956.493)	(100,00)
DJKN	10.103.881.446	2.220.673.613	7.883.207.833	363,01
BAPEPAMLK	0	2.177.773	(2.177.773)	(100,00)
BPPK	0	1.219.527	(1.219.527)	(100,00)
BKF	0	1.201.308	(1.201.308)	(100,00)
Jumlah	11.580.915.329	2.551.056.124	9.029.859.205	325,75

C.2.1.4 Kas pada BLU

Kas pada BLU
Rp684.555.535.893,00

Nilai Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp684.555.535.893,00 dan Rp221.279.325.236,00.

Rincian Kas Badan Layanan Umum pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39
Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I

Kode	Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/Penurunan
01	Setjen (PIP)	674.729.771.975	218.566.826.496	456.162.945.481
11	BPPK (STAN)	9.825.763.918	2.712.498.742	7.113.265.176
	Jumlah	684.555.535.893	221.279.325.236	463.276.210.657

Penjelasan Kas pada Badan Layanan Umum

- Nilai sebesar Rp674.729.771.975,00 di Setjen merupakan besaran kas di bank milik PIP (baik dalam bentuk giro maupun deposito dengan masa sampai dengan tiga bulan), Kas Di Bendahara Penerimaan selain kewajiban setor Kas Negara dan Kas Di Bendahara Pengeluaran.

Rincian saldo Kas pada BLU Sekretariat Jenderal (PIP) sebagai berikut :

No	Nama Bank	Jumlah Rupiah	
1.	Deposito BTN	Rp	50.000.000.000
2.	Deposito BNI	Rp	180.000.000.000
3.	Deposito BNI	Rp	20.000.000.000
4.	Deposito BNI Cabang Prima Syariah	Rp	20.000.000.000
5.	Deposito Bank Jabar Banten	Rp	65.000.000.000
6.	Deposito BRI	Rp	45.000.000.000
7.	Deposito BRI	Rp	40.000.000.000
8.	Deposito Bank Mandiri	Rp	75.000.000.000
9.	Deposito Bank Syariah Mega Indonesia	Rp	20.000.000.000
10.	Deposito Bank Syariah Bukopin	Rp	19.000.000.000
11.	Deposito Bank Jabar Banten Syariah	Rp	20.000.000.000
12.	Deposito Bank Muamalat	Rp	50.000.000.000
13.	Deposito Bank Muamalat	Rp	25.000.000.000
14.	Deposito Bank Muamalat	Rp	30.000.000.000
15.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp	29.529.382
16.	Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp	14.821.982.971
17.	Kas BLU yang dibukukan pada RIDI	Rp	877.287.621
18.	Kas Di Rekening IGIF	Rp	972.000
19.	Kas di Bank Kustodian	Rp	0
20.	Kas yang berada pada pihak ketiga	Rp	0
	JUMLAH	Rp	674.729.771.975

2. Saldo pada BLU STAN sebesar Rp9.825.763.918,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
1.	Saldo Rekening koran	Rp 9.693.648.266
2.	Kas Tunai	Rp 1.998.848
3.	Persekot Kerja	Rp 130.116.804
	JUMLAH	Rp 9.825.763.918

C.2.1.5 Piutang Pajak

*Piutang Pajak
Rp63.658.772.887.
.180,00* Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp63.658.772.887.180,00 dan Rp55.545.222.477.951,00.

Rincian Piutang Pajak pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40
Piutang Pajak Per Unit Eselon I
(dalam rupiah)

ESELON I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan
DJA	-	53.788.164.621	(53.788.164.621)
DJP	49.999.727.823.996	45.173.077.395.397	4.826.650.428.599
DJBC	13.659.045.063.184	10.318.356.917.933	3.340.688.145.251
JUMLAH	63.658.772.887.180	55.545.222.477.951	8.113.550.409.229

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp63.647.762.787.088,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Piutang Pajak di DJA per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.788.164.621,00 merupakan Piutang Pungutan Ekspor. Mutasi kurang tersebut dikarenakan pada TA 2009 Piutang Pajak di DJA (Pungutan Ekspor) dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Nilai Piutang Pajak di DJP per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp49.999.727.823.996,00 dan Rp45.173.077.395.397,00 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2009. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak dan umur pajak dapat dilihat di Lampiran 13.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak (dalam rupiah) dapat dilihat pada Tabel 41 berikut.

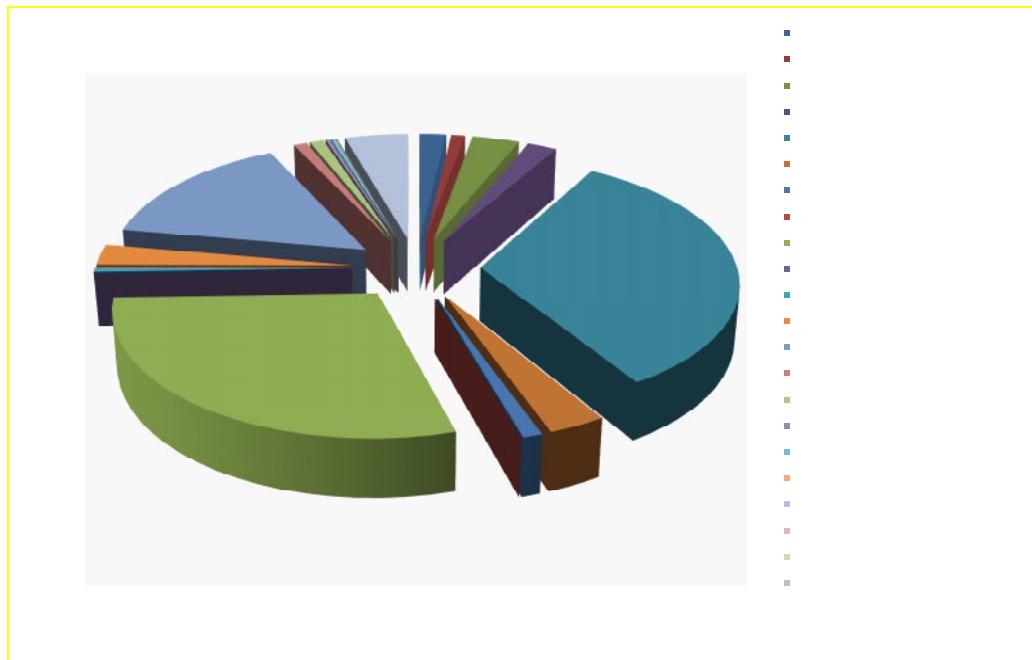
Tabel 41
Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2009

Jenis Piutang	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PIUTANG PPH PASAL 21	951.534.554.486	1.229.968.846.712	(278.434.292.226)	20,54%
PIUTANG PPH PASAL 22	489.840.716.690	104.120.004.440	385.720.712.250	55,80%
PIUTANG PPH PASAL 23	1.688.528.889.756	3.054.716.319.783	(1.366.187.430.027)	27,83%
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1.053.689.834.133	1.006.960.630.021	46.729.204.112	8,26%
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	16.424.024.121.140	16.268.284.571.207	155.739.549.933	83,09%
PIUTANG PPH PASAL 26	1.586.493.805.101	125.143.589.474	1.461.350.215.627	0,00%
PIUTANG PPH FINAL	535.862.689.996	922.916.307.676	(387.053.617.680)	0,00%
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	0	95.145.000	(95.145.000)	(99,99%)
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	14.533.638.585.793	12.560.346.602.995	1.973.291.982.798	13,75%
PIUTANG PPNBM DALAM NEGERI	280.485.129.787	280.039.959.243	445.170.544	182,10%
PIUTANG PBB PEDESAAN	1.327.539.551.495	746.285.302.993	581.254.248.502	22,97%
PIUTANG PBB PERKOTAAN	7.542.885.445.040	4.527.189.629.491	3.015.695.815.549	54,53%
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	474.394.030.911	212.754.667.994	261.639.362.917	19,42%
PIUTANG PBB KEHUTANAN	492.606.633.014	477.992.946.905	14.613.686.109	(0,01%)
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	158.566.341.854	64.058.196.664	94.508.145.190	39,83%
PIUTANG BPHTB	179.947.361.649	803.339.377.782	(623.392.016.133)	266,67%
PIUTANG PTLL	16.386.067.497	815.162.918	15.570.904.579	0,00%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	2.263.304.065.654	2.788.050.134.099	(524.746.068.445)	33,43%
TOTAL*)	49.999.727.823.996	45.173.077.395.397	4.826.650.428.599	41,57%

Tabel 42
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	13.167.888.974.329
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	8.560.076.978.097
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	4.081.192.979.365
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	4.122.857.129.779
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	4.915.095.943.870
Lebih dari 5 Tahun	15.152.615.818.556
JUMLAH	49.999.727.823.996

Grafik 17
Piutang Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Per 31 Desember 2009



3. Nilai piutang pajak di DJBC per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp13.659.045.063.184,00. Piutang pajak merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak (dalam rupiah) dapat dilihat pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43
Rincian Piutang Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Per 31 Desember 2009

Akun	Nama Perkiraan	Rupiah
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	46.369.265.166
113131	Piutang PPN Dalam Negeri	1.910.119.388.044
113132	Piutang PPN Impor	242.980.196.543
113139	Piutang PPN Lainnya	40.102.155.164
113142	Piutang PPnBM Impor	32.417.342.712
113149	Piutang PPnBM Lainnya	492.321.416
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	9.777.543.116.859
113162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	132.712.267.500
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.919.640.200
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.366.976.700
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	89.118.752.770
113174	Piutang Bunga Penagihan PPN	26.296.597.609
113181	Piutang Bea Masuk	577.719.582.938
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	575.232.281.854
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	188.582.383.945
113185	Piutang Pajak/Pungutan Eksport	14.072.793.764
	Jumlah	13.659.045.063.184

Tabel 44

Rincian Piutang Penerimaan Perpajakan di DJBC Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2009
Dalam Rupiah

UMUR PIUTANG	1 s.d 60 hari	61 s.d 88 hari	89 hari s.d < 6 bulan	6 s.d 12 bulan	1 s.d < 3 tahun	3 tahun keatas	JUMLAH
JUANDA	377.203.671.881	1.594.656.147	3.554.037.629	0	8.445.016.018	0	390.797.381.675
GRESIK	31.921.409.640					7.113.808.003	39.035.217.643
PASURUAN	1.757.417.538.768	0	4.204.403.271	0	27.651.669.535	0	1.789.273.611.574
TG. PERAK	11.945.492.000	6.731.566.000	1.603.748.000	1.489.752.401	25.948.155.500	76.668.089.976	124.386.803.877
BOJONEGORO	67.848.432.000						67.848.432.000
KPU	115.390.569.632	42.655.389.983	39.406.222.894	106.729.354.572	562.006.014.813		866.187.551.893
CILACAP	33.878.395.800						33.878.395.800
KUDUS	4.451.616.156.117						4.451.616.156.117
TEGAL	20.866.881.600						20.866.881.600
SURAKARTA	88.630.031.070	25.443.059					88.655.474.129
PEKALONGAN	74.673.662.400						74.673.662.400
YOGYAKARTA	102.007.142.154						102.007.142.154
TANJUNG MAS	138.571.410.418	40.610.226.282					179.181.636.700
PURWOKERTO	35.217.860.400						35.217.860.400
KEDIRI	4.000.784.125.058						4.000.784.125.058
MADIUN	73.193.426.480						73.193.426.480
MALANG	871.779.425.175	10.438.421.378					882.217.846.553
BLITAR	51.566.116.080						51.566.116.080
PROBOLINGGO	142.252.795.500						142.252.795.500
TULUNGAGUNG	13.257.582.367						13.257.582.367
SATKER LAINNYA	232.146.963.184						232.146.963.184
JUMLAH	12.692.169.087.724	102.055.702.849	48.768.411.794	108.219.106.973	624.050.855.866	83.781.897.979	13.659.045.063.184

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melayani Importir yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok sampai dengan Tahun Anggaran 2009, pengajuan banding yang mendapat keputusan dibatalkan senilai Rp632.548.203,00 sedangkan yang diterima senilai Rp28.005.813.189,00.

Tabel 45
Rincian Piutang PNBP Per Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan
DJA	-	37.735.054.355.889	(37.735.054.355.889)
DJP	132.694.979	684.051.351	(551.356.372)
DJBC	69.799.468.362	81.577.174.250	(11.777.705.888)
DJPB	23.301.852	69.903.932	(46.602.080)
BAPEPAM-LK	17.405.801.313	3.633.182.000	13.772.619.313
BPPK	7.219.940	9.649.440	(2.429.500)
JUMLAH	87.368.486.446	37.821.028.316.862	(37.733.659.830.416)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp87.368.486.446,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJA per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp37.735.054.355.889,00. Mutasi kurang sebesar Rp37.735.054.355.889,00 tersebut disebabkan adanya pelimpahan Piutang Bukan Pajak di DJA kepada BA BUN (999).

Tabel 47
Rincian Piutang PNBP di DJPB
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

No.	Uraian Satker/Wilayah	31 Des 2009	31 Des 2008
1	Kantor Pusat	0	57.132.272
2	Kanwil II DJPBN Medan	15.264.152	0
3	Kanwil III DJPBN Padang	27.000	0
4	Kanwil XI DJPBN Jakarta	7.317.700	0
5	Kanwil XII DJPBN Bandung	0	729.720
6	Kanwil XXVIII DJPBN Ternate	0	12.041.940
7	Kanwil XXIX DJPBN Ambon	693.000	0
Jumlah		23.301.852	69.903.932

5. Saldo Piutang Bukan Pajak di Bapepam-LK per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp17.405.801.313,00 dan Rp3.633.182.000,00. Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK berasal dari Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bidang Asuransi dan Dana Pensiun).

Peraturan mengenai kebijakan piutang Bapepam-LK dapat dilihat pada lampiran 24.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.405.801.313,00 terdiri dari:

1. Piutang Denda di Bidang Pasar Modal sebesar Rp456.348.000,00 meliputi :
 - Piutang denda yang belum jatuh tempo sebesar Rp322.600.000,00.
 - Piutang denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar dan belum dilimpahkan ke DJKN sebesar Rp128.000.000,00.
 - Piutang bunga atas denda belum terbayar sebesar Rp5.748.000,00.
2. Piutang Denda di Bidang Lembaga Keuangan sebesar Rp1.850.210.000,00 terdiri dari:
 - Bidang Perasuransian sebesar Rp714.210.000,00.
 - Bidang Dana Pensiun sebesar Rp1.136.000.000,00.
3. Piutang dari iuran Badan Usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan triwulan IV tahun 2009 sebesar Rp14.694.243.313,00. Pembayaran iuran tahunan ini akan dilakukan paling lambat 15 Januari 2010.
4. Piutang dari denda karena wanprestasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp405.000.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil pencairan jaminan penawaran atas pengunduran diri PT Mangkubuana Hutama Jaya, pemenang lelang umum pengadaan meubelair, yang kemudian terjadi perubahan pemenang lelang menjadi PT Citra Heber Sejahtera yang merupakan pemenang cadangan I. Surat Nomor S-03/LU/BL/PPK/PPPM/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Pencairan Jaminan Penawaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT Asuransi Purna Artanugraha sebagai penjamin dilakukan sebagai upaya penagihan. Namun demikian, sampai akhir tahun 2009, hasil pencairan jaminan tersebut belum disetorkan ke Kas Negara karena akun untuk menampung pendapatan tersebut baru dimunculkan pada akhir bulan November 2009.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Des-09	31-Des-08	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5/4 X 100
1.	Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal	456.348.000	1.291.182.000	(834.834.000)	(64,66)
	- Piutang atas denda yang belum jatuh tempo	322.600.000	1.099.800.000	(777.200.000)	(70,67)
	- Piutang atas denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar (belum dilimpahkan ke DJKN)	128.000.000	187.000.000	(59.000.000)	(31,55)
	- Piutang atas bunga belum terbayar	5.748.000	4.382.000	1.366.000	31,17
2.	Piutang atas Denda di Bidang Lembaga Keuangan	1.850.210.000	2.342.000.000	(491.790.000)	(21,00)
	- Bidang Perasuransian	714.210.000	681.000.000	33.210.000	4,88
	- Bidang Dana Pensiun	1.136.000.000	1.661.000.000	(525.000.000)	(31,61)
3.	Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	14.694.243.313	-	14.694.243.313	-
4.	Piutang dari denda karena wanprestasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	405.000.000	-	405.000.000	-
Jumlah (1+2)		17.405.801.313	3.633.182.000	13.772.619.313	379,07

Berdasarkan tabel di atas, maka piutang bukan pajak Bapepam dan LK per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp13.772.619.313,00 atau 379,07 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2008. Adapun perubahan/mutasi tersebut berasal dari :

- a. Bidang Pasar Modal mengalami penurunan sebesar Rp834.834.000,00 atau 64,66 persen;
- b. Bidang Perasuransian mengalami kenaikan sebesar Rp33.210.000,00 atau 4,88 persen;
- c. Bidang Dana Pensiun mengalami penurunan sebesar Rp525.000.000,00 atau 31,61persen;
- d. Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp14.694.243.313,00;
- e. Piutang dari denda karena wanprestasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp405.000.000,00.

Perubahan/mutasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bidang Pasar Modal

1. Saldo Awal (1 Januari 2009)	Rp	1,291,182,000
2. Penambahan :	Rp	9,939,748,400
a. Tambahan Piutang Bidang Pasar Modal	Rp	9,930,874,000
b. Penyesuaian	Rp	8,874,400
3. Pengurangan (a+b+c)	Rp	10,774,582,400
a. Penerimaan Piutang Bidang Pasar Modal	Rp	10,039,948,400
b. Pelimpahan Piutang Bidang Pasar Modal ke DJKN	Rp	729,634,000
c. Pembatalan Sanksi Bidang Pasar Modal	Rp	5,000,000
Saldo Akhir 31 Desember 2009 (1+2-3)	Rp	456,348,000

Penyesuaian yang dimaksud dalam uraian tersebut di atas antara lain berupa adanya kelebihan pembayaran, bunga yang diabaikan karena telah melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan pembayaran dilakukan sebelum dikenai sanksi.

b. Bidang Perasuransian

1. Saldo Awal (1 Januari 2009)	Rp	681.000.000
2. Penambahan (a+b)	Rp	1.756.450.000
a. Tambahan Piutang Bidang Perasuransian	Rp	1.902.470.000
b. Penyesuaian	Rp	(146.020.000)
3. Pengurangan (a+b)	Rp	1.723.240.000
a. Penerimaan Piutang Bidang Perasuransian (kec. Persh cabut izin usaha)	Rp	1.365.240.000
b. Reklasifikasi piutang sebelum tahun 2009 ke Aset Lainnya	Rp	358.000.000
Saldo Akhir 31 Desember 2009 (1+2-3)	Rp	714.210.000

c. Bidang Dana Pensiun

1. Saldo Awal (1 Januari 2009)	Rp	1.661.000.000
2. Penambahan :	Rp	707.938.000
a. Tambahan Piutang Bidang Dana Pensiun	Rp	806.614.000
b. Penyesuaian	Rp	(98.676.000)
3. Pengurangan (a+b)	Rp	1.232.938.000
a. Penerimaan Piutang Bidang Dana Pensiun	Rp	1.201.420.000
b. Pelimpahan Piutang Bidang DP ke DJKN	Rp	31.518.000
Saldo Akhir 31 Desember 2009 (1+2-3)	Rp	1.136.000.000

Penyesuaian bidang Perasuransian dan Dana Pensiun terjadi karena penerimaan telah dilakukan sebelum tahun 2009, tetapi bukti pembayarannya baru diterima tahun 2009.

Rincian Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada lampiran 14.

Tabel 49
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	6.000.000	5.500.000	500.000	9,09
ITJEN	0	0	0	0,00
DJA	0	0	0	0,00
DJP	53.764.428	118.258.820	(64.494.392)	(54,54)
DJBC	91.438.844	39.338.481	52.100.363	132,44
DJPK	0	0	0	0,00
DJPU	0	0	0	0,00
DJPB	59.734.150	27.995.100	31.739.050	113,37
DJKN	17.124.996	26.887.500	(9.762.504)	(36,31)
BAPEPAMLK	0	0	0	0,00
BPPK	0	18.833.340	(18.833.340)	(100,00)
BKF	0	0	0	0,00
Jumlah	228.062.418	236.813.241	(8.750.823)	(3,70)

- Uang muka belanja modal	Rp 34.541.493,00
- Belanja pegawai yang dibayar di muka	Rp 1.800.000,00
- Belanja barang yang dibayar di muka	Rp 31.475.685.666,00
Jumlah	Rp 35.148.473.050,00

C.2.1.9 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari
Kegiatan
Operasional BLU
Rp24.255.654.147
,00

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp24.255.654.147,00 dan sebesar Rp21.505.689.090,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 51 berikut.

Tabel 51
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/Penurunan
01	Setjen (PIP)	24.105.879.147	21.489.519.090	2.616.360.057
11	BPPK (STAN)	149.775.000	16.170.000	133.605.000
Jumlah		24.255.654.147	21.505.689.090	2.749.965.057

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU di Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.105.879.147,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Kegiatan Operasional PIP. Kegiatan PIP berupa kegiatan investasi jangka panjang baik investasi langsung maupun investasi dalam bentuk Surat Berharga yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai sebesar Rp 24.105.879.147,00 tersebut merupakan piutang bagi hasil dari Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT (Piutang BLU Pengelola Dana Investasi) yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp24.105.879.147,00 yang terdiri atas piutang bagi hasil BPJT I sebesar Rp18.329.735.328,00 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2010 dan piutang bagi hasil BPJT II sebesar Rp5.776.143.819,00 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2010.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU di BPPK-STAN berasal dari kerja sama antara BLU STAN dengan Pemerintah Daerah Tarakan.

C.2.1.10 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional BLU
Rp17.028.732.863
,00

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Kementerian Keuangan hanya berasal dari Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Pusat Investasi Pemerintah. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp17.028.732.863,00 dan Rp27.310.262.126,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan non operasional PIP, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut berasal dari piutang bunga deposito yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2009.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di SETJEN-PIP per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 52.

Tabel 52
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU

Kode Akun 1	Uraian Piutang 2	Jumlah Rupiah 3
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)		
113991	Bunga deposito Bank Mandiri	Rp 3.178.767.124
	Bunga deposito BRI	Rp 4.632.191.781
	Bunga deposito BNI	Rp 2.962.191.780
	Bunga deposito Bukopin	Rp 1.117.808.219
	Bunga deposito Bank Jabar	Rp 1.249.315.069
	Bunga deposito BTN	Rp 2.101.985.871
	Bunga deposito BRI Syariah	Rp 321.065.753
	Bunga deposito BNI Syariah	Rp 61.576.661
	Bunga deposito Bank Muamalat	Rp 623.251.609
	Bunga deposito Syariah Bukopin	Rp 143.410.959
	Bunga deposito Syariah Mega	Rp 138.082.192
	Bunga deposito Syariah Jabar	Rp 145.753.425
	Bunga deposito Syariah Mandiri	Rp 49.315.068
STAN		
	Denda kelebihan pembayaran	Rp 304.017.352
Jumlah		Rp 16.724.715.511

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di BPPK-STAN berasal dari denda kelebihan pembayaran atas pembangunan gedung yang belum selesai pada STAN sebesar Rp304.017.352,00

C.2.1.11 Persediaan

*Persediaan
RP184.780.228.9
21,00*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp184.780.228.921,00 dan Rp136.686.985.845,00. Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* per 31 Desember 2009 yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan akuntansi persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Rincian Persediaan per unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel 53 berikut.

Tabel 53
Persediaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	2.909.267.656	1.035.769.082	1.873.498.574	181,51
ITJEN	450.635.697	283.736.338	166.899.359	58,82
DJA	785.928.012	836.968.647	(51.040.635)	(6,10)
DJP	113.685.538.106	88.200.439.352	25.485.098.754	23,81
DJBC	40.342.824.191	25.519.340.825	14.823.483.366	11,12
DJPK	130.864.681	92.501.780	38.362.901	41,47
DJPU	649.120.771	522.098.058	127.022.713	24,33
DJPB	17.097.752.335	13.867.612.911	3.230.139.424	23,55
DJKN	5.347.221.760	3.668.265.772	1.678.955.988	45,77
BAPEPAMLK	1.680.941.000	711.794.015	969.146.985	144,29
BPPK	1.097.382.044	1.410.640.810	(313.258.766)	(22,21)
BKF	602.752.668	537.818.255	64.934.413	12,07
Jumlah	184.780.228.921	136.686.985.845	48.093.243.076	23,21

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2009 per jenis persediaan dapat dilihat pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2009

Akun	Jenis Persediaan	31 Des 2009
115111	Barang Konsumsi	135.930.171.807
115112	Amunisi	1.529.832.181
115113	Bahan Untuk Pemeliharaan	8.587.025.693
115114	Suku Cadang	1.897.485.487
115121	Pita Cukai, Materai dan Leges	20.166.269.606
115124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	739.891.250
115131	Bahan Baku	2.469.804.058
115191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	45.346.000
115192	Persediaan barang hasil sitaan	12.008.465.721
115199	Persediaan Lainnya	1.405.937.118
	Jumlah	184.780.228.921

Tabel 55
Persediaan BLU per Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Eselon I	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan/Penurunan
01	Setjen (PIP)	34.226.800	8.900.180	25.326.620
11	BPPK (STAN)	1.142.596.967	0	1.142.596.967
	Jumlah	1.176.823.767	21.505.689.090	1.167.923.587

Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* per 31 Desember 2009 yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan akuntansi persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN. Saldo persediaan per 31 Desember 2009 tersebut akan digunakan sebagai saldo awal tahun 2010.

C.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang
Rp1.195.731.694.655,00

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp1.195.731.694.655,00 dan Rp828.379.875.579,00 merupakan investasi non permanen yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Investasi tersebut terdiri dari Pinjaman Yang Disalurkan Investasi Non Permanen BLU sebesar Rp1.195.731.694.655,00 dan Investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp0,00.

Invesasi Non Permanen BLU
Rp1.195.731.694.655,00

C.2.2.1 Investasi Non Permanen BLU

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen PIP per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.195.731.694.655,00 dan Rp707.595.178.400,00 seluruhnya merupakan investasi jangka panjang non permanen.

Invesasi BLU Pengelola Dana investasi
Rp1.195.731.694.655,00

C.2.2.1.1 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi

Investasi BLU Pengelola Dana Investasi merupakan bentuk Investasi Non Permanen PIP berupa Penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada pihak ketiga yang berasal dari dana bergulir dan pendapatan PIP yang digulirkan kembali. Investasi Non Permanen PIP sebesar Rp1.195.731.694.655,00 berupa Penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp1.026.131.694.655,00, PT Nindya Karya sebesar Rp82.000.000.000,00, PT Hutama Karya sebesar Rp55.600.000.000,00, dan PT Pembangunan Perumahan sebesar Rp32.000.000.000,00.

Penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan imbal hasil berupa pendapatan bagi hasil atas hasil yang diperoleh dari proyek yang dijalankan dari pembebasan jalan tol. Pinjaman kepada BPJT per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.026.131.694.655,00 yang bersumber dari dana bergulir (BA 999) sebesar Rp1.015.000.000.000,00 terdiri atas Perjanjian BPJT Tahap I sebesar Rp600.000.000.000,00 yang telah diterima kembali pokok investasinya pada bulan Januari 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 perjanjian BPJT Tahap II sebesar Rp425.000.000,00 dan pendapatan bagi hasil PIP (7,5 persen) atas Perjanjian BPJT I yang digulirkan kembali sebesar Rp11.131.694.655,00.

Pemberian pinjaman modal kerja yang dialihkan kepada PT Nindya Karya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan area parkir Bandara Medan Baru di Kuala Namu-Sumatera Utara adalah sebesar Rp82.000.000.000,00 dengan 3 tahap pencairan dana. Dana yang telah disalurkan kepada PT Nindya Karya per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp82.000.000.000,00 untuk 3 kali tahap pencairan. Rincian penyaluran adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk pencairan tahap I dan II serta Rp22.000.000.000,00 untuk pencairan tahap III per tanggal 22 November 2009.

Pemberian pinjaman modal kerja yang dialihkan kepada PT Hutama Karya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan struktur atap rangka baja dan arsitektur Bandara Medan Baru di Kuala Namu – Sumatera Utara sebesar Rp70.600.000.000,00 dengan 3 tahap pencairan dana. Dana yang telah disalurkan kepada PT Hutama Karya per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp55.600.000.000,00 untuk 2 kali tahap pencairan tahap I sebesar Rp35.000.000.000,00 dan tahap II sebesar Rp20.600.000.000,00.

Pemberian pinjaman modal kerja yang dialihkan kepada PT Pembangunan Perumahan dalam rangka pelaksanaan pemborongan pekerjaan tanah tahap II pembangunan Bandara Medan Baru di Kuala Namu – Sumatera Utara sebesar Rp42.000.000.000,00. Dana yang telah disalurkan kepada PT Pembangunan Perumahan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp32.000.000.000,00.

C.2.2.2 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp0,00

Investasi non permanen lainnya adalah investasi non permanen yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Berdasarkan KMK nomor 296/KMK.01/2008 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Melakukan Stabilisasi Pasar Modal Melalui Investasi Pemerintah Pada Saham-Saham BUMN, PIP mulai melaksanakan investasi pada saham-saham BUMN per November 2008 dengan menggunakan dana alokasi sebesar RP2.500.000.000.000,00 yang berasal dari BA 999.

Jangka waktu pelaksanaan program stabilisasi pasar modal sebagaimana dimaksud di atas adalah 1 (satu) TA terhitung sejak ditetapkannya KMK yaitu pada tanggal 15 Oktober 2008. Selama bulan Oktober 2009 PIP telah menjual seluruh saham BUMN yang dikelola seiring dengan berakhirnya penugasan untuk melaksanakan stabilisasi pasar modal.

Rincian saham BUMN yang dimiliki PIP per tanggal 31 Desember 2009 ditampilkan pada Tabel 56 berikut:

Tabel 56
Daftar Saham BUMN
(dalam rupiah)

LAPORAN HASIL TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM-SAHAM BUMN OLEH PIP

(Untuk Periode 27 Oktober 2008 s.d. 31 Januari 2009)

Tanggal Transaksi (1)	Nama Saham (2)	Lembar (3)	Nilai Beli (Rp) (4)	Nilai Jual (Rp) (5)	Biaya Penjualan (Rp) (6)	Keuntungan Penjualan Saham (7) = (5) - (4)-(6)
05 January 2009	Bank Rakyat Indonesia Tbk PT	1.500.000	4.429.867.500	7.275.000.000	14.913.750	2.830.218.750
05 January 2009	Bank Mandiri Tbk PT	6.680.000	8.961.046.320	14.708.500.284	30.152.425	5.717.301.539
06 January 2009	Bank Rakyat Indonesia Tbk PT	586.000	1.730.601.570	2.942.500.025	6.032.125	1.205.866.330
06 January 2009	Bank Negara Indonesia Tbk PT	3.740.000	1.722.292.440	2.767.600.000	5.673.580	1.039.633.980
07 January 2009	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT	2.228.500	9.258.436.960	17.863.875.062	36.620.944	8.568.806.016
07 January 2009	Bank Negara Indonesia Tbk PT	7.009.500	3.227.916.807	5.242.030.042	10.746.162	2.003.367.073
16 April 2009	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT	482.500	2.004.577.613	3.874.124.995	7.941.955	1.861.605.427
17 April 2009	Bank Negara Indonesia Tbk PT	10.749.000	4.949.978.994	10.379.039.843	21.277.032	5.407.783.817
20 April 2009	Aneka Tambang Tbk PT	2.939.000	2.500.883.270	4.139.010.158	8.499.666	1.629.627.222
20 April 2009	Jasa Marga Tbk PT	8.317.500	5.495.588.505	9.056.074.870	18.564.954	3.541.921.411
25 June 2009	Bank Mandiri Tbk PT	4.629.500	6.210.350.403	15.277.350.000	31.322.049	9.035.677.549
26 June 2009	Bank Rakyat Indonesia Tbk PT	2.085.500	6.158.992.448	13.605.760.290	27.891.809	7.418.876.033
13 August 2009	Bank Mandiri Tbk PT	2.050.000	2.750.021.700	8.148.750.000	16.704.614	5.382.023.687
13 August 2009	Timah Tbk PT	2.240.000	2.040.642.240	5.208.000.000	10.676.192	3.156.681.568
26 August 2009	Jasa Marga Tbk PT	8.317.500	5.495.588.505	15.387.375.000	31.544.119	9.860.242.376
26 August 2009	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	6.072.500	7.416.599.295	20.342.875.000	41.702.894	12.884.572.811
26 August 2009	Telekomunikasi Indonesia Tbk PT	3.254.000	17.428.049.790	27.984.400.000	57.368.020	10.498.982.190
28 August 2009	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2.405.000	2.937.327.510	8.212.125.025	16.834.856	5.257.962.659
08 October 2009	Aneka Tambang Tbk PT	2.939.000	2.500.897.965	7.861.825.000	16.116.741	5.344.810.294
08 October 2009	Timah Tbk PT	1.248.500	1.137.384.749	2.840.337.500	5.822.692	1.697.130.060
09 October 2009	Timah Tbk PT	1.964.000	1.789.205.964	4.468.100.000	9.159.605	2.669.734.431
12 October 2009	Telekomunikasi Indonesia Tbk PT	3.254.000	17.428.049.790	28.147.100.000	57.701.555	10.661.348.655
12 October 2009	Timah Tbk PT	3.524.000	3.210.367.524	7.700.125.010	15.785.257	4.473.972.229
	Total	88.215.500	120.784.667.861	243.431.878.103	499.052.994	122.148.146.107

Selama bulan Januari, April, Juni, Agustus dan Oktober 2009 PIP melaksanakan transaksi penjualan saham. Nilai penjualan saham TA 2009 adalah sebesar Rp243.431.878.103,00. Nilai penjualan termasuk biaya transaksi penjualan saham sebesar Rp499.052.994,00 (biaya jasa penjualan sebesar 0.205 persen atas nilai jual saham). Nilai perolehan saham yang terjual adalah sebesar Rp120.784.667.861,00 sehingga keuntungan atas penjualan saham adalah sebesar Rp122.148.146.107,00.

BUMN yang sahamnya dimiliki oleh PIP mengumumkan pembagian dividen pada TA 2009. Dividen atas saham BUMN yang dimiliki oleh PIP dibagikan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2009.

Rincian dividen yang diterima oleh PIP sampai dengan 31 Desember 2009 disajikan pada Tabel 57 berikut:

Tabel 57
Daftar Penjualan Saham BUMN
(dalam rupiah)

No.	Nama Emiten	Tanggal Pembayaran	Jumlah Rupiah
1	2	3	4
1	PT Bank Mandiri, Tbk	15 Juni 2009	Rp 593.779.763
2	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	3 Juli 2009	Rp 352.783.180
3	PT Aneka Tambang, Tbk	3 Juli 2009	Rp 168.894.044
4	PT Jasa Marga, Tbk	7 Juli 2009	Rp 434.442.155
5	PT Timah, Tbk	16 Juli 2009	Rp 1.193.874.500
6	PT Telekomunikasi, Tbk	27 Juli 2009	Rp 1.932.508.298
7	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk	4 Agustus 2009	Rp 353.850.850
Jumlah			Rp 5.030.132.790

C.2.3 Aset Tetap

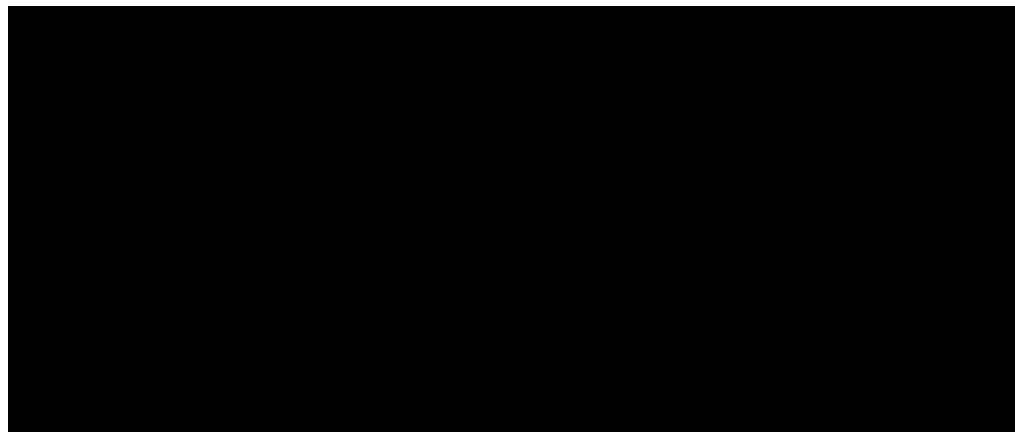
Aset Tetap
Rp33.779.034.063,2
96,00

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp33.779.034.063.296,00 dan Rp29.687.538.231.724,00. Nilai tersebut sudah termasuk Koreksi Nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2009 sebesar Rp2.236.814.096.608,00. Nilai koreksi ini merupakan koreksi yang dilakukan melalui SIMAK-BMN.

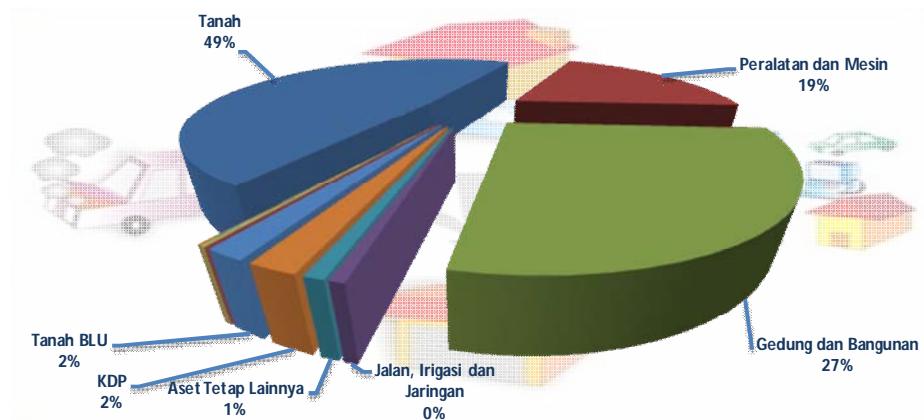
Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (depresiasi). Dalam rangka penyajian nilai wajar aset tetap milik Pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004, termasuk yang dimiliki Kementerian Keuangan. Penjelasan mengenai hasil koreksi nilai aset tetap sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilaian Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dijelaskan dalam pengungkapan lainnya.

Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada Tabel 58 dan Grafik 18.

Tabel 58
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2009 dan 2008

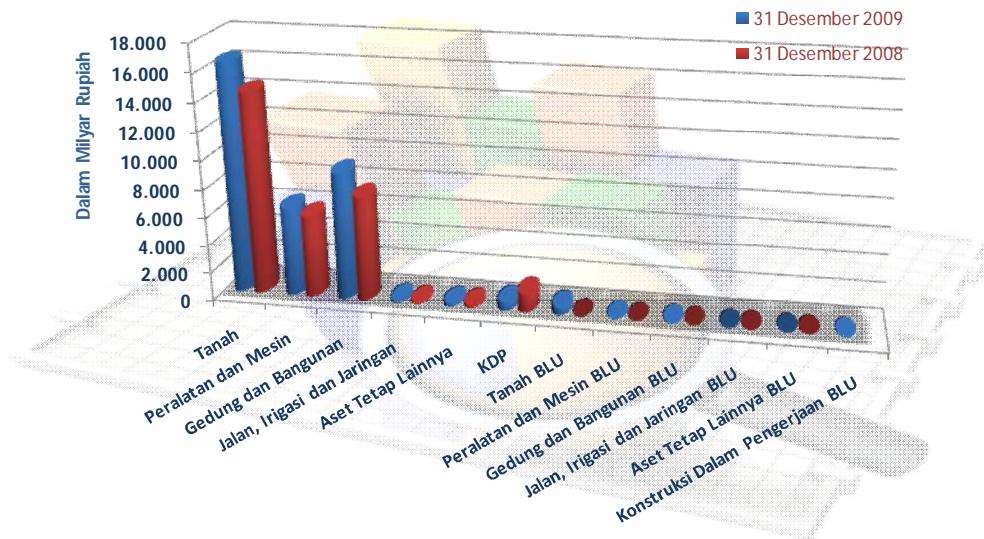


Grafik 18
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset



Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Grafik 19.

Grafik 19
Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap



C.2.3.1 Tanah

Tanah
Rp16.447.664.813.816,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp16.447.664.813.816,00 dan Rp14.429.849.284.717,00. Nilai tersebut sudah termasuk Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2009 sebesar Rp2.225.069.916.768,00.

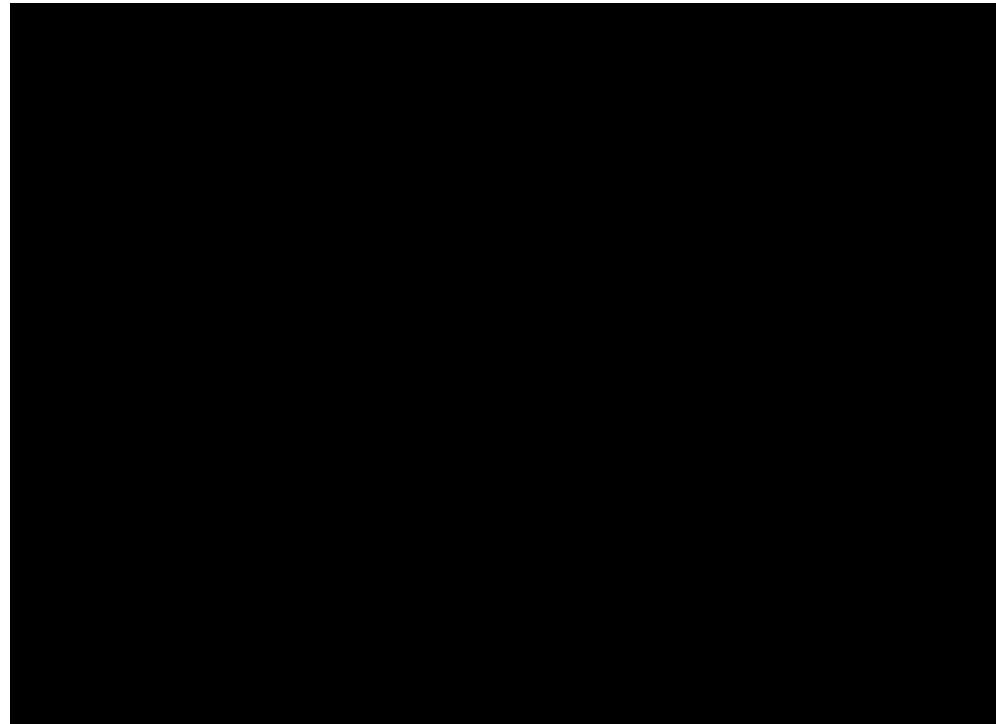
Rincian nilai Tanah yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan setelah koreksi dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59
Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

The table is completely redacted with black boxes.

Mutasi/perubahan Tanah dapat disajikan pada Tabel 60.

Tabel 60
Mutasi/Perubahan Tanah



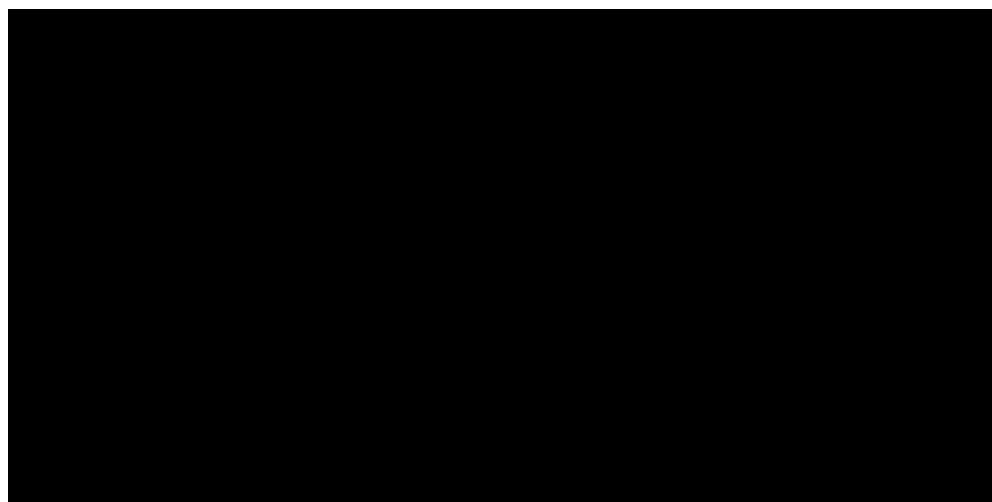
C.2.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp6.424.420.868.487,
00*

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp6.424.420.868.487,00 dan Rp5.918.215.830.895,00. Nilai tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2009 sebesar Rp(182.057.506.587,00).

Rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008



Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2008 dengan Saldo Awal Laporan SIMAK-BMN TA 2009 sebesar Rp 2.968.195.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

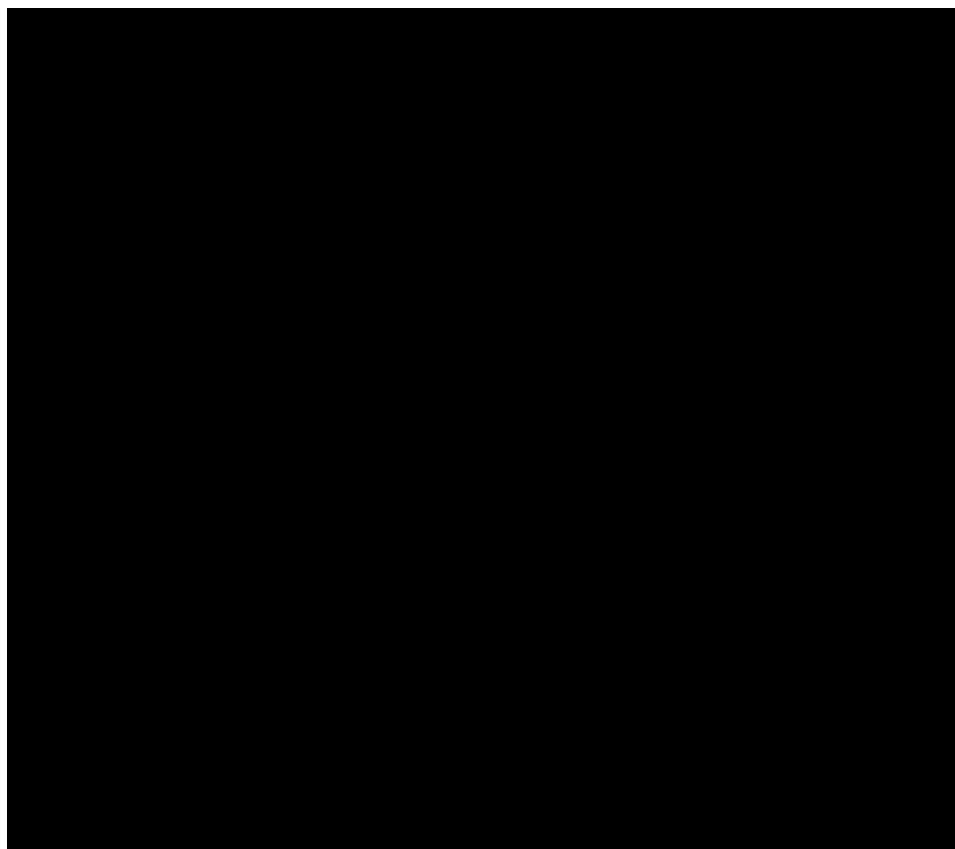
Eselon I	Audited 31 Des 2008	Saldo Awal SIMAK-BMN 2009	Selisih
Setjen	353.389.230.258	355.232.153.345	(1.842.923.087)
Itjen	25.059.413.953	25.087.511.315	(28.097.362)
DJA	28.465.898.424	29.266.744.359	(800.845.935)
DJP	3.217.317.808.089	3.217.326.806.589	(8.998.500)
DJPB	487.951.215.189	488.238.546.253	(287.331.064)
BPPK	67.384.013.141	67.384.013.145	(4)
Jumlah	4.179.567.579.054	4.182.535.775.006	(2.968.195.952)

Penjelasan selisih:

1. Selisih sebesar Rp2.395.408.820,00 pada Setjen, Itjen, DJA, dan DJPB merupakan jurnal neraca atas aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat.
2. Pada DJPB terdapat aset yang hilang berupa mobil sebesar Rp10.873.500,00.
3. Selisih sebesar Rp8.998.500,00 pada DJP terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas motor yang hilang pada Kanwil DJP Sumut I Rp11.200.000,00, dan koreksi atas kesalahan prosedur pencatatan sebesar Rp(2.201.500,00) pada KPP Pratama Candisari.
4. Terdapat pembulatan sebesar Rp4,00 pada satker Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada Tabel 62.

Tabel 62
Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin



Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar Rp14.344.516.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
DJP	3.365.861.808.418	3.365.882.009.222	(20.200.804)
DJPK	20.218.381.582	20.333.035.582	(114.654.000)
BPPK	81.881.279.560	96.090.940.869	(14.209.661.309)
Jumlah	3.467.961.469.560	3.482.305.985.673	(14.344.516.113)

1. Selisih kurang sebesar Rp134.854.804,00 merupakan reklasifikasi aset yang hilang di DJP dan DJPK, dimana dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan.
2. Selisih kurang sebesar Rp14.209.661.309,00 merupakan reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin BPPK ke aset Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum (STAN-BPPK).

C.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp9.173.928.261.05
3.00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp9.173.928.261.053,00 dan Rp7.565.818.510.870,00. Nilai tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2009 sebesar Rp192.888.382.707,00.

Rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 63.

Tabel 63
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

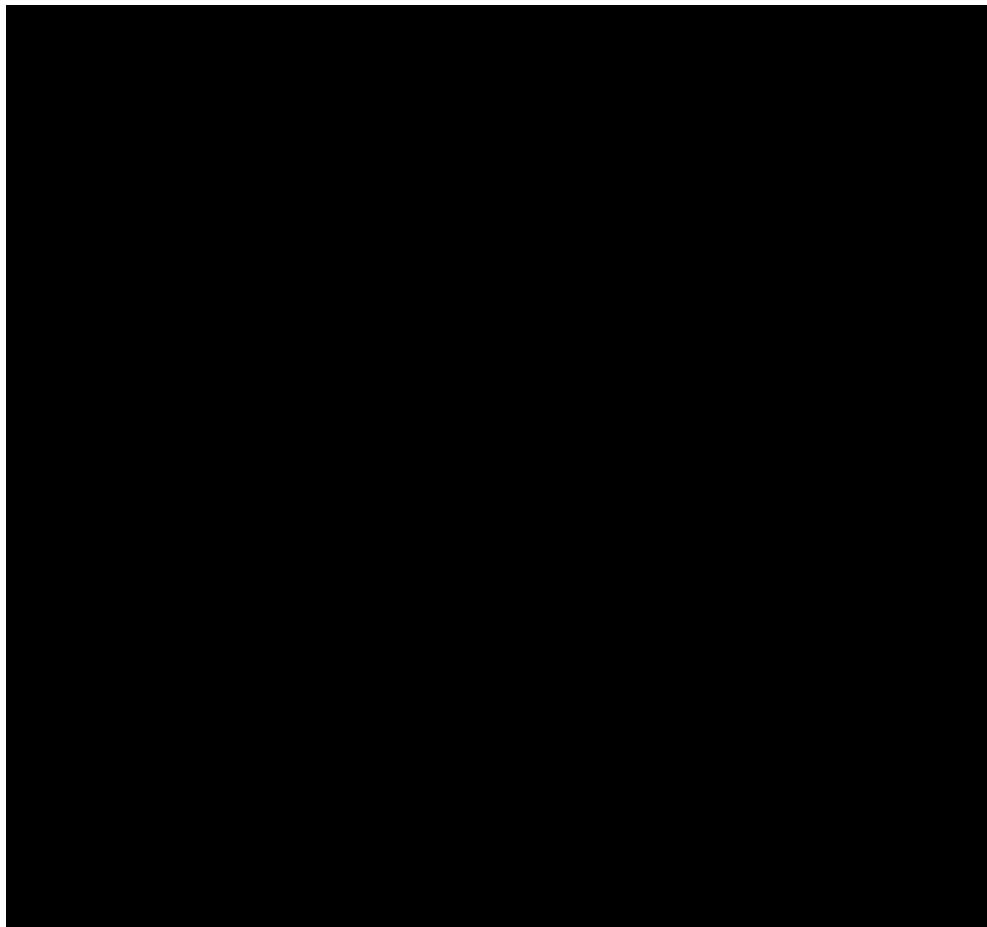
Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2008 dengan Saldo Awal laporan SIMAK-BMN TA 2009 sebesar Rp1.411.338.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	Audited 31 Des 2008	Saldo Awal SIMAK-BMN 2009	Selisih
Setjen	2.158.587.812.279	2.159.535.641.129	(947.828.850)
DJPB	938.856.697.823	939.320.207.075	(463.509.252)
Jumlah	3.097.444.510.102	3.098.855.848.204	(1.411.338.102)

Selisih sebesar Rp1.411.338.102,00 tersebut terdapat pada Setjen dan DJPB yang merupakan jurnal neraca atas aset tetap yang dihentikan penggunaannya.

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan



Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar Rp7.021.365.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
DJP	4.011.871.869.277	4.011.871.815.277	54.000
BPPK	226.574.810.971	233.596.230.631	(7.021.419.660)
Jumlah	4.238.446.680.248	4.245.468.045.908	(7.021.365.660)

1. Selisih pada DJP merupakan pembulatan dalam aplikasi SIMAK-BMN pada saat melakukan koreksi atas penilaian Tim Penertiban DJKN Tahun 2009.
2. Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar Rp7.021.419.660 yang merupakan koreksi reklasifikasi pada aplikasi SAK atas Gedung dan Bangunan pada BPPK yang sampai tanggal neraca belum dipergunakan dalam operasi pemerintah menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp194.929.862.012,
00*

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp194.929.862.012,00 dan Rp150.584.152.346,00. Nilai tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2009 sebesar Rp576.924.925,00.

Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to determine whether they will submit to the law of force, or the law of the Constitution. We consider the contest as open, and are prepared to meet it at any point.

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2008 dengan saldo awal laporan SIMAK-BMN TA 2009 sebesar Rp51.690.000,00 yang merupakan jurnal neraca atas aset tetap yang dihentikan penggunaannya pada Setjen.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat disajikan pada Tabel 66.

Tabel 66
Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp259.015.726.496,
00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp259.015.726.496,00 dan Rp242.709.155.830,00. Nilai tersebut sudah termasuk koreksi nilai oleh Tim Penertiban Aset DJKN sebesar Rp336.378.795,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 67 berikut.

Tabel 67
Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Eselon I	Audited 31 Des 2008	Saldo Awal SIMAK-BMN 2009	Selisih
Setjen	2.545.383.827	382.104.827	2.163.279.000
Itjen	505.008.431	233.710.307	271.298.124
DJBC	5.586.894.233	4.843.440.333	743.453.900
DJPK	4.588.559.911	236.233.860	4.352.326.051
DJPU	668.730.741	132.598.826	536.131.915
DJPB	5.921.072.628	2.380.269.653	3.540.802.975
DJKN	2.343.840.783	133.305.918	2.210.534.865
BAPEPAM	15.852.877.419	24.685.500	15.828.191.919
BPPK	12.826.883.863	10.075.326.575	2.751.557.288
BKF	310.895.535	138.079.650	172.815.885
Jumlah	242.709.155.830	210.138.763.908	32.570.391.922

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan *Audited* TA 2008 dengan saldo awal laporan SIMAK-BMN TA 2009 sebesar Rp32.570.391.922,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	Audited 31 Des 2008	Saldo Awal SIMAK-BMN 2009	Selisih
Setjen	2.545.383.827	382.104.827	2.163.279.000
Itjen	505.008.431	233.710.307	271.298.124
DJBC	5.586.894.233	4.843.440.333	743.453.900
DJPK	4.588.559.911	236.233.860	4.352.326.051
DJPU	668.730.741	132.598.826	536.131.915
DJPB	5.921.072.628	2.380.269.653	3.540.802.975
DJKN	2.343.840.783	133.305.918	2.210.534.865
BAPEPAM	15.852.877.419	24.685.500	15.828.191.919
BPPK	12.826.883.863	10.075.326.575	2.751.557.288
BKF	310.895.535	138.079.650	172.815.885
Jumlah	242.709.155.830	210.138.763.908	32.570.391.922

Penjelasan selisih:

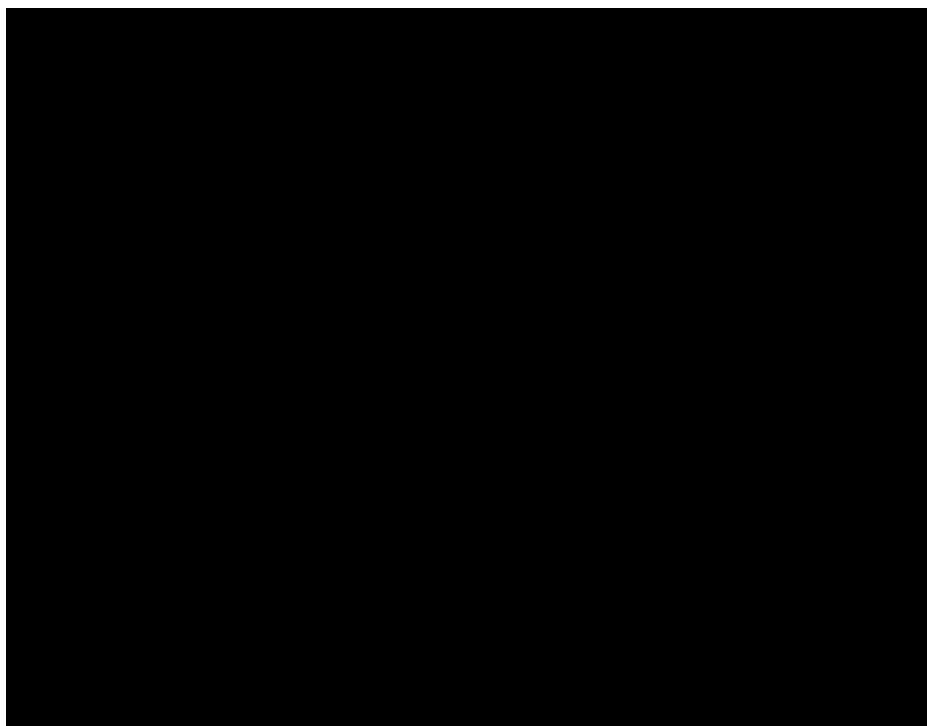
1. Selisih sebesar Rp2.163.279.000,00 pada Sekretariat Jenderal merupakan jasa renovasi rumah jabatan milik Sekretariat Negara di Jalan Widya Chandra yang digunakan oleh Menteri Keuangan.
2. Renovasi ruang kerja pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp271.298.124,00 menggunakan dana yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan, klasifikasi ke dalam akun Aset Tetap Lainnya dikarenakan Gedung Kantor bukan dalam pengelolaan Inspektorat Jenderal melainkan dalam pengelolaan Sekretariat Jenderal, sehingga terhadap penambahan nilai tersebut akan segera dikeluarkan dari pembukuan Inspektorat Jenderal dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang.
3. Aset Tetap Lainnya pada DJBC sebesar Rp743.453.900,00 merupakan aset renovasi.
4. Nilai aset tetap lainnya pada DJPK sebesar Rp 4.352.326.051,00 merupakan Belanja Modal untuk renovasi gedung milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang menggunakan DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (TA 2007)

sebesar Rp 1.583.784.900,00 dan TA 2008 sebesar Rp2.768.541.151,00). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum dilakukan serah terima atas pekerjaan renovasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Oleh karena itu nilai tersebut masih diakui sebagai aset tetap pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu terdapat reklassifikasi aset rusak berat ke aset lain-lain sebesar Rp7.066.400,00.

5. Renovasi gedung A.A. Maramis II milik Sekretariat Jenderal oleh DJPU sebesar Rp536.131.915,00 belum diserahterimakan.
6. Rehabilitasi gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga sebesar Rp3.540.802.975,00 pada DJPB, sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 04 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah bahwa transaksi tersebut disajikan sebagai akun Aset Tetap Lainnya.
7. Selisih lebih sebesar Rp2.210.534.865,00 pada DJKN merupakan aset renovasi.
8. Aset Tetap Lainnya pada BAPEPAM-LK sebesar Rp15.828.191.919,00 merupakan aset tetap renovasi penataan ruang kerja gedung Sumitro Djojohadikusumo.
9. Aset Tetap Lainnya pada BPPK sebesar Rp2.751.557.288,00 merupakan aset renovasi.
10. Aset Tetap Lainnya pada BKF sebesar Rp172.815.885,00 merupakan aset tetap renovasi penataan ruang kerja gedung Notohamiprodjo.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya dapat disajikan pada Tabel 69 berikut.

Tabel 68
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya

A large black rectangular box redacting the content of Table 68, which is supposed to show the change in Non-current Assets (Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya).

Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp51.356.196.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
Setjen	3.335.303.842	405.184.342	2.930.119.500
Itjen	839.843.508	457.036.635	382.806.873
DJA	2.295.448.000	345.414.071	1.950.033.929
DJBC	4.995.899.120	4.897.104.623	98.794.497
DJKP	4.755.352.563	335.526.512	4.419.826.051
DJPU	470.322.576	267.897.576	202.425.000
DJPB	2.337.258.020	920.533.020	1.416.725.000
DJKN	2.862.590.746	234.896.275	2.627.694.471
BAPEPAM-LK	29.702.119.028	76.993.700	29.625.125.328
BPPK	15.223.754.446	10.499.881.651	4.723.872.795
BKF	3.256.825.646	278.052.990	2.978.772.656
Jumlah	70.074.717.495	18.718.521.395	51.356.196.100

Penjelasan selisih:

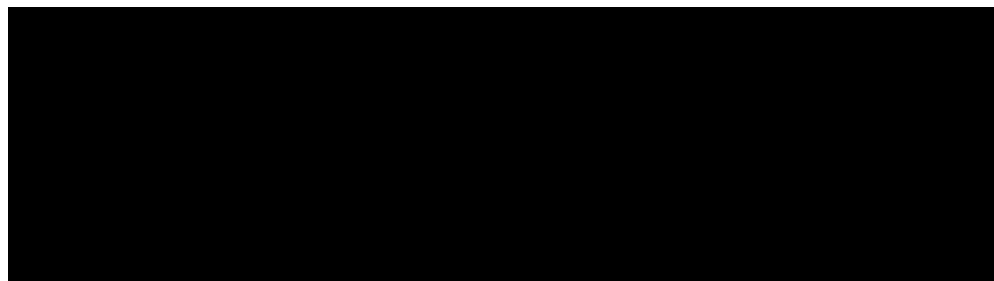
1. Selisih sebesar Rp2.930.119.500,00 pada Sekretariat Jenderal merupakan jasa renovasi rumah jabatan milik Sekretariat Negara di Jalan Widya Chandra yang digunakan oleh Menteri Keuangan.
2. Selisih pada Itjen, DJA, DJBC, DJKP, DJPU, DJPB, DJKN, BAPEPAM, BPPK, dan BKF sebesar Rp48.426.076.600,00 merupakan aset tetap renovasi yang belum diserahterimakan ke Biro Umum Setjen.

C.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp629.408.676.151,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp629.408.676.151,00 dan Rp1.376.403.863.346,00. Rincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 69.

Tabel 69
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008



Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disajikan pada Tabel 70.

Tabel 70
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

the first time in history that the United States has been involved in a war of aggression against another nation.

Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.021.419.660 yang merupakan koreksi reklasifikasi pada aplikasi SAK atas Gedung dan Bangunan pada BPPK yang sampai tanggal neraca belum dipergunakan dalam operasi pemerintah menjadi Konstruksi Dalam Pengajaran.

C.2.3.7 Tanah BLU

Tanah BLU
Rp543.228.844.000,
00

Nilai Tanah BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp543.228.844.000,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tanah BLU STAN pada BPPK.

Rincian Tanah BLU per Eselon I dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71
Aset Tetap Tanah BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Mutasi tambah tersebut berasal dari reklassifikasi masuk tanah STAN sebelum menjadi BLU

C.2.3.8 Peralatan dan Mesin BLU

Peralatan dan
Mesin BLU
Rp17.514.762.483,0
0

Nilai Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp17.514.762.483,00 dan Rp3.709.034.840,00. Nilai tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin BLU per Eselon I dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 72
Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat disajikan pada Tabel 73.

Tabel 73
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU

SALDO AWAL	3.709.034.840
MUTASI TAMBAH	13.805.727.643
Pembelian	969.346.177
Reklasifikasi Masuk	12.793.367.375
Pengembangan Nilai	43.014.091
SALDO AKHIR	17.514.762.483

C.2.3.9 Gedung dan Bangunan BLU

Gedung BLU
Rp62.505.104.506,00

Nilai Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp62.505.104.506,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU STAN pada BPPK.

Rincian Peralatan dan Mesin BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008



Mutasi tambah tersebut berasal dari reklassifikasi masuk dalam TA 2009.

C.2.3.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Jalan, irigasi, dan
jaringan BLU
Rp3.702.124.784,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp3.702.124.784,00 dan Rp206.174.500,00. Nilai tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008



Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat disajikan pada tabel 76.

Tabel 76
Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

SALDO AWAL	206.174.500
MUTASI TAMBAH	3.495.950.284
Reklasifikasi Masuk	3.483.950.284
Pengembangan Nilai	12.000.000
SALDO AKHIR	3.702.124.784

C.2.3.11 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya
BLU
Rp5.621.511.860,00

Nilai Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp5.621.511.860,00 dan Rp42.224.380,00. Nilai tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian Aset Tetap Lainnya BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 77
Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Aset Tetap Lainnya BLU	
Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2008
Nilai	Nilai
Rp5.621.511.860,00	Rp42.224.380,00
Mutasi tambah	Mutasi tambah
Rp5.579.287.480,00	Rp0,00
Mutasi kurang	Mutasi kurang
Rp0,00	Rp0,00
Total	Total
Rp5.621.511.860,00	Rp42.224.380,00

Mutasi tambah sebesar Rp5.579.287.480,00 tersebut berasal dari reklasifikasi masuk Aset Tetap Lainnya STAN sebelum menjadi BLU.

C.2.3.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU
Rp17.093.507.648,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp17.093.507.648,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU pada STAN BPPK.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 78.

Tabel 78
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	
Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2008
Nilai	Nilai
Rp17.093.507.648,00	Rp0,00
Mutasi tambah	Mutasi tambah
Rp17.093.507.648,00	Rp0,00
Mutasi kurang	Mutasi kurang
Rp0,00	Rp0,00
Total	Total
Rp17.093.507.648,00	Rp0,00

Mutasi tambah sebesar Rp17.093.507.648,00 tersebut berasal dari reklasifikasi masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan STAN sebelum menjadi BLU.

C.2.3.13 Informasi Tambahan Mengenai Aset Tetap

1. Hasil inventarisasi dan penilaian Aset Tetap yang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Kendaraan telah digunakan untuk koreksi saldo per 31 Desember 2004. Adapun hasil inventarisasi dan penilaian untuk inventaris masih ada yang belum digunakan untuk koreksi saldo awal, karena masih dalam proses penelitian.
2. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor PER-51/PB/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, hasil penilaian tidak akan mengubah posisi aset di dalam laporan barang kuasa pengguna, yaitu jika sebelum penertiban, aset tersebut mempunyai nilai di atas kapitalisasi (intrakomptabel) dan setelah dilakukan penertiban, aset tersebut mempunyai nilai di bawah kapitalisasi (ekstrakomptabel) tetapi akan terlaporkan dalam laporan barang kuasa pengguna intrakomptabel atau sebaliknya.

C.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp4.023.295.568.389,00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp4.023.295.568.389,00 dan Rp3.612.419.747.112,00, merupakan saldo Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud BLU, Aset Lain-lain, dan Dana Kelolaan BLU. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 79.

Tabel 79
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2009 dan 2008

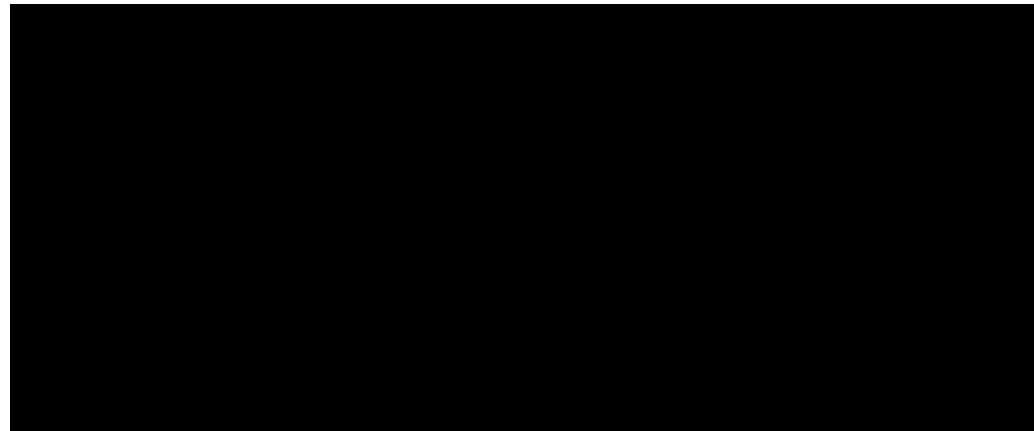
No	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
1	Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / TGR	5.422.524.799	8.857.225.495	(3.434.700.696)
2	Aset Tak Berwujud	312.417.249.310	201.420.558.400	110.996.690.910
3	Aset Tak Berwujud - BLU	534.108.790	484.208.790	49.900.000
4	Aset Lain-lain	386.815.398.044	222.442.451.606	164.372.946.438
5	Aset Lain-lain BLU	2.706.287.446	0	2.706.287.446
6	Dana Kelolaan BLU	3.315.400.000.000	3.179.215.302.821	136.184.697.179
Jumlah		4.023.295.568.389	3.612.419.747.112	410.875.821.277

C.2.4.1 Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ada pada Kementerian Keuangan hanya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang. Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR Kementerian Keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp5.422.524.799,00 dan Rp8.857.225.495,00. Berkurangnya nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR tersebut lebih dikarenakan oleh reklasifikasi akun Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan reklasifikasi menjadi akun Aset lain-lain karena penagihannya dialihkan kepada DJKN.

Rincian Tagihan Perpendaharaan/ TGR dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 80



Adapun rincian dapat dilihat pada lampiran 16 daftar Tagihan TGR Kementerian Keuangan TA 2009.

C.2.4.2 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp312.417.249.310,00 dan Rp201.420.558.400,00. Aset ini semuanya merupakan *software* yang dibeli dan/atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 81 berikut.

Tabel 81

Dalam TA 2009 terdapat lisensi software aplikasi di DJBC yang telah berakhir, sehingga tidak digunakan lagi sebesar Rp3.249.703.627,00.

C.2.4.3 Aset Tak Berwujud BLU

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebesar Rp534.108.790,00 dan Rp484.208.790,00. Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud Pusat Investasi Pemerintah.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82

Table 6

Mutasi sebesar Rp49.900.000,00 berasal dari pembelian software pada PIP Setjen.

C.2.4.4 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp386.815.398.044,00 dan Rp222.442.451.606,00.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 83.

Tabel 83

Aset Lain-lain sebesar Rp386.815.398.044,00 terdiri dari akun aset lain-lain (154111) berupa Piutang Pajak/Bukan Pajak dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang penagihannya dilimpahkan ke DJKN sebesar Rp185.277.922.583,00 dan akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (154112) sebesar Rp201.537.475.461,00.

C.2.4.5. Aset Lain-lain BLU

Nilai Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp2.706.287.446,00 dan Rp0,00.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 84.

Tabel 84

Figure 1. The effect of the number of clusters on the classification accuracy of the proposed model. The proposed model is compared with the KNN classifier. The proposed model shows better performance than the KNN classifier.

C.2.4.6. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebesar Rp3.315.400.000.000 dan Rp3.179.215.302.821,00. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999 yang dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, Badan Usaha dan BLU oleh PIP yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, PNBP dan tujuan lainnya. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2009 mencerminkan saldo Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan atau

diinvestasikan.

Dana kelolaan per 31 Desember 2009 mencerminkan saldo dana kelolaan dalam bentuk giro pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0456207-3 sebesar Rp300.400.000.000,00 dan deposito dengan masa sampai dengan tiga bulan yang disimpan pada Bank-bank Umum sebesar Rp3.015.000.000.000,00. Peningkatan total Dana Kelolaan BLU dikarenakan adanya penerimaan tambahan dana investasi APBN 2009 yang diterima PIP pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp500.000.000.000,00.

Sebagian dana yang berasal dari BA 999 telah disalurkan dalam bentuk investasi BLU Pengelola Dana Investasi berupa pinjaman yang telah disalurkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.089.600.000.000,00 terdiri dari pinjaman pada BLU lain yaitu BPJT sebesar Rp1.015.000.000.000,00, PT Nindya Karya sebesar Rp82.000.000.000,00, PT Hutama Karya sebesar Rp55.600.000.000,00 dan PT Pembangunan Perumahan sebesar Rp32.000.000.000,00. Rincian Dana Kelolaan BLU dapat dilihat pada Tabel 85 berikut.

Tabel 85
Rincian Dana Kelolaan BLU

No	Nama Bank	Rupiah	
1	2	3	4
DANA KELOLAAN			Rp. 3.315.400.000.000
1.	Giro di Bank Mandiri	Rp. 300.400.000.000	
2.	Deposito BTN	Rp. 200.000.000.000	
3.	Deposito BTN	Rp. 215.000.000.000	
4.	Deposito BNI	Rp. 340.000.000.000	
5.	Deposito Bank Mandiri	Rp. 600.000.000.000	
6.	Deposito Bank Jabar Banten	Rp. 235.000.000.000	
7.	Deposito BRI	Rp. 400.000.000.000	
8.	Deposito BRI	Rp. 480.000.000.000	
9.	Deposito Bank Bukopin	Rp. 300.000.000.000	
10.	Deposito Bank Syariah BRI	Rp. 45.000.000.000	
11.	Deposito Bank Syariah Mandiri	Rp. 100.000.000.000	
12.	Deposito Bank Muamalat	Rp. 100.000.000.000	
DANA BERGULIR YANG TELAH DIINVESTASIKAN			Rp. 1.184.600.000.000
1.	Pinjaman pada Pihak Ketiga Investasi non permanen lainnya	Rp. 1.184.600.000.000	
2.	(saham)	Rp. 0	
Nilai			Rp. 4.500.000.000.000

C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban .Rp359.251.417.318,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp359.251.417.318,00 dan Rp343.821.563.014,00. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Sewa Diterima di Muka, Uang Muka dari KPPN, Pendapatan yang Ditangguhkan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada Tabel 86 berikut.

Tabel 86
Posisi Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2009 dan 2008

No	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	47.132.934.883	85.383.199.848	(38.250.264.965)
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294.292.169.306	248.976.889.176	45.315.280.130
3	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.803.878.207	-	1.803.878.207
4	Uang Muka dari KPPN	4.021.141.586	6.910.417.866	(2.889.276.280)
5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	12.001.293.336	2.551.056.124	9.450.237.212
Jumlah		359.251.417.318	343.821.563.014	15.429.854.304

C.2.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp47.132.934.883,00 dan Rp85.383.199.848,00.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I disajikan pada Tabel 87 berikut.

Tabel 87
Utang Kepada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
01	SETJEN	937.522.943	474.713.524	462.809.419
02	ITJEN	103.455.766	-	103.455.766
03	DJA	15.635.712	21.391.045.397	(21.375.409.685)
04	DJP	18.736.859.944	63.500.181.137	(44.763.321.193)
05	DJBC	20.504.687.303	-	20.504.687.303
06	DJPK	79.600.000	-	79.600.000
07	DJPU	19.124.235	-	19.124.235
08	DJPB	2.363.953.519	2.772.515	2.361.181.004
09	DJKN	463.128.036	10.452.275	452.675.761
10	BAPEPAM LK	271.635.058	-	271.635.058
11	BPPK	3.206.690.664	4.035.000	3.202.655.664
12	BKF	430.641.703	-	430.641.703
Jumlah		47.132.934.883	85.383.199.848	(38.250.264.965)

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 47.132.934.883,00 terdiri dari:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 1.066.833.055,00. Nilai tersebut merupakan bunga jasa giro yang belum disetor pada rekening Kas Bendahara Pengeluaran yang terdaftar dalam *Treasury Notional Pooling* (TNP) dan Dana Pihak Ketiga yang belum diserahkan kepada yang berhak.
2. Utang Belanja sebesar Rp46.066.101.828,00.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan pada Tabel 88 berikut.

Tabel 88
Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2009

No	Uraian	31 Desember 2009	Keterangan
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.066.833.055	Jasa Giro TNP belum disetor
2	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	4.029.407.838	
3	Belanja barang yang masih harus dibayar	21.140.177.462	Belanja Layanan Daya dan Jasa
4	Belanja modal yang masih harus dibayar	30.000.000	
5	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	308.169.139	
6	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	20.558.347.389	
	Jumlah	47.132.934.883	

C.2.5.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp294.292.169.306,00 dan Rp248.976.889.176,00. Nilai tersebut merupakan SPM-KP per 31 Desember 2009 yang belum diterbitkan SP2D-nya di DJP.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan pada Tabel 89 berikut.

Tabel 89
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
04	DJP	294.292.169.306	248.820.736.013	45.471.433.293
05	DJBC	-	156.153.163	(156.153.163)
Jumlah		294.292.169.306	248.976.889.176	45.315.280.130

C.2.5.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp4.021.141.586,00 dan Rp6.910.417.866,00. Nilai tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN disajikan pada Tabel 90.

Tabel 90
Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
01	SETJEN	44.268.354	39.790.339	4.478.015
02	ITJEN	117.954	154.048.609	(153.930.655)
03	DJA	489.543.584	-	489.543.584
04	DJP	932.612.895	944.963.095	(12.350.200)
05	DJBC	707.708.058	2.220.664.300	(1.512.956.242)
06	DJPK	443.996.726	1.077.846.209	(633.849.483)
07	DJPU	-	-	-
08	DJPB	205.436.838	482.719.917	(277.283.079)
09	DJKN	470.614.265	1.981.854.596	(1.511.240.331)
10	BAPEPAM LK	-	-	-
11	BPPK	726.842.912	6.571.762	720.271.150
12	BKF	-	1.959.039	(1.959.039)
	Jumlah	4.021.141.586	6.910.417.866	(2.889.276.280)

C.2.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp12.001.293.336,00 dan Rp2.551.056.124,00. Nilai tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009. Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya dan Setara Kas.

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan disajikan pada Tabel 91.

Tabel 91
Pendapatan Yang Ditangguhkan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
01	SETJEN	1.022.845	246.771.871	(245.749.026)
04	DJP	6.546.697	1.822.735	4.723.962
05	DJBC	1.499.676.953	37.717.021	1.461.959.932
06	DJPK	-	5.515.783	(5.515.783)
08	DJPB	97.913.377	33.956.493	63.956.884
09	DJKN	10.154.213.294	2.220.673.613	7.933.539.681
10	BAPEPAM LK	-	2.177.773	(2.177.773)
11	BPPK	241.920.170	1.219.527	240.700.643
12	BKF	-	1.201.308	(1.201.308)
	Jumlah	12.001.293.336	2.551.056.124	9.450.237.212

C.2.5.5 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp1.803.878.207,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada BLU PIP Setjen Rp59.336.157,00 dan PNBP Lainnya Diterima Dimuka pada STAN BPPK sebesar Rp1.744.542.050,00.

Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka disajikan pada Tabel 92 berikut.

Tabel 92
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2009 dan 2008

Kode	Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Naik/Turun
01	SETJEN	59.336.157	-	59.336.157
11	BPPK	1.744.542.050	-	1.744.542.050
	Jumlah	1.803.878.207	-	1.803.878.207

C.2.6 Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas Dana
Lancar
Rp64.340.142.635.2
53,00*

Cadangan Piutang	Rp	63.811.792.196.013
Cadangan Persediaan	Rp	185.957.052.688
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	(342.162.149.341)
Dana Lancar BLU	Rp	684.555.535.893
Nilai	Rp	64.340.142.635.253

C.2.6.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang dan Uang Muka Belanja yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	63.647.762.787.088
- Piutang Bukan Pajak	Rp	87.368.486.446
- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Rp	228.062.418
- Uang Muka Belanja	Rp	35.148.473.050
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp	24.255.654.147
- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	Rp	17.028.732.863
J U M L A H	Rp	63.811.792.196.012

C.2.6.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan sebesar Rp185.957.052.688,00 merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Jumlah tersebut terdiri dari :

- Persediaan	Rp 184.780.228.921,00
- Persediaan BLU	Rp 1.176.823.767,00

C.2.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar (Rp342.162.149.341,00). Nilai tersebut terdiri dari :

1. Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 46.066.101.828,00
2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp294.292.169.306,00
3. Pendapatan Diterima Dimuka Rp 1.803.878.207,00

C.2.6.4 Dana Lancar BLU

Dana Lancar BLU sebesar Rp684.555.535.893,00 merupakan akun penyeimbang dari akun Kas pada BLU.

C.2.7 Ekuitas Dana Investasi

*Ekuitas Dana
Investasi
Rp38.998.061.3263
40,00*

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 terdiri dari:

- Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	Rp	1.195.731.694.655
- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp	33.779.034.063.296
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp	4.023.295.568.389
J U M L A H	Rp	38.998.061.326.340

C.2.7.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.195.731.694.655,00 merupakan penyeimbang Investasi Jangka Panjang.

C.2.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp33.779.034.063.296,00 merupakan penyeimbang Aset Tetap.

C.2.7.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp4.023.295.568.389,00 merupakan penyeimbang Aset Lainnya.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

*Catatan Penting
Lainnya*

1. Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan TA 2009 meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tata laksana, peningkatan manajemen sumber daya manusia, dan perbaikan struktur remunerasi. Untuk perbaikan struktur remunerasi, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.01/2008 tentang Penetapan Besaran TKPKN.

2. Adanya selisih kurs Kas Di Bendahara Pengeluaran untuk Satker Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Luar Negeri

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca DJBC per 31 Desember 2009 sebesar Rp707.708.058,00, dalam saldo tersebut terdapat kas di Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan DJBC di luar negeri sebesar Rp664.528.011,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Saldo di Neraca
			per 31/12/2009 (Rp)
1	411523	Perwakilan Luar Negeri DJBC di Hongkong	180.805.121
2	411532	Perwakilan Luar Negeri DJBC di Singapura	163.228.106
3	560681	Perwakilan Luar Negeri DJBC di Tokyo	99.772.631
4	524732	Perwakilan Luar Negeri DJBC di Brussel	220.722.153
		Total	664.528.011

Terdapat selisih antara saldo di Neraca per 31 Desember 2009 dengan nilai sisa UP dalam *original currency*-nya di Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp225.096.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Saldo Neraca	Sisa UP	Kurs tengah BI	Saldo seharusnya	Selisih
		per 31/12/09	(US\$)	31-Des-09	per 31/12/09	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7) = (3) - (6)
1	Perwakilan DJBC di Hongkong	180.805.121	12.055,76	9.400	113.324.144	67.480.977
2	Perwakilan DJBC di Singapura	163.228.106	5.497,53	9.400	51.676.782	111.551.324
3	Perwakilan DJBC di Tokyo	99.772.631	9.067,62	9.400	85.235.628	14.537.003
4	Perwakilan DJBC di Brussel	220.722.153	20.127,13	9.400	189.195.022	31.527.131
	Total	664.528.011	46.748,04		439.431.576	225.096.435

Selisih tersebut disebabkan adanya selisih kurs yang terakumulasi sampai dengan tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Selisih kurs (CaLK)				
		Laporan Pertanggungjawaban UP			Antara SSBP dg tgl neraca	
		Akumulasi s.d.31/12/2008	T.A. 2009	Total (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)-(3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
1	Perwakilan DJBC di Hongkong	65.091.776	3.196.937	68.288.713	-807.736	67.480.977
2	Perwakilan DJBC di Singapura	94.512.988	17.406.670	111.919.658	-368.334	111.551.324
3	Perwakilan DJBC di Tokyo	14.129.018	1.160.597	15.289.615	-752.612	14.537.003
4	Perwakilan DJBC di Brussel	27.602.317	5.273.331	32.875.648	-1.348.517	31.527.131
	Total	201.336.099	27.037.535	228.373.634	- 3.277.199	225.096.435

Total uang persediaan tahun anggaran 2009 setelah dipertanggungjawabkan dengan SPM GU Nihil dan Setoran sisa UP, masih terdapat saldo yang merupakan akumulasi selisih kurs dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Atas saldo pada Laporan Pertanggungjawaban UP yang merupakan selisih kurs, KPPN memotong uang persediaan tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi berkelanjutan sehingga potongan uang persediaan terakumulasi semakin besar.

Pengiriman Uang Persediaan dari Bendaharawan Kantor Pusat DJBC ke Satker DJBC Perwakilan Luar Negeri melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kantor Pusat DJBC mengirimkan Uang Persediaan ke Bendaharawan Kementerian Luar Negeri dalam bentuk rupiah;
- b. Bendaharawan Kementerian Luar Negeri mengubah Uang Persediaan tersebut ke dalam *original currency* US dollar dan mengirimkan ke

Satker DJBC Perwakilan Luar Negeri;

- c. Atas sisa Uang Persediaan dikirimkan dari Satker DJBC Perwakilan Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri dalam *original currency* US dollar, kemudian disetor ke kas negara dengan SSPB dalam bentuk rupiah.

Atas SSPB tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat DJBC dan pencatatan atas Uang Persediaan Satker Perwakilan Luar Negeri dalam bentuk mata uang rupiah, sehingga atas selisih kurs tersebut DJBC mengalami kesulitan untuk merincinya.

Terjadinya selisih kurs tersebut tidak dapat dihindarkan karena merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang diakibatkan adanya perbedaan kurs pada saat penransferan UP/TUP ke satker perwakilan LN dan pada saat penyetoran kembali atas sisa UP/TUP. Perbedaan antara permintaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dengan pertanggungjawabannya pada Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ UP) oleh DJBC dianggap sebagai saldo yang timbul diakibatkan adanya selisih kurs. Berkenaan dengan penetapan status saldo Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang diakibatkan oleh adanya selisih kurs tersebut, telah dikirimkan surat ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Nomor:S-391/BC/2010 tanggal 26 April 2010.

3. Aset Rumah Negara

Aset berupa rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak seperti para pensiunan, telah diupayakan pengosongan dengan membentuk Tim Penertiban Penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) Milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta TA 2009. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya pengamanan baik secara administratif maupun secara hukum. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Upaya Administratif, yaitu :

- 1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
 - 2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - 3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
 - 4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
 - 5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Departemen Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Juni 2009.
- b. Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

4. Masih terdapat aset berupa tanah milik Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat, dan diperlukan kebijakan khusus untuk melaksanakan pengurusan sertifikasi tanah dimaksud.

5. Hasil inventarisasi dan penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penertiban Aset DJKN lingkup Kementerian Keuangan telah digunakan untuk koreksi saldo awal aset tetap.

Berdasarkan Nota Dinas DJKN Nomor ND-51/KN/2010 tanggal 17 Maret 2010 hal Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian dalam Rangka Penertiban BMN pada Kementerian Keuangan dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor Klarifikasi Temuan BPK atas Aset Tetap Kementerian Keuangan yang Belum Di-revaluasi menyebutkan bahwa masih terdapat sebagian BMN yang belum dilakukan penilaian oleh DJKN pada Kantor Pusat DJP sebesar Rp6.773.122.701,00, Kantor Pusat DJPB sebesar Rp52.597.785.088,00, dan Biro Umum Setjen sebesar Rp197.220.137.135,00.

6. DJP dalam TA 2009 melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). PINTAR merupakan *project assistance* pada DJP yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan 48 bulan (1 Januari 2009 – 1 Januari 2013). Estimasi total pendanaan PINTAR adalah sebesar USD 150.000.000, terdiri dari pendanaan dalam negeri dan luar negeri, namun kegiatan PINTAR tersebut ditunda pelaksanaannya dengan alasan pentahapan untuk kegiatan dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada TA 2010 mendatang.

7. Pungutan Ekspor/Bea Keluar

Terhitung tanggal 1 Januari 2009 seluruh urusan Pungutan Ekspor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah diserahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyerahan keseluruhan berkas dilakukan pada tanggal 20 Februari 2009 bertempat di Gedung Radius Prawiro Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/AG/2009. Penyelesaian seluruh berkas urusan Pungutan Ekspor dilakukan DJBC dengan merumuskan suatu pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian Pungutan Ekspor. Atas serah terima pengurusan PE tersebut, DJBC telah membentuk Tim Penyelesaian Pungutan Ekspor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 09/BC/2009 Tanggal 6 April 2009. Tim PE telah melakukan verifikasi berkas yang hasilnya terdapat ketidaktepatan klasifikasi berkas dan belum jelasnya posisi piutang PE yang telah dilimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, telah dilakukan rekonsiliasi data antara DJA, DJBC, dan DJKN pada tanggal 4 s.d 5 Februari 2010. Adapun Rincian dan penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Lampiran 19.

8. Penelusuran Saldo Piutang sebelum pembentukan KPU Tanjung Priok

Dalam Laporan Keuangan KPUBC Tanjung Priok tahun 2008 terdapat saldo awal sebesar Rp231.296.085.366,00. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa saldo tersebut merupakan saldo piutang pajak Kanwil IV Jakarta per 30 Juni 2007, yang terdiri dari piutang pajak KPBC Tanjung Priok I, II dan III yang kemudian dilebur menjadi KPUBC Tanjung Priok sebesar Rp187.451.070.707,00, juga masih termasuk piutang pajak KPBC Jakarta per 30 Juni 2007 sebesar Rp43.845.014.659,00. Sedangkan piutang pajak yang terjadi selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2007 atau sejak berdirinya KPU Tanjung Priok sampai dengan akhir tahun 2007 tidak dilaporkan sebagai saldo akhir 2007 atau saldo awal tahun 2008. Berdasarkan Data Tagihan dan Penyelesaian dari Seksi Penagihan KPUBC Tanjung Priok, per 31 Desember 2007 terdapat piutang pajak (SPKPBM) periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2007 yang belum dilunasi sebesar Rp109.980.046.085,00.

DJBC telah membentuk Tim Penelusuran dan Pemetaan Piutang Pajak oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor :KEP-60/IJ/2009 tanggal 09 Juli 2009 dengan tugas :

1. Mencari saldo piutang berdasarkan data base SPKPBM KPBC Tanjung Priok I, II, III dan Jakarta yang ada di Direktorat IKC.
2. Melakukan pencarian dan inventarisasi dokumen-dokumen sumber terkait yang berada di KPU Tanjung Priok.

Berdasarkan penelusuran ke database di KPU Tanjung Priok sesuai Berita Acara Pengambilan Data Nomor BA-08/KPU.01/BD.0104/2010 tgl 19-02-2010, diperoleh saldo piutang KPU Tanjung Priok sampai dengan 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah dokumen	:	3670 SPKPBM
Bea Masuk	:	Rp 170.476.196.006
Denda Administrasi	:	Rp 81.445.638.315
Bunga	:	Rp 68.978.403.157
PPN	:	Rp 69.572.681.128
PPh Psl 22	:	Rp 18.332.388.082
PPnBM	:	Rp 21.352.119.674
Jumlah	:	Rp 430.157.426.362

Hasil penelitian atas saldo piutang tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Keberatan diterima/batal demi hukum : Rp 90.758.572.124,00
- b. Banding Batal/Kabul KPP : Rp 15.834.549.606,00
Rp 135.231.483.122,00

Terhadap angka tersebut telah dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan Audited 2009.

Atas sisa piutang yang belum tertagih tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pengelolaan Barang Hasil Tegahan, Sitaan/Rampasan, Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008, kriteria dari Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah sebagai berikut:

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah:

- a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau Barang yang dikirim melalui Pos :
 - 1) Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
 - 2) Dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

Barang yang Dikuasai Negara adalah :

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Barang yang Menjadi Milik Negara adalah:

- a. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;

- e. Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau dieksport; atau
- f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Atas barang yang menjadi milik negara yang dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan adalah barang yang telah memiliki status akan dilelang dan sudah mendapat keputusan dari Menteri Keuangan. Sedangkan barang yang berstatus dihibahkan, dimusnahkan dan barang yang belum ada peruntukannya hanya diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai lampiran. Hal ini karena barang-barang tersebut berada dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai, tetapi belum ada keputusan dari Menteri Keuangan tentang peruntukannya.

Pada KPU Tanjung Priok terdapat barang tegahan yang menjadi milik negara dengan status akan dilelang dan sudah mendapat keputusan dari Menteri Keuangan namun belum dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan sebesar Rp12.008.465.721,00. Saat atas barang tersebut telah dicatat sebagai persediaan pada Laporan Keuangan Audited 2009.

Berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari penjualan hasil sitaan/tegahan masih disajikan secara netto. Upaya kami menindaklanjuti temuan tersebut adalah dengan mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan nomor S-260/BC.1/2009 tanggal 12 Juni 2009, dan telah dijawab oleh Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan suratnya nomor S-684/SJ.3/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Untuk barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Pelelangan Permenkeu Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 yang mengatur bahwa :

- 1) Harga terendah untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara yang akan dilelang paling sedikit, meliputi:
 - a) Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Ps 22;
 - b) Sewa gudang TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
 - c) Sewa gudang di TPP;
 - d) Biaya pencacahan dan penimbunan di Tempat Penimbunan Pabean.

- 2) Hasil pelelangan setelah dikurangi bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22, sewa gudang serta biaya-biaya yang dikeluarkan, sisanya disediakan untuk pemiliknya.

Apabila atas sisa hasil lelang barang tidak dikuasai dan atau barang dikuasai negara sampai dengan 90 hari sejak tanggal pelelangan tidak diambil oleh pemiliknya, maka atas hasil pelelangan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- b. Untuk barang yang menjadi milik negara, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditetapkan bahwa hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.

Dalam pelaksanaan pelelangan, DJBC mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Bahwa terhadap pendapatan hasil penjualan hasil lelang barang yang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara, dikecualikan dari azas bruto dalam pencatatan pendapatannya, karena terhadap barang tersebut masih melekat hak keuangan negara seperti pungutan pabean dan PDRI, dan utang pada pihak ketiga seperti sewa gudang, biaya lelang dsb, sehingga atas biaya biaya tersebut dikurangkan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan hasil lelang (azas netto). Apabila atas sisa hasil lelang barang tidak dikuasai dan atau barang dikuasai negara sampai dengan 90 hari sejak tanggal pelelangan tidak diambil oleh pemiliknya, maka atas hasil pelelangan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- b. Pemberlakukan azas bruto dalam pelaksanaan penjualan barang tegahan/barang milik negara, DJBC mengalami kendala-kendala antara lain:
 - 1) Bahwa untuk pengalokasian biaya lelang harus menunggu tahun berikutnya, karena atas usulan RKAK/L harus dibuat pada awal tahun sebelumnya.
 - 2) Kesulitan dalam memprediksi jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk biaya lelang, karena frekuensi dan jumlah barang yang akan dilelang dalam satu tahun anggaran sulit untuk diprediksi.
 - 3) Dengan mengalokasikan sebagian anggaran DJBC yang terbatas untuk biaya pelelangan, akan dapat mempengaruhi pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama DJBC.

Kami informasikan bahwa pada saat perhitungan harga limit sudah memperhitungkan biaya-biaya seperti sewa gudang, biaya lelang dan sebagainya.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian secara komprehensif berkaitan dengan penjualan hasil

sitaan masih disajikan secara netto dan akan dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.

10. Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata Hingga 31 Desember 2009 adalah 5.642 rekening dengan rincian 5.637 rekening senilai Rp1.721.376.837.262,25 dan 5 rekening senilai US\$1,112,752.77. Perkembangan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan disajikan dalam Tabel 93.

Tabel 93
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009

No.	Pengelompokan Rekening	per 31 Desember 2008			per 31 Desember 2009		
		Rek.	Rupiah	Dolar	Rek.	Rupiah	Dolar
I. Dipertahankan							
1.a	Rek. Bend. Penerimaan	143	668,192,898,992.98	565,300.16	15	15,621,781,074.25	
1.b	Rek. TP PBB	3,694	-		0	-	
2.	Rek. Bend. Pengeluaran	1,853	8,217,952,583.18		1,613	3,379,518,460.72	
3.	Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (Diajukan menjadi BLU)	2	37,869,580,239.49		2	315,036,531,628.45	
4.	Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga	1,514	3,831,210,192,261.04	22,183,975.81	53	161,275,342,550.77	
5.	Rek. Penampungan Dana Titipan	6	71,082,717,634.94		0	0.00	
6.	Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat	1	0.00	0.00	1	972,000.00	2 23,563.36
7.	Rek. Penampungan Sementara	0	0.00		0	0.00	
8.	Rek. Penerimaan Non DIPA	0	0.00		0	0.00	
9.	Rek. Aktif Lainnya	0	0.00		2,106	775,464,021,392.86	3 1,089,189.41
Sub Total		7,213	4,616,573,341,711.63	22,749,275.97	3,790	1,270,778,167,107.05	5 1,112,752.77
II. Ditutup							
1.	Ditutup setor ke Kas Negara	840	388,367,274,556.40		1,082	391,692,406,565.16	
2.	Ditutup digabung ke rekening pemerintah lainnya	97	1,173,053,685.69		313	18,746,180,248.11	
3.	Ditutup setor ke Non Kas Negara	338	37,450,531,546.12		124	1,645,475,486.16	
4.	Ditutup setor ke Kas Negara dan Non Kas Negara	4	2,190.29		4	2,190.29	
Sub Total		1,279	426,990,861,978.50		1,523	412,084,064,489.72	
1.	Penutupan yang belum/tidak dilaksanakan	420	49,062,793,185.77		324	38,514,605,665.48	
2.	Tidak jelas identitas pemilik rekening	0	0		0	0	
3.	Pembahasan deadlock (dokumen/informasi tidak lengkap)	0	0		0	0	
Sub Total		420	49,062,793,185.77		324	38,514,605,665.48	
Total		8,912	5,092,626,996,875.89	22,749,275.97	5,637	1,721,376,837,262.25	5 1,112,752.77

Rincian mutasi rekening Kementerian Keuangan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2009 Audited.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK-RI dapat dilihat pada Lampiran 20.

D.2. Rekening Pemerintah

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 13.

D.3. Barang Tegahan

Daftar Barang Tegahan DJBC lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 21.

D.4. Barang Sitaan

Daftar Barang Sitaan DJP lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 22.